

Radio Melintas Zaman



Jakarta, 2012

Radio Melintas Zaman

Koordinator Program: **Pito Agustin Rudiana**

Tim Penulis :

- **Anang Zakaria • Bambang Muryanto • Darmanto, Lukman Hakim**
- **M. Faried Cahyono • Masduki • Masjidi • Olivia Lewi Pramesti**
- **Pito Agustin Rudiana**

Editor : **M. Faried Cahyono**

Periset Foto : **Heru Lesmana Syafei**

Dokumentasi : **Darmanto & Heru Lesmana Syafei**

Cover & Tata letak : **Alvine**

Cetakan Pertama, Desember 2012

Perpustakaan Nasional RI

Data Katalog Dalam Terbitan (KDRT)

Zakaria, Anang dkk

Radio Melintas Zaman/Anang Zakaria, dkk,

Banjarnegara, Sukses Mandiri Press, 2012

xxii + 206 hal; 14 x 21 cm

ISBN :

1. Radio Melintas Zaman I. Anang Zakaria, dkk

II. Sukses Mandiri Press

Diterbitkan oleh :



Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta & Radio Republik Indonesia

Bekerjasama dengan

Penerbit :

Sukses Mandiri Press

Jl. Raya Pucang No. 5 RT. 04 RW. 04 Ds. Pucang Kecamatan Bawang

Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Telp./Fax. 0281-6573058

Email : giaintrafi637@gmail.com/ mandiri_graff@yahoo.co.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Buku Radio Melintas Zaman

Perkembangan RRI sebagai lembaga penyiaran publik memasuki tahap penting pada usia ke 67 ketika Komisi I DPR RI berinisiatif untuk membahas rancangan UU khusus LPP. Setelah dipayungi oleh UU 32/2002 tentang Penyiaran, LPP RRI dan TVRI terus berbenah dan mengembangkan diri untuk menjadi lembaga penyiaran yang netral, independen dan non-profit. Adanya UU khusus LPP akan memperkuat eksistensi sekaligus mengatur secara lebih terperinci aspek-aspek pengembangan kelembagaan sebagai LPP, program siaran, sumber daya manusia, layanan usaha dan infrastruktur. RRI saat ini memiliki 78 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia dengan 246 programa siaran.

LPP RRI terus berupaya membangun aliansi untuk mencapai visi mewujudkan LPP RRI radio berjangkauan terluas, pembangun karakter bangsa, dan berkelas dunia. Untuk tujuan itu, maka jaringan kerjasama, dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak di masyarakat amat diperlukan. Sebagai media milik publik, sudah semestinya RRI menjadi bagian

dari dinamika publik yang dinamis, dan terus disoroti, diberikan dorongan untuk tumbuh menjadi radio publik yang terbaik tidak hanya di Indonesia.

Saat ini RRI terus melakukan terobosan-terobosan melalui berbagai program “On air dan off air”. diantaranya melakukan “Redesign Programa 1 dan 2”, sehingga siaran RRI:

- Pro 1 sebagai pusat siaran pemberdayaan masyarakat
- Pro 2 sebagai pusat siaran kreatifitas anak muda
- Pro 3 sebagai pusat siaran berita nasional
- Pro 4 sebagai pusat siaran budaya dan pendidikan
- VOI the Voice of Indonesia yang setiap hari siaran dalam 8 bahasa asing.

RRI mulai tahun 2011, mencanangkan “Perwakilan di Luar Negeri” diantaranya di Malaysia, Hongkong, Jepang, Korea, India, Taiwan, Belanda, Amerika Serikat, China, dan Singapore.

Selain itu RRI bekerjasama dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dunia dan Ikatan Indonesia Internasional (I-4) serta Diaspora Indonesia.

Hampir setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun terakhir RRI mendapatkan penghargaan internasional maupun nasional, diantaranya :

- ABU Award, di Bali tahun 2008 untuk Produksi dokumenter
- AIBD Award, di Macau tahun 2009 untuk Produksi dokumenter

- ABU Award, di Jepang tahun 2010 untuk Produksi dokumenter
- AIBD Award di Mongolia tahun 2010 Produksi Siaran Anak
- ABU Award, di Korea tahun 2012 Produksi “Green Radio” dan spot kampanye budaya

Buku berjudul Radio Melintas Zaman ini, merupakan inisiatif yang sangat penting bagi pencapaian eksistensi RRI sebagai radio milik publik. Testimoni dari para tokoh nasional yang berdomisili di Yogyakarta akan sangat bermanfaat bagi gerakan dan penguatan advokasi kelembagaan RRI dalam proses legislatif di DPR dan juga memperkuat keyakinan kami selalu angkasawan untuk terus berkarya. Kami menyambut baik hadirnya buku ini dan berharap langkah serupa dilakukan oleh Direktorat Program Produksi, untuk provinsi lain di seluruh Indonesia, tidak hanya di Yogyakarta

Jakarta, 15 Oktober 2012
Direktur Utama LPP RRI

Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si

Pengantar

Pembaca yang budiman. Setelah ada beberapa revisi, tulisan yang pernah dimuat di harian Kompas edisi Yogyakarta, bulan Oktober 2006 ini, kami sertakan kembali dalam buku Radio Melintas Zaman. Maksudnya, untuk menegaskan ‘benang merah’ pemikiran yang ada tahun 2006 dengan situasi aktual tahun 2012. Berikut tulisannya:

Momentum hari ulang tahun ke-61 Radio Republik Indonesia (RRI) tanggal 11 September memiliki makna mendalam ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya oleh dua hal. Pertama untuk pertamakali stasiun radio tertua dan terbesar di Indonesia itu menyatakan diri sebagai lembaga penyiaran publik. Kedua untuk pertamakali pengelolaan dibawah Dewan Pengawas sebagai amanat dari UU. Meskipun sudah sejak tiga tahun terakhir gema slogan “*radio publik milik bangsa*” berkumandang namun secara resmi logo RRI dan orientasi siarannya dinyatakan sebagai media penyiaran publik baru dimulai tahun 2006.

Barangkali hanya terjadi di Indonesia sebuah stasiun radio mengalami metamorfosa hingga tiga kali. Angin ribut reformasi tahun 1998 merubah secara drastis status kelembagaan dan orientasi operasional RRI. Identitas sebagai stasiun radio plat merah tamat secara yuridis seiring keluarnya UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Meskipun akhirnya TVRI dan RRI menjadi media penyiaran publik hingga saat ini, namun dalam masa transisi antara 1998-2004 pemerintah telah menetapkan TVRI sebagai perseroan terbatas dan RRI sebagai perusahaan jawatan. Sebuah opsi yang menunjukkan kebingungan sikap atas status lembaga tersebut, apakah akan secara murni diliberalisasi atau dipublikisasi.

Secara historis RRI memiliki empat era yang menunjukkan kuatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi eksternal terhadap nasib lembaga ini. Era pertama ketika RRI lahir dan dijadikan sebagai alat menyebarluaskan semangat kemerdekaan pada tahun 1945. Gelora nasionalisme yang kuat menyatu dengan kekuatan RRI sebagai radio yang mampu mengakses pelosok. RRI menjadi media menyuarakan kemerdekaan dari kolonialisme. Era ini hanya bertahan hingga konsolidasi rezim Soekarno kuat dan ketika berlaku kebijakan demokrasi terpimpin. RRI menjadi media propaganda politik elit yang berkuasa sejak rezim Soekarno berkuasa penuh dan diteruskan hingga era Orde Baru.

Era propaganda kekuasaan merupakan antiklimaks dari era media sosialisasi kemerdekaan dan

berakibat pada merosotnya popularitas RRI sebagai media milik publik. Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 mempengaruhi status dan orientasi pengelolaan RRI. Dari media yang dikuasai rezim Soeharto menjadi media yang secara politis “mengambang” seiring bubarnya instansi induknya Departemen Penerangan. Era ketiga ini menempatkan RRI terombang ambing dari media organik yang berpusat pada sistem pemerintahan yang relative masih otoriter di era Habibie dan Gus Dur dengan menjadi media komersial.

Pilihan menjadi media komersial yang tetap dibiayai pula oleh pemerintah akhirnya menjadi terwujud dalam status Perusahaan Jawatan. Sekali lagi era ini tidak menempatkan posisi *public* sebagai aktor dominan. Baik kekuatan Negara maupun pasar adalah kekuatan yang merepresi *public* tercermin dari kuatnya program yang memberi ruang lebih besar kepada seremoni pemerintah disatu sisi dan kuatnya program yang mewadahi eksperimentasi pengiklan dan pemodal lain yang mampu membayar jam siar untuk promosi. Pergeseran status dan orientasi pengelolaan RRI sudah terjadi beberapa tahun sebelum keluarnya UU No. 32/2002.

Sejarah RRI sesungguhnya adalah sejarah sebagai medium untuk propaganda kekuasaan dan proteksi kekuasaan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemilihan program, penekanan fokus isu, diskusi lewat orang terseleksi kekuasaan, hingga menghindari penyiaran yang bersifat kritis. Ini terjadi karena status

dan perannya di bawah Departemen Penerangan. Bahkan di era mantan Presiden Habibie, yang ditandai peran kuat radio swasta lokal dan berjejaring dan dibukanya pers bebas oleh Menteri Penerangan, RRI belum sepenuhnya menggunakan periode ini untuk mengubah peran. Alias tetap lebih berpihak pada kekuasaan. Hanya pada program-program tertentu berusaha lebih obyektif dan melayani kepentingan umum. Sebutlah siaran langsung pemilu ataupun Sidang Umum.

Mengutip pernyataan budayawan Garin Nugroho, sejarah sistem komunikasi Indonesia senantiasa berkaitan dengan dua karakter utama yakni radio dan TV swasta dan publik. Televisi dan radio swasta senantiasa berkaitan dengan perspektif sejarah kapitalisme, yakni suatu sistem produksi komoditas yang menjadikan korporasi swasta mampu memaksimalkan keuntungan mereka lewat sistem pensponsoran program-program di televisi swasta yang sesuai dengan target pasar komoditasnya. Meski demikian, patutlah dicatat, Amerika mampu mensintesisasikan kapitalis dan struktur demokratisasi lewat kultur televisi.

TV swasta di Indonesia meski dalam perspektif tertentu menjadi media yang mempunyai peranan penting pada reformasi lewat liputannya yang terbuka dan berani, namun keterikatannya pada iklan, menjadikannya memiliki berbagai kendala dalam menciptakan kultur demokrasi di Indonesia. Ditengah situasi inilah, TV dan radio publik mengambil peluang eksistensi. Artinya, radio dan televisi publik dengan

program-programnya melayani nilai-nilai keutamaan bangsa sehingga masyarakat mampu mengakses informasi, hiburan, pendidikan, kebudayaan dan kultur demokrasi yang sehat. Radio dan TV publik berpihak pada isu minoritas, sebutlah gender, hingga hak anak yang tidak populer bagi kepentingan iklan, namun bernilai untuk pertumbuhan berbangsa, perlindungan hak asasi manusia.

Penting dicatat, pilihan menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan keputusan strategis dan tepat bagi Indonesia. Namun demikian, tidak hanya perubahan status yang dibutuhkan, tetapi perubahan manajemen dengan mengadopsi berbagai model yang sudah berkembang di luar negeri, kemudian memformulasikannya dengan karakter lokal Indonesia yang multikultur. Dua persoalan besar yang harus diagendakan RRI adalah pertama bagaimana merubah stigma yang masih kuat di publik bahwa radio ini media organik pemerintah dengan segala peran propagandisnya. Ini harus dilakukan dengan meraih sebanyak mungkin partisipasi publik untuk mengisi program siaran RRI tanpa tendensi untuk akumulasi kebutuhan modal atau akumulasi kebutuhan akses politik kepada elit lokal. Kedua merubah pola interaksi budaya kerja dan pelayanan kepada publik dari klien menjadi mitra. Sebagai corong kepentingan publik insan RRI harus menempatkan diri sebagai pelayan kepentingan publik lokal.

Memasuki umur ke-67 tanggal 11 September 2012, Radio Republik Indonesia telah melewati berbagai tahapan bermakna dalam perjalanan sebagai lembaga penyiaran publik (*public service broadcasting*). Melalui salah satu visi RRI 2010-2015: membangun karakter bangsa, RRI memiliki tugas dan kewajiban mulia dan harus membangun reputasi ditengah kompetisi antar media massa yang sangat ketat, ditengah kuatnya tekanan politik elit untuk 'kembali' menjadikannya sebagai lembaga dibawah kendali pemerintah.

Khittah RRI sebagai LPP adalah membangun eksistensi diri yang kuat ditengah komunitas masyarakat yang majemuk, sekaligus terus memperluas jaringan kerjasama dan dukungan stakeholders. Faktor pendengar, pemerhati, kelompok peduli dan kelompok kritis adalah determinasi yang akan menentukan masa depan LPP RRI sebagai institusi non-profit. Sehingga diperlukan upaya mendengar, melihat, merenungi, melibatkan, mendokumentasi gagasan-gagasan stakeholders melalui beragam forum, *on air*, *off air* dan melalui produk media cetak seperti majalah, buku dll.

Penerbitan buku yang memuat testimoni, data historik, pengalaman personal dan aspirasi ke depan ini jauh dari maksud untuk memamerkan keberadaan dan dukungan para tokoh terhadap RRI, tetapi justru diharapkan menjadi bentuk pembuktian sikap kritis, harapan dan gagasan konstruktif yang terus hidup di kalangan publik terhadap eksistensi RRI. Dengan gaya tulisan yang ringan, khas karya jurnalistik, diharap-

kan muatan dalam buku ini mudah dicerna siapapun, sekaligus menjadi model buku yang dapat memperluas wilayah apresiasi dan membentuk pembaca baru atas dinamika relasi antara masyarakat dengan LPP khususnya RRI, dimulai dari Yogyakarta, dilanjutkan daerah lainnya.

Terima kasih kami sampaikan kepada para tokoh publik berskala nasional khususnya yang berkiprah di Yogyakarta dan sekitarnya, atas kesediaan waktu untuk menjadi nara sumber wawancara bagi tulisan-tulisan dalam buku ini. Terima kasih kepada tim penulis yang notabene adalah jurnalis profesional di Yogyakarta. Terima kasih kepada editor dan penerbit serta semua pihak yang terlibat. Selamat membaca dan mohon koreksi selalu untuk perbaikan di masa depan.

Buku ini sekaligus sebagai kado pengabdian kami yang telah memasuki waktu dua tahun di LPP RRI (sepanjang tahun 2010-2012).

Jakarta, 26 September 2012

Masduki
Direktur Program dan Produksi LPP RRI

Pengantar Editor

Radio Republik Indonesia (RRI) memperingati ulangtahunnya yang ke 67 pada 11 September 2012. Usia itu relatif panjang untuk ukuran manusia, tetapi relatif muda untuk ukuran waktu sejarah. Jika waktu yang dilalui oleh RRI bisa dipisahkan dalam periodisasi sederhana, maka ada tiga periode waktu penting, yang sudah dilalui oleh RRI. Yaitu, periode perjuangan kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin, periode masa Orde Baru, dan periode demokratisasi sesudah gerakan reformasi 1998. Setiap periode memiliki kekhususannya tersendiri. RRI tidak hanya melalui dengan mengikuti arus dan mendapatkan pengalaman, tetapi juga ikut memberi warna yang penting. Bahkan pada tikungan waktu tertentu, peran RRI demikian dominan. Dominannya RRI sebagai media massa, harus diakui dengan jujur, tidak selalu bermakna baik. Tetapi, tetap ada yang sama dari RRI dari waktu ke waktu. Yaitu, bahwa RRI sebagai radio siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran negara,

tak hanya sebuah lembaga penyedia informasi untuk publik, tetapi sekaligus salah satu alat pemersatu sebuah negara yang warganya terdiri dari berbagai suku bangsa, dengan wilayah luas yang menyebar. Asumsi dasar yang harus dipenuhi, sebagaimana diamanahkan konsitusi adalah, ketika semua disatukan, prasyaraatnya adalah sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran dalam keadilan. Untuk tujuan menjaga visi dan misi berbangsa bernegara itulah peran RRI ada. Sepanjang NKRI masih berdiri, maka RRI akant etap ada dengan produksi informasi yang tidak netral, tetapi dengan arah berita untuk menjaga negeri ini dalam kesatuan, kemajuan, kemakmuran dan keadilan adalah sebagaimana visi NKRI itu sendiri.

Buku ringkas dan diusahakan ringan dibaca ini, ditulis oleh para jurnalis yang merindukan RRI mampu menjaga negara Indonesia yang demokratis, negara yang seperti dilahirkan kembali dengan gerakan reformasi 1998. Buku berisi kumpulan pendapat (testimoni) dari para tokoh di DI Yogyakarta. Sebagian tokoh mengenal RRI di masa lalu hingga kini, sebagian mengenal RII dipenggalan waktu yang berbeda. Namun semua narasumber mengharapkan peran RRI yang besar di masa kini dan ke depan, ketika ruang kebebasan pers terbuka lebar dan hak asasi manusia yang termuliakan adalah tuntutan umum dunia kini. Buku dilengkapi dengan studi atas perjalanan RRI yang ditulis di awal tulisan, epilog ringkas tentang apa yang mungkin bisa dicapai oleh bangsa Indonesia dan peran RRI di masa kini dan ke depan.

Untuk buku ringkas ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta serta kawan-kawan RRI, khususnya pada Bapak Masduki, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, yang sudah memfasilitasi dengan serangkaian diskusi dan workshop hingga memungkinkan kawan-kawan jurnalis AJI melahirkan buku ini. Kepada para narasumber yang sudah menyediakan waktu luang kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Pada akhirnya tak ada gading yang tak retak. Buku ini terbuka untuk dikritisi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 27 September 2012.

M. Faried Cahyono
Editor

Daftar Isi

Pengantar

Oleh : Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si iii

Pengantar

Oleh : Masduki..... vii

Pengantar Edito

Oleh : M. Faried ahyono xv

Daftar Isi. xix

Inisiator Bukan Pemimpin

Oleh: Darmanto 1

Radio dan Politik Kebangsaan

Pembentuk Karakter Bangsa

Djoko Suryo, Sejarahwan UGM

Oleh: Olivia Lewi Pramesti 48

Bukan Suara Penguasa

Syafii Maarif, Mantan Ketua Umum PP

Muhammadiyah

Oleh : Pito Agustin Rudiana..... 57

Merawat Keberagaman Melalui Dialog

Malik Madani, Katib Amm NU

Oleh : Masjid 60

Dari Gender Hingga Semboyan GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI Oleh : Pito Agustin Rudiana.....	65
---	----

Radio dan Ekonomi Sektor Riil

Mengudara di Pasar-pasar Tradisional Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY Oleh : Pito Agustin Rudiana.....	74
---	----

Menumbuhkan Kelompok Wirausaha Baru Ambar Polah, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Oleh: Lukman Hakim.....	82
--	----

Radio dan Perkembangan Media

Era New Media Kuskridho Ambardi, Akademisi UGM Oleh: Olivia Lewi Pramesti.....	88
---	----

Menyesuaikan Perubahan Zaman Romo Baskara T Wardaya, Sejahrawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Oleh: Olivia Lewi Pramesti.....	97
---	----

Harus Bisa Seperti BBC di Inggris Imam Yudotomo, Aktivis Oleh: Bambang Muryanto	101
--	-----

Lebih Dekat dengan Masyarakat Herry Zudianto, Mantan Walikota Kota Yogyakarta Oleh : Anang Zakaria	108
--	-----

Tingkatkan Semangat Pengabdian Muchamad Suhud, Mantan Penyiar RRI Oleh: Olivia Lewi Pramesti.....	113
--	-----

Belajar dari Radio Lain Gogo Prayogo, Mantan Penyiar BBC Oleh : Olivia Lewi Pramesti	124
---	-----

Testimoni dalam Siaran Busyro Muqoddas, Pimpinan KPK Oleh : Pito Agustin Rudiana.....	128
--	-----

Radio dan Budaya

Radio Penawar Derita Yohanes Waluyo, Wakil Ketua I Paguyuban Kru dan Monitor RRI Yogyakarta Oleh : Anang Zakaria	131
--	-----

Harus Membaca Zaman Butet Kertarajasa, Aktor Oleh : Anang Zakaria	135
--	-----

Kethoprak Mataraman Perekat Masyarakat Bondan Nusantara, Aktivist Seni rakyat Oleh: Bambang Muryanto.....	139
--	-----

Siaran Budaya Bisa Jadi Andalan Duryat Subekti, Mantan Penyiar RRI Oleh: Masjidi	146
---	-----

Berdaya dan Berbudaya Oleh : Heru Lesmana Syafei & Darmanto.....	152
--	-----

Selamat Datang Era ke Empat RRI Oleh : Masduki.....	178
---	-----

Epilog

Oleh : Moch. Faried Cahyono dan

Lukman Hakim..... 183

Daftar Pustaka..... 197

Tentang Penulis..... 201

Inisiator bukan Pemimpin

Oleh: Darmanto

Dalam konteks sejarah Radio Republik Indonesia (RRI), peranan RRI Yogyakarta sangat besar dan strategis. Ia merupakan salah satu inisiator berlangsungnya pertemuan di Jakarta pada tanggal 11 September 1945 yang membidani lahirnya RRI. Pada masa perang kemerdekaan Republik Indonesia, RRI Yogyakarta memainkan peran yang tidak kalah heroik dengan militer. Begitu pula ketika Pusat Pemerintahan RI ada di Yogyakarta, RRI memainkan politik diplomasi melalui kebijakan siaran yang dilandasi semangat perjuangan dan jiwa nasionalisme. RRI Yogyakarta juga menjadi corong bagi Presiden Soekarno mengumandangkan semangat merebut Irian Jaya (Papua) dari tangan pemerintah kolonial Belanda. Demikian pula di masa transisi dari kekangan otoritarian menuju demokrasi yang memaksa RRI berubah haluan dari posisinya sebagai radio pemerintah menuju radio publik, RRI

Yogyakarta memainkan peran yang sangat besar.

Tulisan ini berusaha memaparkan fakta historis tentang peran RRI Yogyakarta dalam konteks nasional. Apa saja sumbangan RRI Yogyakarta terhadap negara, dan apa yang telah dilakukan untuk kemajuan RRI dalam skala nasional. Penyajiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan periodisasi waktu agar dapat menangkap semangat tiap-tiap zaman yang memengaruhi dinamika RRI. Untuk keperluan penulisan ini sepenuhnya bersandar pada sumber-sumber pustaka atau pun dokumen terkait yang relevan. Sesuai dengan prinsip historiografi, maka untuk mendapatkan informasi yang benar terhadap sumber-sumber yang dipergunakan sebagai referensi terlebih dahulu dilakukan kritik sumber untuk mendapatkan kebenaran informasi.

Lahirnya Radio Siaran di Indonesia

Pada tahun 1911 di Pulau Sabang ujung Utara Sumatera yang kini masuk wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), telah ada siaran radio yang dioperasikan oleh angkatan Laut Hindia Belanda. Akan tetapi pengaruh sosialnya belum begitu terasa, mungkin karena selama periode Perang Dunia (PD I) kegiatan mendengarkan sinyal radio (komunikasi maupun siaran) dianggap sebagai tindakan ilegal (Sen dan Hill, 2001). Baru setelah PD I orang-orang berani melakukan eksperimen untuk mendirikan radio siaran. Di Jakarta kemudian muncul *Bataviase Radio Vereniging*

(BRV) yang untuk pertama kali mengudara pada 16 Juli 1925.

Beberapa tahun sejak lahirnya BRV, mulai bermunculan radio siaran di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta sendiri menyusul lahirnya BRV, pada 8 April 1934 muncul radio *Vereniging voor Oosterse Radio Omroep* (VORO). Namun, di beberapa daerah sesungguhnya justru mendahului VORO, seperti *Meyers Omroep Voor Allen* (MOVA) di Medan tahun 1930, *Solose Radio Vereniging* (SRV) di Surakarta pada 1 April 1933, dan *Mataram voor Radio Vereniging* (MAVRO) yang lahir di Yogyakarta pada 22 Februari 1934. Setelah itu disusul lahirnya *Vereniging Oosterse Radio Luisteraars* (VORL) di Bandung, 30 April 1934; SRV Cabang Semarang lahir 1934; *Chineese en Inbeemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java* (CIRVO) lahir di Surabaya, 1935; dan *Erst Madiunesse radio Omroep* (EMRO) lahir di Madiun, 1936 (Kementerian Penerangan/Kemenpen, 1953). Radio-radio tersebut seluruhnya bersifat partikelir (swasta) yang kelangsungan hidupnya tergantung pada iuran anggota perkumpulan maupun dari NIROM sebagai kompensasi *merelay* acara siaran seni budaya tradisional. Radio-radio siaran yang programnya berorientasi kepada seni budaya daerah itu kemudian pada tahun 1937 mengorganisasi diri dalam satu wadah yang disebut dengan Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK (*Ibid.*).

Selain radio-radio tersebut di muka, sesungguhnya terdapat pula sejumlah lembaga penyiaran yang tergabung dalam badan usaha *Netherlandsche-Indische Radio*

Omroep Maatschappij atau lebih populer dengan sebutan NIROM. Pada dasarnya NIROM merupakan badan usaha yang didirikan oleh kebanyakan terdiri dari orang-orang Belanda dan pada tahun 1934 memperoleh izin resmi untuk menyelenggarakan siaran atas nama perintah Hindia Belanda (Wild dan Carey, 1986). NIROM berpusat di Jakarta, dengan cabangnya di Surabaya dan Semarang serta stasiun *relay* di Solo, Yogyakarta, Cepu, Malang, Sukabumi, Cirebon, Bogor, dan Padang. Dalam operasionalisasinya NIROM memperoleh subsidi dari pemerintah colonial Belanda melalui pemberian fasilitas berupa *luisterbijdrage* (pajak radio), dan materi utama siarannya berupa musik-musik barat dari piringan hitam. Sedangkan untuk materi seni tradisional NIROM merelay radio-radio yang tergabung dalam PPRK dengan cara membayar hak siar atau istilahnya pada waktu itu memberikan subsidi (Kempen, *opcit.*).

Di samping radio yang tergantung dalam NIROM dan PPRK juga terdapat jenis stasiun penyiaran yang lain, yaitu : VERAL, Van Wingan, Goldberg, Lyuks, dan Lindeteves. VERAL adalah radio penyiaran yang diusahakan oleh orang asing yang berada di Yogyakarta; sedangkan lainnya sebagai stasiun radio khusus “iklan” yang diselenggarakan oleh para pedagang dan siarannya dibatasi siang hari selama 1 jam berisikan informasi mengenai jenis-jenis produk yang dijual oleh para pengusaha.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan selanjutnya selama masa pemerintahan kolonial Belanda lembaga penyiaran radio di Indonesia

dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Lembaga penyiaran radio yang tergabung dalam “Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK”. Radio jenis ini umumnya bersifat partikelir (swasta), didirikan dan dikelola oleh warga pribumi dengan keterlibatan orang-orang keturunan Thionghoa. Pengadaan peralatan teknologi siaran pada umumnya berkat kerjasama antara kalangan bangsawan sebagai pemilik jaringan, sedangkan pendanaan ditopang oleh orang-orang keturunan Thionghoa. Materi utamasiarannya berupasenitradisional seperti wayang orang, seni suara, kerawitan, dan lawakan. Selain program hiburan terdapat pula program pendidikan seperti budi pekerti, pelajaran menari, apresiasi seni, kependuan (kepramukaan), dan lainnya. Isi siarannya mengarah pada penguatan identitas lokal untuk menggelorakan semangat nasionalisme. Dengan karakter program yang demikian maka radio-radio itu disebut sebagai radio ketimuran karena isi siarannya benar-benar merupakan antitesis dari radio NIROM yang cenderung kebarat-baratan (Wiryawan, 2011). Sumber pendanaan untuk menopang kelangsungan hidup radio berasal dari iuran anggota perkumpulan dan pembayaran hak siar dari pihak NIROM yang besar kecilnya diperhitungkan dari jumlah jam acara yang *direlay*. Sebagaimana disebutkan di muka, untuk memenuhi mata acara seni daerah pihak NIROM *merelay* siaran dari radio-radio ketimuran.
2. Lembaga penyiaran radio yang tergabung dalam

NIROM. Radio jenis ini didirikan dan dikelola oleh sebagian besar orang-orang Belanda, tetapi beberapa di antaranya adalah dari kalangan bumi putera (sebutan orang Indonesia asli pada masa itu). Dalam pengadaan peralatan teknik mereka tidak mengalami kesulitan karena memiliki jaringan langsung dengan luar negeri. Awalnya NIROM merupakan radio yang diperuntukkan bagi orang-orang Eropa yang ada di Indonesia dan sekaligus menjadi sarana untuk periklanan. Akan tetapi dalam perjalanannya, NIROM menjadi media resmi untuk menyuarakan kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dan karenanya mendapat hak untuk memungut pajak radio (*luistreibijdrage*), serta mendapatkan subsidi pemerintah.

3. Lembaga penyiaran radio yang diusahakan oleh orang asing yang ada di Indonesia dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Siaran lebih banyak diselenggarakan pada malam hari dengan materi utama berupa lagu-lagu barat yang bersumber pada piringan hitam. Tujuan didirikannya radio jenis ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hiburan dan romantisme bagi orang-orang Eropa yang ada di Indonesia. Radio ini bersifat non komersial dan menggantungkan sumber dananya pada hasil iuran anggota. Radio ini bersifat otonom dan tersebar di berbagai kota.
4. Lembaga penyiaran radio yang diselenggarakan oleh para pedagang (Eropa) dengan jam siaran

yang sangat terbatas, rata-rata hanya satu jam dan berfungsi sebagai media propaganda untuk menawarkan produk yang mereka jual. Materi utama siarannya berupa lagu-lagu dan iklan komersial tentang barang-barang yang dijual para saudagar. Sumber pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota, terutama yang mengiklankan barang-barangnya di radio itu.

NIROM versus Radio Ketimuran

Keberadaan NIROM dan radio-radio yang kemudian bergabung di dalam PPRK pada awalnya tidak saling mengganggu dan bahkan cenderung simbiosis mutualistik ditandai dengan kesediaan NIROM *merelay* acara-acara seni tradisional yang pada waktu itu memang sangat digemari oleh pendengar radio dari kalangan non Eropa dan disiarkan oleh radio-radio ketimuran. Sebaliknya pihak radio yang *direlay* mendapatkan imbalan uang sebagai bentuk pembayaran atas hak siar yang cukup memadai untuk menopang biaya operasional siaran.

Akan tetapi, hubungan keduanya memudar dan cenderung memperlihatkan sikap saling berlawanan. Hal itu berawal dari niat NIROM untuk mengambil alih penyelenggaraan acara-acara ketimuran yang sebelumnya ditangani oleh radio-radio anggota PPRK dan untuk selanjutnya akan disentralkan melalui siaran NIROM Surabaya. Kebijakan NIROM untuk mengambil alih penyelenggaraan siaran ketimuran di-

dorong oleh kenyataan bahwa masyarakat luas lebih banyak menyukai acara-acara yang bersifat ketimuran dari pada musik-musik barat yang menjadi andalan materi siaran NIROM. Pihak NIROM khawatir jumlah pendengarnya berkurang sehingga mengurangi kredibilitas dan berakibat menurunnya jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah Hindia Belanda. Namun, bisa juga kebijakan untuk mengambil alih program ketimuran itu sesungguhnya merupakan kepentingan pemerintah Hindia Belanda yang semakin khawatir terhadap pengaruh sosial politik yang ditimbulkan oleh siaran radio-radio ketimuran. Dengan semakin kuatnya dukungan terhadap radio-radio ketimuran otomatis minat mendengarkan radio NIROM makin berkurang, padahal NIROM merupakan media resmi pemerintah Hindia Belanda.

Bagi radio-radio yang berasaskan ketimuran, rencana NIROM tersebut cukup mengagetkan mengingat sebelumnya pihak NIROM berjanji akan meningkatkan jumlah subsidi yang diberikan kepada radio-radio ketimuran. Dengan diambilalihnya penyelenggaraan acara-acara ketimuran secara otomatis subsidi yang akan diberikan oleh pihak NIROM pasti berkurang mengingat besaran subsidi ditentukan oleh jumlah jam siaran yang *direlay*. Dengan demikian kalau rencana pengambilalihan direalisasi, maka para pengelola radio ketimuran harus menaikkan iuran anggota agar mendapatkan pemasukan yang dapat menjaga kelangsungan hidup radio mereka.

Berita tentang pengambilalihan siaran ketimuran oleh NIROM mendorong anggota *Gedelegeerde Volksraad* Sutarjo Kartohadikusumo pada tanggal 19 Nopember 1936 mengajukan usul agar *luiseerbijdrage* bagi mereka yang menjadi anggota perkumpulan radio ketimuran tiap-tiap kwartal tidak lebih dari f 3,-. Usulan Sutarjo yang juga ditandatangani oleh sesama anggota parlemen Sosrohadikusumo, Prawoto Sumodilogo, Soangkupon, H.H Kan dan Moh. Nor tidak bisa diterima oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Melihat situasi seperti itu M. Sutarjo Kartohadikusumo dan Ir. Sarsito Mangunkusumo kemudian memprakarsai pertemuan dengan wakil-wakil dari radio ketimuran yang diselenggarakan di Bandung tanggal 28 Maret 1937. Pada pertemuan tersebut berhasil menyepakati lahirnya suatu badan baru yang bernama “Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK)” yang beranggotakan 6 perkumpulan radio, yaitu: VORO, VORL, MAVRO, SRV Cabang Semarang, CIRVO, dan SRV. Adapun susunan kepengurusan PPRK terdiri dari Ketua M. Sutarjo Kartohadikusumo, Penulis/Bendahara Ir. Sarsito Mangunkusumo, Anggota Pengurus R. Abdulrachman dan R. Rujito.

Keberadaan PPRK ternyata diakui oleh pemerintah kolonial, hal itu terlihat dari adanya kesediaan dari para pembesar seperti Dr. de Kat Angelino, Dr. P.J.A. Indenburg, Ir. Hillen, Gobee, Enoch dan Dr. Haaksma untuk berunding dengan M. Sutarjo Kartohadikusumo di gedung Departemen van Onderwijs en Eeredienst

pada tanggal 7 Mei 1937. Dalam perundingan disepakati bahwa penyelenggaraan siaran ketimuran diurus oleh PPRK, sedangkan pihak NIROM mengurus masalah teknik teknologinya. Bentuk pengakuan yang lain atas keberadaan PPRK dinyatakan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Surat Keputusan No. A 43/9/19 tertanggal 26 Maret 1938. Akan tetapi upaya penyerahan penyelenggaraan siaran ketimuran kepada pihak PPRK dihambat oleh Dr. Tjong Boen Kie dengan alasan bahwa hal itu berarti mengurangi hak orang-orang Tioghoa untuk mendengarkan acara-acara ketimuran. Pendapat Dr. Tjong Boen memicu munculnya perdebatan pada sidang *Volksraad* ke-34 tanggal 16 Agustus 1938 sehingga keputusannya diambil secara voting dan kemenangan ada pada pihak yang mendukung mosi Sutarjo agar pemerintah segera menyerahkan hak penyelenggaraan program ketimuran kepada PPRK (*Ibid.*h.18)

Dengan diakuinya keberadaan PPRK oleh pemerintahan Hindia Belanda, muncul keberanian dari para anggotanya untuk memutuskan hubungan siaran dengan NIROM. Langkah itu membuat bingung pihak NIROM, sehingga berusaha melakukan berbagai pendekatan agar tetap diberi kesempatan untuk menyiarkan acara-acara ketimuran dengan janji akan memberikan subsidi yang lebih besar dari sebelumnya. Karena usaha pendekatan mengalami jalan buntu, NIROM menggunakan tangan resmi dalam hal ini pihak *Adviseur Inlandsche Zaken* menekan PPRK sehingga mau memberikan kesempatan kepada NIROM untuk menyiarkan acara-acara ketimuran.

MAVRO Embrio RRI Yogyakarta

Keberadaan RRI Yogyakarta tidak terlepas dari MAVRO, sebuah radio swasta yang proses pendiriannya dipelopori oleh kalangan bangsawan Yogyakarta, yaitu Pangeran Suryoatmojo, Pangeran Pakuningrat dan Ir. Purbodiningrat. Ketiganya mempunyai inisiatif untuk menyelenggarakan siaran radio seperti yang ada di Jakarta dan Solo. Mereka punya keyakinan bahwa Yogyakarta tidak akan kehabisan bahan siaran mengingat banyaknya pusat kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah ini, antara lain Kraton Kasultanan, Pakualaman, Taman Siswa, Kepatihan, Danurejan, Soos Tionghoa, Yudowinatan, sanggar Laras Madya, Sana Budaya, dan lain-lain.

Keinginan ketiga bangsawan tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Pada tanggal 8 Februari 1934 berhal dibentuk sebuah panitia yang terdiri dari 10 orang berasal dari kalangan bangsawan Kasultanan maupun Pakualaman, orang Tionghoa dan Belanda. Mereka terdiri dari Pangeran Suryoatmojo, Ir. Kusumaningrat, Pangeran Pakuningrat, Ir. Purboningrat, Liem Siau Ing, Tan Tik Tjay, Vermaesen, Rozenkranz, van Deutekom dan Pangeran Hangabei. Adapun susunan kepanitiaan selengkapnya terdiri dari Ketua Pangeran Suryoatmojo, Sekretaris Ir. Purbodiningrat, Bendahara Pangeran Pakuningrat, dan selebihnya sebagai anggota (*Ibid.* h. 14).

Kerja keras panitia pada akhirnya dapat mewujudkan impian sehingga pada tanggal 22 Februari 1934

MAVRO berhasil menyelenggarakan siaran untuk pertama kalinya dengan menggunakan pemancar milik van Deutekom pada gelombang 55,97 Meter dan kemudian diubah menjadi 153,06 Meter. Pada awalnya, MAVRO menyelenggarakan siaran 3 kali seminggu dari studio milik Vadera dan penyiarinya adalah para pengurus sendiri yang bertugas secara bergantian dengan materi utama lagu-lagu dari piringan hitam. Bahasa pengantar yang dipakai siaran meliputi bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Jawa sehingga setiap lagu yang diputar dikomentari dalam tiga bahasa sekaligus.

Guna meningkatkan kualitas siaran, pihak MAVRO melakukan kerjasama dengan SRV. Pada tanggal 4 Maret 1934 pengurus MAVRO melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Ketua SRV. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah diselenggarakannya siaran segi tiga yang melibatkan MAVRO, SRV, dan Radio Semarang (*Ibid.* h. 14 dan 78). Di samping membina hubungan kerjasama dengan pihak lain, secara internal MAVRO juga melakukan penyempurnaan organisasi. Berdasarkan hasil rapat tanggal 14 Desember 1934 susunan kepengurusan MAVRO teridiri dari Pelindung Sri Baginda Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Abdulrachman Sayidin Panotogomo Kalifatullah VIII, Ketua Kehormatan K.G.P.A.A. Prabu Suriodilogo, Ketua G.P. Hangabehi, Wakil Ketua B.P.A. Pakuningrat, Bendahara I Ir. B.K.R.T. Purbodiningrat, Bendahara II R. Rujito, Komisi Programa B.P.A. Suryodiningrat, Ki Hajar Dewantoro, Legosuhono, dan

Komisaris terdiri dari B.H. Prior Jr, Tuan Tan Tik Tjai, R. Sindutomo, Tuan Liem Siau Ing, Mr. R. Suyudi, Tuan Hoo Tien Djawn, serta R. Falam Adhiwarsito (Pewarta MAVRO, 1937).

Dengan adanya kepengurusan yang baru maka proses penyelenggaraan siaran MAVRO semakin tertata dengan baik. Kemajuan MAVRO juga ditopang oleh kemurahan hati Sri Sultan HB VII yang berkenan memberikan bantuan uang sebesar F 250,- dengan maksud agar MAVRO menyiarkan pelajaran srimpi dan wayang orang dari kraton. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membeli pemancar yang dipergunakan siaran melalui gelombang 87,87 Meter yang sebelumnya dipakai oleh Vadera. Sedangkan pihak Vadera sendiri karena siarannya hanya dua jam per hari, yaitu dari pukul 17.00 - 19.00 WIB akhirnya menggunakan saluran milik Veral (*Vereniging voor Amateurs en Luisteraars*).

Setelah memiliki pemancar sendiri MAVRO mengadakan siaran dari dua tempat, yaitu siang hari berlangsung dari Kepatihan, dan pada malam hari dari Pendapa Dalem Pangeran Hangabehi di Ngabean. MAVRO kemudian memenuhi harapan Sultan HB VII dengan mengadakan siaran pelajaran srimpi setiap jumat pukul 20.00 – 24.00 dan setiap hari pada pukul 10.00 – 14.00 menyiarkan pelajaran wayang orang, keduanya dari Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Pihak pengurus selanjutnya membeli pemancar lagi sehingga mulai 1 Desember 1938 MAVRO menyelenggarakan siaran dengan menggunakan dua pe-

manicar, yakni YDL 5 dengan gelombang 87, 98 M dan YDL 8 dengan gelombang 92,95 M. Tahun 1939 Sri Sultan HB VII kembali memberikan bantuan uang yang kemudian dipergunakan untuk membeli pemancar YDL 8 dengan gelombang 53 Meter, berkekuatan 500 watt yang semula milik van Wingen. Sumbangan besar Sultan Yogyakarta terhadap MAVRO tidak hanya ditunjukkan oleh Sultan HB VIII tetapi juga oleh Sultan HB IX. Pada waktu Belanda mengumumkan perang melawan Jepang, pihak Belanda berniat mengangkut pemancar YDL 5 untuk kepentingan balatentaranya. Akan tetapi Sultan keberatan dan mendesak agar rencana tersebut digagalkan sehingga pihak Belanda pun akhirnya mengalah (Kemenpen. *opcit.*).

Selain di bidang teknik teknologi kemajuan MAVRO juga ditunjukkan dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan program siaran. Di bidang SDM, semula MAVRO hanya mempunyai dua orang pegawai kemudian menjadi 6 orang, yaitu: Soemarmadi sebagai penyiar menggantikan saudara kandungnya yang dikenal dengan nama Komeet van Halley atau R. Ng. Poespokardoyo; R.M. Sadarusalam sebagai redaktur; Soedomomarto sebagai teknisi; Sukini sebagai operator; Jaiman dan Amat sebagai pelayan (*Ibid.*)

Dari segi program, acara-acara yang disiarkan MAVRO makin bervariasi, meliputi ketoprak, dagelan, *uyon-uyon* dari kraton, *uyon-uyon* dari Ngabean, *uyon-uyon* dari Pura Paku Alam, pembacaan buku roman oleh R.Ng. Pringgo Mardono, keroncong orkes Cempaka

Putih pimpinan Suprobo, Hawaian oleh Mardi Budaya pimpinan Sri Suprobo, dan Hawaian Mised Ticles pimpinan Imam Pramuja (*Ibid.*)

Dukungan masyarakat Yogyakarta terhadap MAVRO juga sangat besar hal itu ditunjukkan dengan kerelaan grup-grup kesenian menjadi pembantu (mengisi) siaran meskipun imbalannya tidak begitu berharga. Setiap grup kesenian Jawa yang mengisi siaran selama 4 jam hanya diberi imbalan berupa makan dan minum sekedarnya. Adapun grup-grup kesenian yang menjadi pengisi tetap siaran di MAVRO, antara lain Perkumpulan Dayapradangga pimpinan R.L. Laras Soembogo, Sari Budaya Pimpinan M.B. Hadicarito, Murboraras pimpinan R.L. Laras Sumbogo, Sihing Pangripta Pradangga pimpinan R.L. Sri Kuncoro, Modo Langen Suwara pimpinan R. Ng. hastokuswolo, Hoakiau Societeit Mataram pimpinan Puspokaton, Perkumpulan Brontoraras, dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang cukup signifikan untuk disimpulkan terkait dengan keberadaan MAVRO. Pertama, pilihan nama “Mataram” bagi kalangan nasionalis pada waktu itu adalah sebutan lain dari Yogyakarta yang mengandung makna perjuangan. Dengan demikian sejak awal, MAVRO memang telah diniatkan sebagai alat perjuangan berdasarkan semangat kebangsaan. Hal itu kemudian tercermin dari komposisi kepanitaan dan pengurus MAVRO yang terdiri dari berbagai suku atau ras. *Kedua*, siaran ketimuran yang paling diperhitungkan oleh pihak Belanda (NIROM) sehingga memiliki daya tawar tinggi ternyata tidak lain

adalah acara-acara yang disiarkan oleh MAVRO. Hal itu terbukti dengan ikut sertanya gubernur Belanda Adam dalam penyelesaian konflik melalui perundingan antara NIROM dengan MAVRO yang kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pihak MAVRO atas persetujuan PPRK akan mendapatkan subsidi *f.* 800 per bulan, sedangkan pihak NIROM memperoleh bahan-bahan siaran ketimuran dari MAVRO. Ketiga, terbentuknya poros Jogja, Surakarta dan Semarang yang kemudian berhasil menyelenggarakan siaran segi tiga yang memungkinkan jangkauan siaran ketimuran dapat lebih luas lagi. Dalam proses pembentukan poros ini terlihat bahwa peran MAVRO cukup besar karena menjadi inisiator. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, 17-8-1945, poros segi tiga itulah yang kemudian menjadi inisiator pertemuan 11 September 1945 di Jakarta yang melahirkan RRI (Abdidin Ass, 1995 dan Maladi, 1986).

Penyelenggaraan siaran MAVRO berhenti setelah tentara pendudukan Jepang memasuki kota Yogyakarta pada bulan Maret 1942. Sebagaimana terjadi di kota lain, tentara Jepang melarang adanya penyelenggaraan siaran radio di Yogyakarta sehingga semua radio yang ada di kota itu berhenti siaran dan organisasinya pun dibubarkan. Meskipun MAVRO akhirnya lenyap, tetapi dalam perkembangan sejarah selanjutnya ia dianggap sebagai cikal bakal atau embrio dari RRI Yogyakarta yang ada saat ini.

Radio Siaran di Yogyakarta pada Zaman Jepang

Perang Dunia II pecah pada tanggal 1 September 1939 ditandai dengan penyerbuan Jerman terhadap Polandia yang kedaulatannya dijamin oleh Inggris dan Prancis (Moedjanto, 1992). Dalam PD II Jepang bersekutu dengan Jerman dan Italia. Sedangkan Belanda bersekutu dengan Amerika dan Inggris. Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerbu pangkalan Amerika Serikat di Perl Harbor, Hongkong dan Malaya. Belanda segera mengikuti jejak sekutu-sekutunya dengan menyatakan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 10 Januari 1942 Jepang mulai menyerbu Indonesia dan pada akhir Februari 1942 berhasil menghancurkan armada gabungan Belanda, Inggris, Australia dan Amerika dalam pertempuran di laut Jawa (Ricklefs, 1991). Pihak Belanda akhirnya tidak mampu bertahan dan kemudian menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Peristiwa penyerahan yang dilakukan oleh Panglima Tertinggi Angkatan bersenjata Hindia Belanda Jenderal Ter Poorten diumumkan melalui radio NIROM pada hari senin tanggal 8 Maret 1945 pukul 07.45. Radio NIROM di Bandung menghentikan siarannya dengan kata-kata : *“Kita menutupnya sekarang. Selamat bertemu sampai hari-hari yang lebih baik. Hidup Ratu”* (Onghokham. 1989: 263). Adapun penandatanganan penyerahan dari Ter Poorten kepada Imamura (Jepang) dilakukan tanggal 9 Maret 1945 di Kalijati, Subang, Jawa Barat (Moedjanto, *Op cit.*

h. 72).

Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan tentara pendudukan Jepang dengan gem-bira karena dianggap memberi harapan baru bagi perubahan kehidupan sehari-hari. Rakyat Indonesia menyambutnya dengan kata-kata, “selamat datang”, sedangkan tentara Jepang membalas dengan ucapan, “Hidup orang Indonesia” atau “Hidup Indonesia”. Tentara Jepang juga membiarkan pemasangan bendera Jepang berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih (Latief, 1980: 13).

Euforia masyarakat Indonesia menyambut kedatangan tentara Jepang sempat terjadi di kalangan pers sehingga memunculkan berbagai tulisan yang merdeka. Tapi kemerdekaan pers hanya berumur beberapa hari sebab pada tanggal 20 Maret 1942 sudah keluar suatu Undang-Undang yang membatasi kebebasan rakyat. Tentara pendudukan Jepang kemudian membentuk Badan sensor Jepang yang bermarkas di Rijswijk 18 Jakarta dengan tugas pokok setiap Selasa dan Jumat pukul 09.00 – 12.00 melakukan pemeriksaan terhadap film-film, klise maupun semua hal yang akan menjadi barang cetakan. Ketentuan tentang wajib sensor ditegaskan kembali melalui Maklumat yang dikeluarkan oleh Dinas Pers Balatentara Jepang (Hodohan) tanggal 13 Mei 1942 (*Ibid.* h. 13-15).

Di bidang siaran radio, tentara pendudukan Jepang bersikap keras dengan membubarkan semua organisasi penyiaran yang ada sebelumnya, baik PPRK maupun NIROM dan radio siaran lainnya. Selanjutnya Jepang

membentuk sebuah jawatan khusus yang mengurus soal radio dengan nama Hosokanri Kyoku sebagai pusatnya di Jakarta, dengan cabang-cabang bernama Hosokanri Kyoku yang berdiri di 7 kota: Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Purwokerto, dan Malang. Selain itu dibentuk juga kantor-kantor cabang di tingkat kabupaten yang bernama Shodanso. Lembaga ini selain bertugas menyelenggarakan propaganda pemerintah pendudukan Jepang juga melakukan reparasi dan servis radio di daerah tersebut. Shodanso memegang peranan penting dalam mengatur penyelenggaraan radio untuk umum, propaganda, penyegelan terhadap radio atau menetapkan gelombang-gelombang mana yang boleh didengarkan (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990: 80). Selama pendudukan Jepang dilakukan pengontrolan secara ketat terhadap pemakaian pesawat radio. Semua gelombang yang bisa menangkap siaran radio luar negeri disegel, kecuali yang menangkap siaran dari Tokyo. Shodanso juga bertugas memasang pesawat radio dan penguat suara di tempat-tempat umum dan strategis sampai di pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat mendengarkan berbagai pengumuman dan propaganda yang disampaikan oleh pemerintah pendudukan Jepang (Abidin, 1985). Dengan demikian informasi yang sampai pada masyarakat melalui siaran radio sepenuhnya merupakan hasil pengendalian tentara pendudukan Jepang melalui sistem sentralisasi siaran.

Salah satu strategi Jepang dalam usahanya untuk mengalahkan pihak Barat dan sekaligus mendapatkan

dukungan rakyat Indonesia adalah dengan memutuskan hubungan emosi dan ikatan cultural. Oleh karenanya Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang kemudian menggantinya dengan bahasa Indonesia dan Jepang, melarang diperdengarkannya lagu-lagu barat maupun segala bentuk seni dan budaya yang berbau barat. Di bidang siaran kebijakan itu diterapkan secara tegas. Radio Jakarta yang sampai 6 bulan pertama pendudukan Jepang masih boleh siaran dengan menggunakan bahasa Belanda akhirnya dilarang sama sekali. Di balik kerasnya peraturan yang diberlakukan selama masa pendudukan Jepang ternyata ada hikmah besar bagi kemajuan pergerakan bangsa Indonesia. Pelarangan terhadap pemakaian bahasa Belanda justru menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama untuk propaganda dan dengan demikian statusnya sebagai bahasa nasional semakin kokoh (Ricklefs, *op. cit.*). Demikian pula dengan adanya larangan menyiarkan musik-musik barat justru mendorong munculnya karya-karya bangsa Indonesia sendiri dan melahirkan seniman-seniman baru, pemusik dan biduanita-biduanita baru (Darmanto, 1995).

Untuk menyelenggarakan siaran radio di awal pendudukan di Yogyakarta, Jepang diwakili oleh Nishizawa melakukan perundingan dengan mantan penyiar MAVRO, R.M. Soemarmadi. Keputusan penting yang dicapai adalah bahwa untuk melaksanakan siaran Hosokyo di Yogyakarta akan direkrut orang-orang yang dulu bekerja di MAVRO, VERAL, dan

Van Wingen. Sedangkan untuk pelaksanaan siarannya menggunakan studio VERAL di gedung NILLMY yang sekarang dikenal sebagai gedung BNI 46 di Jl. KHA Dahlan No. 1 Yogyakarta dan pemancarnya berada di Terban. Peresmian gedung NILLMY sebagai studio Hosokyo dilakukan pada bulan April 1942 (Kemenpen, 1953: 80).

Pada awalnya kebijakan penyiaran semasa Hosokyo adalah mewajibkan adanya jam tertentu untuk *merelay* siaran dari Tokyo dan mengudarakan lagu-lagu untuk tentara Jepang, dan selebihnya terserah pada pegawai Indonesia mau diisi apa. Akan tetapi dalam perkembangannya terjadi banyak larangan seperti telah dijelaskan di muka. Di samping itu kepemimpinan Hosokyo tetap dalam kendali tentara pendudukan Jepang. Pada awalnya Hosokyo Yogyakarta dipimpin oleh Nishizawa, tetapi pada 1943 digantikan oleh Morimoto yang baru datang dari Jepang, sedangkan Tata Usaha dipegang oleh Ueda, Bagian Teknik oleh Kawamura, dan bagian Siaran oleh Nagayama. Pada waktu yang bersamaan orang Indonesia yang menduduki posisi Kepala Bagian Siaran adalah RM Sumarmadi, sedangkan Bagian Teknik adalah Soedomomarto. Adapun pegawai lain dari Indonesia yang bekerja di Hosokyo Jogja adalah Sukirni, Djaiman, Amat, Pawiro, Djamal Marsudi, Sunarjo, Suseno, Sumarti Tjitroatmodjo, Hadisukanto, Kistjah, Sudarso, WK, dll. (*Ibid.*)

Tahun berikutnya (1944), terjadi mutasi di lingkungan Hosokyo. Morimoto dan Ueda dipindahkan ke Surabaya, sebaliknya Okonogi dan Funayama dari

Hoso Kyoku Surabaya dipindah ke Yogyakarta. Di bawah kepemimpinan Okonogi Hoso Kyoku Jogja berkembang baik. Poros segi tiga Jogja-Solo-Semarang berlangsung terus, dan pimpinan dari tiga Hoso Kyoku melakukan saling kontak. Pimpinan Hoso Kyoku Solo Muladi bersama teman-temannya sering berkunjung ke Jogja untuk membicarakan berbagai kemungkinan di masa datang (*Ibid.*).

Menyusul dijatuhinya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang segera menyerah kepada Sekutu. Berita penyerahan itu sempat disadap oleh orang Indonesia yang bekerja di kantor berita Jepang, Domei, tetapi pihak Jepang tidak menghendaki berita kekalahan mereka disiarkan sehingga pada tanggal 15 Agustus staf siaran Indonesia melancarkan pemogokan. Dua hari kemudian, tepatnya 17 Agustus 1945, para penyiar radio di Merdeka Barat Jakarta berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan membacakannya melalui radio (Wild, *Op cit.* 65). Namun, teks proklamasi yang dibacakan pada pukul 19.00 itu hanya bisa didengar di sekitar Jakarta sehingga muncul inisiatif dari pihak teknik (operator) Suwardi dan Ismaun, untuk menyalurkan pembacaan teks melalui siaran luar negeri yang terletak di Bandung dan ternyata berhasil. Adapun penyiar Hoso Kanri Kyoku yang berjasa atas dibacanya teks proklamasi adalah Yusuf Ronodipuro dan Bachtiar Lubis. Berkat disiarkannya melalui siaran luar negeri maka pendengar di Australia bisa mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 (Effendy, 1990).

Pihak Jepang marah ketika mengetahui bahwa radio di Indonesia telah menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jepang kemudian menutup seluruh siaran radio, baik yang ada di Jakarta maupun Hosokawa yang ada di daerah-daerah, termasuk di Yogyakarta. Akan tetapi, mereka belum mau menyerahkan segala peralatan siaran kepada pegawai Indonesia, semuanya tetap mereka kuasai. Meski demikian staf siaran di Jakarta tidak kehilangan akal dan mereka sudah mengantisipasi-nya sehingga siaran masih berlanjut dari tempat lain dengan menggunakan pemancar yang bisa dipindah-pindahkan dengan *call station* : “Radio Indonesia Merdeka” (Wild, *Op.cit.*).

Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa hal penting yang dapat disarikan mengenai keberadaan radio siaran di Yogyakarta pada zaman Jepang. Pertama, Jepang menganggap bahwa radio merupakan media komunikasi yang sangat strategis untuk menopang kekuasaannya. Oleh karena itu dibuatlah kebijakan untuk mengendalikan siaran radio agar sesuai dengan kepentingan tentara pendudukan Jepang melalui berbagai mekanisme, seperti pembatasan gelombang penerimaan, wajib *relay* siaran dari Tokyo, dan keterlibatan orang Jepang dalam manajemen siaran. Kedua, siaran radio dianggap memiliki pengaruh sosial budaya yang tinggi sehingga tentara pendudukan Jepang menerapkan kebijakan de-Eropanisasi konten siaran. Semua materi siaran yang berbau barat seperti lagu, musik, dan bahasa pengantar siaran dilarang disiarkan

oleh Hosokyo. Sebaliknya, mereka harus menyiarkan lagu-lagu Jepang untuk memenuhi kebutuhan tentara yang ada di Indonesia. Para pegawai Hosokyo dipaksa untuk memproduksi sendiri materi siaran yang berbasis budaya lokal sehingga melahirkan seniman-seniman baru. Ketiga, pola manajemen siaran Hosokyo dengan melibatkan dua pihak sekaligus, yaitu wakil dari Jepang dan Indonesia untuk setiap jabatan, pada satu sisi merupakan mekanisme kontrol atau pengendalian. Namun, pada sisi lain hal itu merupakan rahmat tersembunyi (*blessing indiguis*) karena secara tidak langsung justru menjadi medium pembelajaran bagi orang Indonesia mengenai manajemen siaran radio. Dengan kata lain, semasa pendudukan Jepang para *broadcaster* Indonesia mengalami proses transpormasi pengetahuan dan ketrampilan yang semua itu menjadi modal penting di kemudian hari ketika para mantan pegawai Hosokyo membentuk RRI (Wiryan, *opcit.*).

Membidani Lahirnya RRI

Beberapa waktu setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi kevakuman siaran radio secara nasional. Jaringan siaran yang semula diorganisasi melalui Hosokyo sudah tidak ada lagi karena dibubarkan oleh tentara pendudukan Jepang. Para pemimpin nasional sendiri tampak tidak terlalu menaruh perhatian terhadap nasib radio siaran meskipun sebenarnya mereka sangat membutuhkan

media massa untuk mendukung konsolidasi kaum pergerakan dan membangun integrasi nasional.

Semangat proklamasi Kemerdekaan RI mendorong warga masyarakat Indonesia yang terdidik merasa terpenggil untuk mempertahankan kemerdekaan. Demikian halnya dengan para mantan pegawai Hosokawa yang berjiwa nasionalis telah memperhitungkan kemungkinan akan kembalinya kekuasaan Belanda ke Indonesia. Untuk itu perlu segera dibentuk organisasi siaran radio berkala nasional dengan cara menguasai semua pemancar di 8 stasiun radio di Jawa yang semula bernama Hosokawa. Guna merealisasikan keinginan itu maka diadakan pertemuan dan diharapkan bisa diikuti oleh wakil-wakil dari 8 stasiun bekas Hosokawa, yaitu Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang.

Prakarsa untuk melakukan pertemuan itu datang dari mantan pimpinan Hosokawa Yogyakarta, Solo, dan Semarang (JOGLOSEMAR). Mengapa inisiatornya justru poros segi tiga JOGLOSEMAR, bukan Jakarta? Hal itu tentu tidak lepas dari proses sebelumnya seperti telah dijelaskan di muka bahwa poros JOGLOSEMAR sudah menjalin kerjasama sejak masa radio ketimuran sampai dengan zaman Jepang. Dalam kerjasama yang melibatkan poros JOGLOSEMAR itu tampak bahwa Yogyakarta lah yang menjadi episentrum. Pendapat itu didasarkan pada fakta bahwa baik ketika masih merupakan radio ketimuran maupun setelah menjadi Hosokawa,

pimpinan radio di Solo yang justru sering datang ke Yogyakarta. Dalam perspektif budaya Jawa, pihak yang datang menandakan sebagai pihak yang lebih membutuhkan atau karena faktor penghormatan terhadap pihak yang didatangi.

Bukti lain yang menguatkan anggapan bahwa Yogyakarta merupakan episentrum dari poros JOGLOSEMAR adalah ketika muncul konflik terkait rencana pengambilalihan penyelenggaraan siaran ketimuran oleh NIROM. Problem terberat yang dihadapi oleh NIROM adalah mengambil hati pihak MAVRO yang tetap *kekuat* pada pendiriannya untuk mempertahankan jati diri sebagai penyelenggara siaran ketimuran. Sikap bertahan itu akhirnya diikuti oleh radio-radio ketimuran lainnya sehingga MAVRO berhasil memaksa NIROM membayar *f.* 800,- per bulan untuk bisa menyiarkan acara-acara ketimuran. Di sisi lain pihak NIROM tidak mengalami hambatan untuk memperoleh bahan siaran ketimuran dari Surakarta sebab selain melalui SRV, mereka bisa mendapatkan program ketimuran dari SRI (Siaran Radio Indonesia) yang tidak tergabung di dalam radio ketimuran (Kemenpen, *Ibid.*).

Seandainya tidak ada poros JOGLOSEMAR, mungkin saja pertemuan 11 September 1945 yang melahirkan Radio Republik Indonesia (RRI) tidak akan pernah terwujud. Argumentasinya, pertemuan 11 September diikuti oleh enam perwakilan dari 8 Hoso Kyoku yang ada di Indonesia. Keenam pihak yang hadir, yaitu wakil dari Jakarta, JOGLOSEMAR,

Bandung, dan Purwokerto. Adapun utusan dari Surabaya dan Malang sampai dengan akhir acara ternyata tidak bisa datang ke Jakarta. Dari enam utusan itu, tiga wilayah sebagai inisiator, sedangkan Bandung dan Purwokerto datang atas undangan dari pihak Yogyakarta. Sesuai dengan kesepakatan pihak inisiator, undangan untuk utusan dari Surabaya dan Malang diserahkan kepada pihak Solo. Berdasarkan paparan data seperti itu jelaslah bahwa Yogyakarta memegang peran penting dalam membidani lahirnya RRI, meskipun proses kelahiran itu berlangsung di Jakarta dan yang terpilih menjadi pemimpin bukanlah utusan dari Yogyakarta.

Pertemuan para delegasi radio pada tanggal 11 September 1945 yang sering disebut sebagai Konferensi Radio I dimulai pukul 24.00 WIB bertempat di rumah Adang Kadarusman di Menteng Dalam, Jakarta dipimpin oleh Dr. Abdulrahman Saleh. Delegasi dari 6 stasiun yang hadir, yaitu Adang Kadarusman, Soeriodipoero, Caca, Jusuf Ronodipoero, Soekasmo, Sjawal Muchtaruddin (Jakarta); Darya Sakti Iamsyah dan Agus Marah Sutan (Bandung); Soetaryo (Purwokerto); RM Soemarmadi dan Soedomomarto (Yogyakarta); Soehardi dan Harto (Semarang), serta Maladi dan Soetardi Hardjoloekito (Surakarta).

Hasil pertemuan dapat dipilah menjadi tiga kelompok permasalahan, yaitu aspek idiil, struktur dan program perjuangan. Aspek idiil mencakup landasan/dasar, tujuan, norma dan moral siaran, dan

semboyan. RRI didirikan dengan berlandaskan pada semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan tujuan: (1). Menjadikan radio sebagai alat perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk membela dan menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan Negara pada khususnya, menggalang persatuan dan kesatuan nasional dan membangun cita-cita kemerdekaan pada umumnya; (2) menjadikan radio sebagai alat komunikasi antara Pemerintah dengan rakyat dan antara rakyat dengan rakyat; dan (3) pembinaan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun norma dan moral siaran yang ditetapkan, yaitu bahwa tiap pegawai RRI harus yakin dan setia kepada perjuangan RRI, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan aliran dalam membina penyiaran radio. Sedangkan semboynannya adalah dalam keadaan apa pun, siaran RRI tidak boleh lenyap dari udara (Abidin, 1985).

Selanjutnya mengenai aspek struktural, secara organisatoris RRI adalah Badan Nasional Penyiaran Radio yang bersifat persatuan, dengan Jakarta sebagai kantor pusat sementara, dan studio-studio di daerah sebagai cabang-cabangnya yang bertanggung jawab penuh atas segala penyiaran di masing-masing lokasi. Ini berarti merujuk pada sistem jaringan dalam Mengenai status kelembagaan, selama belum ditetapkan oleh pemerintah, RRI merupakan satu unit yang tidak bisa dipisahkan.

Adapun mengenai aspek program perjuangan, ada tiga butir yang berhasil dirumuskan dalam pertemuan tersebut, yaitu: (1). Penguasaan pemancar dan alat-alat radio dari tangan Jepang dengan cara apa pun; (2) mempersiapkan pemancar-pemancar gerilya mobil untuk menjamin kelangsungan siaran RRI dalam keadaan apa pun; (3) ke dalam, mengobarkan semangat kemerdekaan dan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 kepada seluruh rakyat. Ke luar, menyebarkan ke seluruh dunia tentang cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia yang sudah merdeka (*Ibid.*)

Selain rumusan tersebut di atas, Konferensi Radio I berhasil menyusun Piagam 11 September 1945 yang berisikan tiga butir pernyataan janji setia yang lebih dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Setiap peringatan Hari Radio tanggal 11 September teks Tri Prasetya RRI senantiasa dibacakan. Adapun rumusan Tri Prasetya RRI selengkapnya sebagai berikut (Sumarno, dkk, 1981).

- 1). Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapa pun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan Negara kita. Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimana pun dan dengan akibat apa pun juga.
- 2). Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat Revolusi seluruh bangsa Indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada Tanah Air dan

Bangsa.

- 3). Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan Persatuan Bangsa dan keselamatan Negara, serta berpegangan pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Bagi utusan dari Yogyakarta implementasi atau penerapan hasil konferensi radio I ternyata tidak mudah. Peralatan radio yang sebelumnya dipakai oleh Hosokiyoku terlanjur dikuasai oleh sisa-sisa tentara Jepang yang masih berada di Yogyakarta. Pengambilalihan peralatan radio baru dapat terlaksana tanggal 1 Oktober 1945 melalui perundingan yang alot antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Soemarmadi, Soedomomarto, Soedarso WK, Soenarjo, Hardjono dan Dwijono; dengan pihak Jepang diwakili oleh Kato, Kawamura dan Funayama (Kemenpen. *Op.cit.*).

Setelah berhasil merebut peralatan radio dari Jepang, para mantan pegawai Hosokiyoku Yogyakarta segera menyelenggarakan siaran dengan sebutan resmi, "*Radio Republik Indonesia (RRI)*". Para angkasawan RRI Yogyakarta mengambil langkah-langkah strategis mengingat pada saat mereka memulai siaran pertama suhu politik nasional sudah memanas. Untuk memenuhi materi siaran hiburan para seniman-seniwati yang dulu mengisi Hosokiyoku diminta bantuannya untuk tetap siaran di RRI, tetapi tidak mendapat imbalan mengingat RRI sendiri belum mempunyai anggaran.

Era Perang Kemerdekaan

Pasca terbentuknya RRI, para *broadcaster* segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan terjadinya pendudukan kembali atas Indonesia oleh Belanda. Sebagaimana tersiar sebelumnya bahwa rencana itu sudah dipersiapkan sejak April 1944 dan melalui dua tahap. Pertama, pasukan Sekutu yang diwakili Inggris akan masuk ke Indonesia untuk melakukan apa yang menurut mereka disebut sebagai pemulihan keamanan dan ketertiban (*law and order*). *Kedua*, setelah keadaan normal pejabat-pejabat NICA akan datang mengambil alih tanggung jawab dari pihak Inggris. Berita tersebut diyakini benar karena adanya kesatuan pasukan Inggris di bawah komando Laksamana Patterson yang mendarat di Jakarta (Tanjung Priok) tanggal 16 September 1945 yang kemudian diikuti oleh kedatangan tentara Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Hawthorn selaku kepala divisi (Moedjanto, *Op.cit.*, hlm. 96-99).

Upaya pendudukan Indonesia oleh tentara Sekutu mengundang reaksi keras Bangsa Indonesia yang segera bersiap melakukan gerakan perlawanan. Pada tanggal 13 Oktober 1945 di Surabaya terbentuk Badan Pemberontakan Indonesia (BPRI) yang dipimpin oleh Sutomo (Bung Tomo). Bung Tomo segera mendirikan Radio Pemberontakan guna membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap Sekutu. Bung Tomo yang disebut-sebut sebagai ahli pidato revolusioner sebanding dengan Bung Karno melalui siaran-siaranya berhasil

menciptakan situasi emosional yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan di Surabaya dan pecahnya pertempuran sengit tentara Inggris dan pemuda Indonesia (Hadisoekanto, 1995).

Menurut saksi sejarah, Hadisoekanto dan Soegito, RRI sering *merelay* pidato-pidato Bung Tomo. Akibatnya studio RRI Yogyakarta yang berada di gedung NILMY pada tanggal 25 Nopember dijatuhi bom oleh tentara Inggris sebanyak dua kali karena RRI Yogyakarta dianggap sebagai pusat ekstrimis (Darmanto, 1995 dan Sumarno, 1985). Sri Sultan Hamengku Buwono IX beserta Paku Alam VII berkenan meninjau tempat bekas dijatuhinya bom dan memerintahkan agar peralatan yang ada segera diungsikan ke kraton dan ke tempat lain yang dinilai aman (Atmakusumah, 1982: 68). Namun, oleh pegawai RRI hanya sebagian saja dari peralatan tersebut yang diungsikan ke kraton Kasultanan dan Paku Alam, selebihnya diungsikan ke Ngadinegaran yang letaknya di sebelah selatan Plengkung Gading. Atas jasa Abdulrahman Saleh atau Pak Karbol, RRI dapat segera mengudara lagi. Meskipun pernah dibom, tetapi semangat juang para angkasawan RRI tidak pernah padam dan tetap *merelay* siaran pidato-pidato Bung Tomo (Darmanto, *opcit.*).

Setelah mengalami masa “pengungsian” di Ngadinegaran, studio RRI Yogyakarta kemudian pindah ke Secodiningrat No. 6, 8 dan 10 menempati gedung bekas tempat tinggal para opsir di zaman kolonial Belanda. Lokasinya masih satu deret dengan

Gedung NILMY, tepatnya di sebelah timur Kantor Pos Besar dan kini (2012) di atas tanah tersebut didirikan gedung Bank Indonesia.

Pada tanggal 4 Januari 1946 Ibukota RI pindah ke Yogyakarta. Perpindahan ibu kota Negara secara otomatis berpengaruh terhadap status RRI Yogyakarta yang sebelumnya hanya stasiun daerah berubah menjadi stasiun pusat sehingga siaran-siarannya *direlay* secara nasional. Selain siaran untuk dalam negeri, RRI Yogyakarta yang berada di ibukota Negara juga menyelenggarakan siaran luar negeri yang pelaksanaannya ditangani oleh *Indonesia Broadcasting Center (IBC)* dengan julukan populernya *Voice of Free Indonesia*. Siaran luar negeri dipancarkan dengan gelombang 27 meter menggunakan pemancar YHN berkekuatan 3000 watt, mulai pukul 18.30 – 02.30 WIB dengan antene yang diarahkan ke wilayah-wilayah yang dituju. Siaran luar negeri menggunakan tujuh macam bahasa asing dengan sasaran yang berbeda-beda. Bahasa Inggris ditujukan ke Australia, Selandia Baru, Malaysia, India, Pakistan, Birma, Pantai Barat Amerika Serikat, serta Eropa seluruhnya. Bahasa mandarin ditujukan ke RRC, Malaysia, Singapura, dan Honkong. Bahasa Arab ditujukan ke Asia tenggara, Malaysia, Afrika Tengah, Afrika Utara dan Asia Dekat. Bahasa Urdu dipakai untuk tujuan wilayah India, Pakistan, dan Malaysia. Bahasa Hindi ditujukan ke India dan Malaysia. Bahasa Perancis diarahkan ke Vietnam, Laos, Kamboja dan Asia Tengah. Sedangkan Bahasa Belanda ditujukan untuk Eropa saja (Soegito, 1995).

Pada 19 Desember 1948 terjadi serangan atas kota Yogyakarta untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh tentara Belanda. Studio RRI yang berada di Secodiningratan menjadi sasaran penyerbuan sehubungan dengan keberadaannya yang vital sebagai pusat penyelenggaraan siaran nasional dan luar negeri. Akan tetapi sebelum terjadi penyerangan atas kantor dan studio yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB, RRI Yogyakarta sempat menyiarkan tiga acara penting, yaitu:

- 1). Pengumuman Pemerintah, berisi seruan agar Bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan dengan menggagalkan maksud keji Belanda yang akan memaksakan kembali kekuasaannya.
- 2). Amanat PJM Presiden RI Sukarno, berisi ajakan kepada masyarakat untuk mempertahankan tanah air dan kemerdekaan.
- 3). Amanat PJM Wakil Presiden Mohammad Hatta, berisikan penegasan bahwa perjuangan Bangsa Indonesia adalah untuk kemerdekaan sehingga kita tidak boleh putus asa sebelum kemerdekaan tercapai (Maladi, op.cit.).

Selain ketiga acara tersebut sekitar pukul 08.00 WIB, RRI juga menyiarkan Perintah Kilat No. 1/PB/D/ 1948 dari Panglim Besar Jenderal Sudirman yang dibacakan oleh Kapten Suparjo (Tarjo, 1984: 23, dan Eryono, 1985:246-247). Perintah Kilat tersebut disiarkan melalui program dalam dan luar negeri.

Setelah kantor dan studio dijatuhi bom oleh Belanda, RRI segera menghentikan siarannya. Pegawai-pegawainya berpecah untuk menjalankan strategi gerilnya yang disusun sebelumnya. Sebagian peralatan siaran yang ada dibawa ke daerah Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan sebagian kecil ada yang ditinggal di dalam kota. Sedangkan berkas-berkas yang ada terpaksa dibakar untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Selama masa gerilya para pegawai RRI terus berusaha melakukan siaran darurat bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain, TNI dan dinas Perhubungan Udara (PTT). Berkat jasa Letkol. Latief, pegawai RRI yang terpecah dapat disatukan kembali dan diperbolehkan menggunakan semua alat radio untuk meneruskan perjuangannya. Namun, hal yang paling mungkin dilakukan pada saat itu hanya memonitor siaran-siaran berita dari berbagai radio luar negeri dan hasilnya diperbanyak dalam bentuk buletin³ halaman dengan menggunakan kertas merang dan disebarluaskan melalui para pimpinan gerilnya. Buletin tersebut diberi nama “Berita Gerilya” dan terbit untuk pertama kali di Wonosari, Gunungkidul pada 22 Januari 1949. Akan tetapi pada pertengahan Februari kegiatan penerbitan berhenti disebabkan Wonosari diserang oleh Belanda. Satu setengah bulan berikutnya penerbitan kembali muncul dari markas gerilya di desa Srunggo yang letaknya dekat gua Cermin di wilayah Kecamatan Imogiri, Bantul dengan nama “Warta Berita” Jurnalis RRI yang berjasa bagi

penerbitan bulletin “Warta Berita” antara lain Thomas Soegito, Mawardi, Karyono, Suroso dan juru ketik Atmareja (Soegito, 1995).

Setelah terjadi Serangan Umum 1 Maret 1949 atau peristiwa 6 jam di Jogja, Komandan Wehrkreise III Letkol Soeharto (Presiden RI 1966 – 1998) mengeluarkan perintah kepada Kapten Purwadi agar menyiapkan pemancar RRI di wilayah Jogja selatan guna memberikan penerangan kepada masyarakat luas tentang perjuangan Bangsa Indonesia melawan Belanda. Namun, upaya mewujudkan stasiun radio pemancar belum sampai terlaksana Yogyakarta sudah kembali ke pangkuan Republik Indonesia pada 29 Juni 1949. Berkenaan dengan itu para pejuang RRI juga kembali ke kota setelah lebih dari 6 bulan bergerilya dan tidak melakukan siaran. Sayang, tidak ada keterangan pasti yang menjelaskan kapan RRI Yogyakarta mengudara kembali setelah selesainya bergerilya tahun 1949.

Selama masa perang kemerdekaan, posisi RRI Yogyakarta sangat strategis. Dengan dijadikannya Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan RI otomatis RRI setempat berfungsi sebagai RRI Pusat yang sebelumnya dipegang oleh Jakarta. Konsekuensinya, RRI Yogyakarta selain harus memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat lokal, dan nasional juga harus menyelenggarakan siaran internasional. Tugas itu tentu tidak mudah mengingat kondisi sosial politik masih diliputi oleh suasana perang untuk mempertahankan kemerdekaan.

Sehubungan dengan membaiknya keamanan nasional maka pusat pemerintahan yang sempat pindah ke Yogyakarta segera diboyong kembali ke Jakarta. Secara otomatis hal itu berpengaruh terhadap status RRI Yogyakarta sehingga kembali menjadi stasiun daerah seperti waktu sebelum ibukota pindah ke Yogyakarta. Dalam perkembangannya, kantor Tata Usaha dan Studio RRI Yogyakarta yang semula terletak di Secodiningratan (sekarang Jl. P.Senopati), pada tahun 1958 pindah ke Kotabaru (kini Jalan Amat Jazuli No. 4 Yogyakarta). Tanah di Kotabaru semula milik Dr. Yap, tetapi kemudian dibeli oleh RRI tahun 1952 ketika kepala stasiunnya pada waktu itu dijabat oleh RCS Hadisoekanto.

Namun, rupanya sudah menjadi takdir sejarah bahwa RRI Yogyakarta senantiasa berada pada posisi di depan dalam mengukir sejarah. Hal itu terbukti, ketika tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno menggelar pidato untuk membebaskan Irian Barat ternyata memilih lokasi di Alun-alun Utara Yogyakarta. (Moedjanto, op.cit. dan Djoened, op.cit.). Dengan sendirinya, RRI Yogyakarta terlibat aktif dalam menyebarluaskan pidato kenegaraan yang sangat bersejarah tersebut.

Selain momen-momen politik, RRI Yogyakarta memainkan peran penting dalam pembangunan kebudayaan dalam arti luas. Sejak 16 Desember 1945 RRI Yogyakarta mempunyai acara yang sangat populer, yaitu *Obrolan Pak Besut*. Acara ini berupa obrolan monolog dengan karakterisasi tokoh yang

sangat khas, dan isinya cenderung kritikal, tetapi sangat digemari masyarakat (Koesoemanto dan Koesworo, 1983). Masih terkait dengan acara program yang bertujuan mencerdaskan, pada 1946 RRI Yogyakarta mulai menyelenggarakan acara siaran universitaria, sebuah program pendidikan yang berkredo, "*dari, oleh, dan untuk*" mahasiswa. Acara itu hingga kini masih berlangsung dan kemudian diikuti oleh RRI lain di wilayah Indonesia. RRI Yogyakarta juga berhasil mempertahankan acara siaran kethoprak yang sudah berlangsung sejak zaman MAVRO tahun 1934. Selain itu, pada tahun 1958 RRI bekerjasama dengan Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit sebulan sekali di SitiHinggil Dwi Abad Alun-alun Selatan yang kemudian menjadi referensi utama bagi pengembangan seni pedalangan di Yogyakarta (Darmanto, 1998). Pertunjukan wayang kulit tersebut hingga kini masih eksis berlangsung setiap Sabtu malam Minggu kedua. Begitu juga acara Sandiwara Daerah yang dipelopori oleh Sumardjono, pernah menjadi pusat perhatian masyarakat Yogyakarta karena dianggap memiliki nilai sastra yang tinggi (Mardianto dan Darmanto, 2001).

RRI Yogyakarta di Era Orde Baru

Posisi RRI Yogyakarta selama masa pemerintahan Orde Baru bagaikan tiarap, tidak memiliki ruang gerak yang leluasa dan hanya menjadi skrup kecil dari kekuasaan politik otoriter. Berdasarkan Keputusan

Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974 dan Surat Keputusan Menteri Penerangan (SK Menpen) Nomor 55B tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen Penerangan; keberadaan RRI Yogyakarta hanyalah sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film yang berkedudukan di ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan kedudukan sebagai UPT, posisi RRI di seluruh Indonesia tidak lebih hanya menjadi corong pemerintah, alat propaganda, dan instrumen kekuasaan dalam memanipulasi kesadaran publik. Kondisi seperti itu adalah *given*, siapa pun yang memimpin RRI harus tunduk pada kekuasaan Orde Baru yang otoriter. Akibatnya, RRI menjadi kurang disukai oleh banyak kalangan, terutama masyarakat yang terdidik dan kelompok kritis karena program-program siaran RRI cenderung monoton, menggurui, dan *top down*. Makin hari, munculnya perasaan tidak senang terhadap RRI bertambah besar, apalagi setelah pilihan media makin beragam. Perasaan tidak suka terhadap RRI terutama terjadi pada kelompok anak-anak, remaja, dan kalangan pemuda.

RRI Yogyakarta Pascaruntuhnya Orde Baru

Gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan kekuasaan otoriter Soeharto memiliki pengaruh signifikan terhadap keberadaan RRI. Menteri Penerangan di

era Kabinet Reformasi Muhammad Yunus Yosfiah dengan cepat merespon perkembangan politik dalam negeri yang berkembang pesat sejak tumbangnya rezim Soeharto pada Mei 1998. Melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 143 Tahun 1998 wajib *relay* siaran berita RRI yang semula berlangsung sebanyak 18 kali perhari dipangkas menjadi 3 kali (Abdidin Ass, 2000). Bahkan ketika radio-radio swasta banyak yang tidak mematuhi kebijakan tersebut juga tidak ada penindakan apa pun.

Pasca Mei 1998, RRI Yogyakarta (dialami juga oleh RRI lain) menjadi sasaran demonstrasi dari berbagai kelompok prodemokrasi. Sayang saya tidak sempat melakukan pencatatan atas peristiwa itu, tetapi sebagai pegawai RRI Yogyakarta saya sering menyaksikan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok. Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi dan minta disiarkan langsung oleh RRI. Kalau ada aksi-aksi seperti itu yang menangani adalah bagian pemberitaan dan biasanya terjadi negosiasi antara pihak RRI dengan kelompok demonstran. Tuntutan pihak demonstran biasanya ingin agar seluruh teks yang sudah dibuat dapat disiarkan penuh, sementara pihak RRI tetap harus ada seleksi agar tidak menimbulkan masalah baru. Sejauh yang saya ketahui, biasanya pihak demonstran mau mematuhi ketentuan dari pihak RRI. Kehadiran para demonstran untuk menyampaikan aspirasinya melalui corong RRI pada satu pihak menggambarkan bahwa dalam situasi genting dan penuh perubahan, media

radio selalu dipandang strategis dan karenanya harus dikuasai. Namun, pada sisi lain kenyataan itu juga menunjukkan telah terjadinya revolusi besar-besaran dalam konten siaran RRI. Media yang semula identik dengan suara pemerintah, tiba-tiba harus mengubah haluan dan menyiarkan aspirasi dari kelompok-kelompok penentang pemerintah. Beruntung pada waktu itu lembaga-lembaga sensor seperti di era Orde Baru tidak menjalankan fungsinya sehingga tidak satu pun orang RRI Yogyakarta yang terkena teguran karena menyiarkan aksi-aksi demo, dan memberi ruang kepada para demontran untuk menyampaikan aspirasinya melalui siaran.

Roda perubahan di tubuh RRI seolah berputar semakin kencang dengan dibubarkannya Departemen Penerangan (Deppen) pada masa awal pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), tepatnya pada Oktober 1999. Bagi Pegawai Deppen pada umumnya pembubaran itu relatif tidak masalah karena mereka *toch* bisa masuk ke departemen lain. Namun, bagi RRI dan TVRI pembubaran Deppen tentu menimbulkan masalah baru yang sangat serius karena pada satu sisi mereka tetap harus menjalankan siaran, tetapi pada sisi lain telah kehilangan induk organisasi.

Menghadapi kenyataan seperti itu, Direktur Radio Suryanta Saleh pada tanggal 4 November 1999 memimpin rapat koordinasi para Kepala RRI seluruh Indonesia di Jakarta. Keputusan rapat mengajukan tiga alternatif bagi kelembagaan baru RRI, yaitu: (1) RRI

menjadi UPT di bawah Departemen Perhubungan, (2) menjadi Perusahaan Milik Negara dengan status Perum, dan (3) menjadi Lembaga Penyiaran non Departemen. Namun, setelah melewati berbagai proses panjang, pada tanggal 18 Nopember 1999 akhirnya usulan dari Kementerian Penertiban Aparatur Negara (Kemenpan) agar RRI/TVRI berstatus Perusahaan Jawatan (Perjan) dapat diterima sehingga keluarlah Keputusan Presiden tentang Pembentukan Perjan RRI dan TVRI pada awal tahun 2000 (Abidin, 2000, *opcit.*).

Pada masa-masa transisi dari era Orde Baru menuju era Reformasi, lagi-lagi RRI Yogyakarta menunjukkan perannya yang sangat besar. Bahkan, jika tanpa peran aktif dari RRI Yogyakarta mungkin sejarah perjalanan radio publik di Indonesia tidak secepat ini. Peran serta itu tidak datang begitu saja. Beberapa orang yang masuk kelompok kritis telah melakukan kegiatan diskusi topikal sejak pertengahan 1995, bahkan oleh Pimpinan RRI setempat pernah dilarang untuk digelar di dalam kantor RRI padahal tema yang diangkat waktu itu sama sekali bukan persoalan politik praktis, yaitu urgensi humas bagi RRI. Penulis sebagai inisiator diskusi sama sekali tidak diberitahu alasan pelarangan, tahu-tahu sudah muncul nota dinas yang melarang diskusi tersebut diselenggarakan. Oleh karena itu, kegiatan diskusi selanjutnya kami gelar di luar, salah satunya di rumah mantan Direktur Radio Thomas Sugito ketika membahas tentang Tri Prasetya RRI. Kegiatan itu kami gelar pada pertengahan tahun

1995 dengan diikuti oleh beberapa orang saja yang memiliki keberanian melawan arus. Sebab pada tahun itu, Orde Baru sedang berada di titik puncak dan sangat jarang seorang PNS berani melakukan aktivitas yang tidak direstui pimpinan.

Namun, berkat rangkaian diskusi yang digelar secara sembunyi-sembunyi itulah yang membekali RRI Yogyakarta untuk bisa tampil di depan dalam menggelontorkan id-ide menuju perubahan RRI di masa depan. Pada tanggal 3-4 September 1998 di Gedung PPPG Jl.Kaliurang digelar diskusi bertajuk “*Reorientasi Visi RRI*” yang melibatkan angkasawan, angkasawati utusan dari seluruh RRI sewilayah Jawa, Bali, dan NTB. Padahal awalnya, tema yang disodorkan oleh pihak Direktorat Radio via Kabul Budiono bukan itu, tetapi karena Tim Yogya memandang pentingnya untuk melakukan reorientasi visi RRI di tengah arus reformasi maka akhirnya bisa diterima. Tidak diduga bahwa diskusi tersebut akhirnya menjadi titik awal bagi perjuangan untuk mewujudkan RRI sebagai radio publik. Sebab setelah itu, tema yang sama kemudian diangkat menjadi isu nasional.

Pertengahan tahun 1999 ketika masih di bawah naungan Deppen, RRI Yogyakarta memulai penyusunan pedoman penyelenggaraan Siaran Produa yang berorientasi pada kepentingan publik. Direktur Penyiaran Perjan RRI Beni Koesbani dalam beberapa kesempatan bertemu dengan *broadcaster* RRI Yogyakarta mengatakan bahwa pedoman penyiaran yang telah disusun di Yogya akan dijadikan model untuk tingkat

nasional. Apa yang dikatakan oleh Koesbani akhirnya dipenuhi, RRI akhirnya merumuskan pedoman penyiaran untuk skala nasional.

Di samping itu serangkaian kegiatan seperti perumusan standar program siaran, kode etik, dan sebagainya mulai dilakukan pula di Yogyakarta dengan melibatkan utusan dari RRI di seluruh Jawa, Bali, dan NTB. Pada tahun 2000 di Yogyakarta digelar kembali diskusi bagi angkasawan muda RRI untuk mendorong terwujudnya radio publik. Pada akhir diskusi muncul pernyataan sikap bersama untuk menolak kehadiran Direktorat Jenderal Penyiaran yang dibentuk oleh Departemen Perhubungan di bawah kepemimpinan Agum Gumelar, dan kemudian mempercepat terbitnya PP No. 37 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan RRI (Darmanto, 2004).

Berkat inisiatif dari Yogyakarta juga yang membuat RRI memperoleh pengakuan secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Draf awal yang disusun oleh DPR RI sama sekali tidak mencantumkan nama RRI/TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Akan tetapi, RRI Yogyakarta kemudian mengajukan proposal untuk menyelenggarakan diskusi menyusun masukan untuk undang-undang penyiaran yang baru. Pada level pimpinan RRI waktu itu menyarankan agar kami menggunakan istilah “perubahan” UU No.24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, bukan “mengganti”. Permintaan itu diakomodir dalam surat undangan dan *backdrop*, tetapi hasil akhirnya ditentukan oleh

tim perumus, yang terdiri oleh Kabul Budiono dan Darmanto. Hasil rumusan di Wisma LPP Yogyakarta itulah yang di kemudian hari saya ketahui dikatakan sebagai hasil Rakorsus (Rapat Koordinasi Khusus) para pimpinan RRI seluruh Indonesia di Ciloto dan menjadi masukan resmi pihak RRI ke DPR RI.

Setelah masukan dari RRI resmi diterima oleh DPR RI, ternyata tidak dikawal terus. Menjelang detik-detik pengesahan RUU menjadi UU Penyiaran, barulah masukan tersebut memperoleh pengawalan berkat pertemuan mantan penyiar RRI yang juga alumni FISIPOL UGM R. Niken Widiastuti dengan teman kuliahnya yang tengah menjabat anggota DPR RI di Komisi I dan menjadi Panitia Khusus RUU Penyiaran, Djoko Susilo. Setelah pertemuan keduanya, masukan yang sudah lama sampai di DPR RI kemudian ditindaklanjuti dan diakomodir sehingga muncullah pasal dalam UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Publik adalah RRI dan TVRI (Pasal 14 ayat (2) UU Penyiaran).

Dari paparan singkat tersebut tampak jelas peran RRI Yogyakarta dalam masa transisi dari era Orde Baru menuju terwujudnya radio publik. Polanya sama persis seperti pada masa awal lahirnya RRI, bahwa poros Yogyakarta memegang kunci sebagai inisiator berbagai pertemuan yang menggodok konsep perubahan RRI di masa depan, tetapi tanpa dukungan Jakarta sebagai fasilitator maka semua kegiatan di poros Yogya tidak

akan terealisasi. Tanpa bermaksud mengkultuskan, tetapi perlu diketahui oleh generasi mendatang bahwa dalam konteks masa perubahan, peran Kabul Budiono yang pada waktu itu menjabat sekretaris Direktorat RRI sangat sentral. Dialah yang menjadi mediator antara kekuatan di Yogya dengan pimpinan RRI di Jakarta dan sekaligus *play maker* yang menjadikan berpadunya kedua poros itu mampu mendorong lahirnya *teamwork* RRI secara nasional solid dalam memperjuangkan terwujudnya radio publik.

Deskripsi tentang peran-peran menonjol yang dimainkan oleh RRI Yogyakarta dalam sejumlah episode yang telah dipaparkan di atas kiranya menjadi motivasi tersendiri bagi generasi penerus untuk tetap menjaga spirit perjuangan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan kota perjuangan memang kaya nilai dan menjadi sumber siaran yang tidak akan habis-habisnya untuk digali. Untuk itu *broadcaster* RRI Yogyakarta dituntut untuk mengikuti teladan para pendahulu yang senantiasa memiliki inisiatif untuk menciptakan perubahan.

Radio dan Politik Kebangsaan

*Djoko Suryo**

Pembentuk Karakter Bangsa



RRI, Media Sentral Era Revolusi Kemerdekaan

Berbicara tentang Radio Republik Indonesia (RRI), Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Djoko Suryo memiliki cerita tersendiri. Bisa dibilang ia cukup menggandrungi radio ini ketika usianya masih muda. Acara-acara seperti drama dan teater bertemakan perjuangan begitu mengakar kuat dalam ingatannya meski usianya sudah 71 tahun.

* Sejarawan UGM, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

“Kala itu ketika RRI sudah menyiarkan acara-acara hiburan, semua orang segera menyelesaikan pekerjaannya dan duduk di dekat radio,”katanya mengenang.

Sebelum ia bercerita lebih lanjut tentang acara-acara fenomenal di RRI, Djoko Suryo pun mengingatkan kembali tentang peranan RRI waktu itu. Berdasarkan perspektif sejarah, RRI didirikan pada zaman revolusi kemerdekaan usai Indonesia merebut kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang satu bulan tepatnya tanggal 11 September 1945, RRI didirikan oleh pemerintah dan berada di bawah naungan Departemen Penerangan.

Djoko mengatakan fungsi RRI saat itu adalah sebagai media komunikasi antara pemerintah dan rakyat dalam memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas negara. Misalnya informasi tentang kedudukan pemerintah RI dalam mempertahankan kemerdekaan dimana waktu Indonesia masih dibayangi Belanda yang ingin menjajah kembali, informasi mengenai kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang,serta hal yang berhubungan dengan cara pemerintah membina hubungan dengan rakyat.

Pemilihan radio, kata Djoko, karena radio kala itu sudah akrab di telinga masyarakat. Radio mulai berkembang sejak Jepang menduduki Indonesia (1942-1945). Meski sebelumnya Belanda sudah menggunakan radio juga di Indonesia, namun rakyat masih asing. Waktu penjajahan Jepang-lah, radio mulai

difungsikan Jepang sebagai alat komunikasi mereka untuk menggalang dukungan dari rakyat Indonesia.

“Saat kemerdekaan pun, Soekarno Hatta membacakan teks proklamasi lewat radio. Untuk itulah, RRI dinilai sebagai media tepat untuk menjembatani komunikasi pemerintah dan rakyat. Rakyat adalah salah satu aktor yang turut berpartisipasi dalam menjaga kemerdekaan Indonesia, sehingga pemerintah perlu menggalang semangat mereka bersama,”kata Guru Besar Ilmu Budaya ini.

Dalam rangka menggalang semangat rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, RRI pun berkomitmen untuk menyiarkan program-program yang substansinya lebih pada membakar semangat nasionalisme, patriotisme, serta nilai-nilai kebangsaan. Bahkan, pemimpin-pemimpin negeri kala itu selalu menggunakan RRI untuk menyampaikan pidatonya. Ia mencontohkan, Presiden Soekarno selalu berpidato saat tanggal 17 Agustus 1945. Hal serupa juga dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Yogyakarta untuk menyampaikan amanat pasca kemerdekaan dengan bahasa Jawa.

“Waktu itu isi pidatonya selalu membakar semangat rakyat. Tak bisa dipungkiri bahwa waktu itu rakyat memang memiliki semangat tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka, apa saja yang disampaikan oleh pemimpin negeri waktu itu akan diikuti oleh rakyat,”kata Djoko Suryo.

Membangun Karakter Bangsa

Bisa dibilang bahwa RRI memang menjadi satu-satunya media yang didengarkan oleh rakyat Indonesia. Meski saat itu sudah ada surat kabar, namun rakyat cenderung untuk mendengarkan RRI. Bahkan ketika acara fenomenal sudah ingin disiarkan, masyarakat rela menghentikan aktivitasnya untuk mendengarkannya.

Djoko mengatakan, pesan-pesan yang disampaikan oleh RRI memang menumbuhkan rasa kebersamaan bersama. “Ketika Soekarno berpidato, ada semacam rasa ingin berjuang bersama dengan orang di Papua atau Kalimantan atau daerah lainnya. Pengaruh pesan perjuangan memang benar-benar merasuk dalam hati rakyat. Sehingga apa yang akan terjadi nantinya, rakyat sanggup ikut pemimpinnya,”kata Djoko.

RRI terbukti efektif dan berhasil membangun sikap-sikap kebangsaan. Inilah pertama kalinya sebuah media mampu membentuk karakter bangsa kala itu. Alhasil, dari Sabang sampai Merauke pun semangat rakyat untuk mencintai negara Indonesia benar-benar tinggi.

Pada tahun 1950 hingga 1960, RRI masih menjadi tokoh sentral sebagai media penerangan dan informasi. Bahkan di era ini, RRI makin berkomitmen untuk membangun kesatuan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Hal ini terbukti dengan program-programnya yang terus menerus menekankan paradigma pendidikan karakter bangsa. Bahkan tak hanya dikemas dalam program khusus saja, namun

merambah pada acara lain seperti teater, drama, kesenian, dan lainnya.

Kendati lebih mendominasi tema-tema perjuangan, namun rakyat tetap mendengarkan RRI. Uniknya lagi acara-acara tersebut memiliki kekhasan masing-masing di berbagai daerah. Seperti di Yogyakarta, ada acara fenomenal yang bernama *Obrolan Pak Besut*. Acara tersebut menampilkan penyiar bernama Pak Besut yang memberikan uraiannya tentang pembaharuan pemerintah, pembangunan, saran dan kritik terhadap pemerintah, dan lainnya. Dengan gayanya yang khas waktu itu Pak Besut pun mampu mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan positif yang mendukung pemerintah.

Selain mengangkat tema perjuangan, RRI juga konsisten untuk mengangkat budaya lokal. Djoko masih ingat pula ketika ada acara fenomenal sandiwara radio berbahasa Jawa, keroncong Jawa, gamelan, serta *nyon-nyon*. Acara-acara ini mampu mengenalkan kebudayaan Jawa khususnya kepada seluruh masyarakat. Tak hanya mengenalkan saja, namun acara ini mampu mengajak masyarakat untuk menjaga kebudayaan Jawa.

“Seluruh program RRI waktu itu sangat disukai oleh masyarakat. Acaranya bersifat menghibur. Tak hanya acara, penyiarnya pun terlihat profesional karena menguasai materi serta mampu mempengaruhi masyarakat dalam kondisi seperti saat itu,” kata Djoko.

Fungsi RRI pun semakin strategis ketika masa Orde Baru. Saat itu pemerintah Presiden Soeharto

menggunakan RRI untuk membentuk Kelompencapir. Kelompencapir merupakan singkatan dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa yang merupakan kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia. Djoko menceritakan, lewat RRI-lah petani-petani berprestasi dari berbagai daerah dijangkau. Waktu itu pula, ketika acara Kelompencapir berlangsung, seluruh masyarakat bisa mendengarkan petani beradu kepintaran tentang pengetahuannya di seputar pertanian seperti cara bertanam, memilih bibit, masalah pupuk, dan sebagainya. Berkat media RRI-pula, program Kelompencapir ini berhasil mendapatkan penghargaan dari FAO dimana pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan.

Seiring berjalannya waktu, kedudukan RRI mulai terpengaruh dengan kehadiran media baru yakni televisi. Kira-kira tahun 1970an, televisi mulai hadir di masyarakat dan menjadi sebuah media yang mewah. Karena mewah, maka televisi terbatas hanya di perkotaan saja. Oleh karena itu, radio masih berfungsi strategis karena mampu menjangkau pedesaan.

“Saat televisi mulai masuk masyarakat, radio swasta pun mulai bermunculan. Masyarakat mulai dapat memilih alternatif program serta media yang mereka inginkan. Namun, RRI saat itu masih menjadi pilihan pertama karena radio swasta lebih menampilkan iklan,” tambah Djoko.

Perubahan besar terjadi pada akhir tahun 1990-an ketika industri televisi dan radio swasta mulai berkembang. Masyarakat makin selektif memilih

program serta media. Akhirnya televisi lebih banyak dipilih karena sifatnya yang lebih atraktif dan menarik. Tak mengherankan, bila RRI mulai tidak dilirik masyarakat sebagai sumber informasi utama.

Tak hanya globalisasi, pemerintahan di Indonesia pun mengalami transisi. Kala itu zaman reformasi, Departemen Penerangan mulai diserhanakan. Bahkan pada zaman Gusdur, Departemen ini dihapuskan. Hal ini tentu saja berdampak pada RRI yang awalnya di bawah departemen tersebut.

Masa Depan RRI

Tak bisa disangkal bahwa era media baru atau internet membawa perubahan dalam kehidupan bermedia termasuk radio. Radio sebagai media dengar memang lama kelamaan tergantikan oleh media lain seperti televisi ataupun internet. Kecanggihan yang ditawarkan tentu saja mampu memudahkan pengguna untuk memenuhi keinginannya. Baik dalam mencari informasi, hiburan, atau kebutuhan lainnya.

Terhadap masa depan RRI pun, Djoko masih optimis bahwa radio ini masih bisa tetap eksis hingga generasi – generasi berikutnya. Meski saat ini radio swasta lebih banyak dipilih khalayak, namun bukan berarti RRI tidak bisa lagi mencapai kejayaannya seperti saat itu.

“RRI perlu memiliki strategi untuk tetap memiliki posisi dalam ruang informasi. RRI perlu mengembangkan model strategi informasi yang bisa

dijadikan andalan. Hal ini perlu dipikirkan karena RRI berbeda dengan radio swasta yang berorientasi profit,” papar Djoko.

Menurut Djoko, RRI perlu memiliki siaran khusus yang menyangkut masalah *character building* mengingat kondisinya tengah kritis. Indonesia mengalami berbagai macam persoalan dari berbagai bidang dimana hal itu sangat mengancam integritas bangsa. Menurut Djoko, masyarakat Indonesia tidak lagi peduli akan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, degradasi moral, serta sikap—sikap kebangsaan lainnya. Untuk itulah, RRI sangat berpotensi untuk mengemas program dengan tema-tema tersebut. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh radio swasta, dengan demikian tidak ada pilihan selain RRI.

“Saya optimis RRI bisa kembali pada visi misi awalnya yakni membentuk karakter bangsa. Ini perlu dimulai sesegara mungkin untuk menghindarkan Indonesia dari kemunduran,” tandasnya.

Terkait dengan acara hiburan pun, Djoko menyarankan RRI bisa menyajikan hiburan yang berbobot. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah hiburan yang berorientasi pasar seperti vulgar, bersifat massal, popo, dan lainnya. Apa yang disukai pasar, maka itulah yang ditayangkan. Pasar memang menjadi khalayak utama, namun baginya khalayak makin selektif memilih hiburan yang mendidik.

“RRI bisa mengangkat kembali budaya lokal yang saat ini mulai tergerus zaman. Hal ini memiliki potensi yang bagus karena budaya lokal memiliki

peran strategis untuk pembangunan,”kata Djoko.

Djoko juga menegaskan bahwa RRI juga perlu paham tentang karakteristik khalayak saat ini. Khalayak makin aktif dan kritis terhadap tayangan media. Dengan demikian dalam penyusunan program perlu program yang berbeda dan berbobot. Tak hanya itu saja, masalah style serta penyiar juga perlu mengikuti perubahan zaman. Djoko pun menambahkan dalam membuat program juga diperlukan sokongan dana yang kuat. Untuk itulah, masalah pencarian dana ini menjadi pekerjaan rumah bagi RRI untuk memikirkannya. **[Olivia Lewi Pramesti]**

Prof. Dr. A. Syafii Maarif

Bukan Suara Penguasa



Sosok cendekiawan bersahaja dan kritis seperti Syafii Maarif mengaku tidak nyaman saat mendengarkan informasi yang disampaikan media tidak berimbang. Informasi yang berat sebelah dengan lebih mengedepankan suara pihak yang berkuasa menjadi terdengar sumbang. Begitu pun dengan RRI yang merupakan radio milik pemerintah yang

lebih banyak memberitakan keunggulan yang dicapai pemerintah ketimbang keagalannya.

“Tapi sekarang RRI sudah independen,” kata Syafii usai ditemui dalam acara bedah buku di gedung Tiara Graha di Jalan Kabupaten, Sleman pada ahad

* Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, pendiri Maarif Institute, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta.

saat bulan Ramadhan lalu.

Independensi RRI, menurut Syafii bisa didengar dari siaran-siarannya yang mulai banyak menampung ide dan menyuarakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Suara-suara yang dinilai menentang kebijakan pemerintah disuarakan RRI pula.

“Itu bagus sekali. Jadi informasi berimbang,” kata Syafii.

Independensi RRI, menurut Syafii ditanamkan sejak RRI dipimpin Parni Hadi sampai saat ini

“Independensi itu kami dengar dari siarannya. Sudah *balance* itu,” kata Syafii.

Syafii mengaku selama ini mengikuti siaran-siaran RRI. Terutama siaran Pro-3 RRI. Acara yang didengarkan cendekiawan yang akrab dipanggil Buya itu pun hampir semua acara Pro-3.

“Tepatnya sejak RRI tidak lagi menyuarakan hanya suara penguasa, saya mulai bersimpati,” kata Syafii.

Selama media massa menyuarakan suara penguasa, bagi Syafii, media tersebut tidak baik dan tidak mendidik. Lantaran itu pula, Syafii berpesan agar RRI tetap mempertahankan independensinya. RRI juga diharapkan lebih mempertajam siaran-siarannya. Terutama bagi masyarakat yang berada di perbatasan. Sebenarnya, masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan itu lebih enak masuk wilayah Malaysia. Tapi karena masih bangga pada Indonesia, mereka masih bertahan walau menderita.

“Secara konkret, mereka berpikir, ngapain kalau hidup sebagai orang republik tapi menderita terus ya?

Nah, RRI harus mengubah (pola pikir) mereka,” kata Syafii.**[Pito Agustin Rudiana]**

*Dr. KH. A. Malik Madany, M.A.**

Merawat Keberagaman Melalui Dialog



Matahari baru muncul dari peraduannya, ketika radio itu diputar perlahan. Sayup-sayup terdengar suara bersahaja sang ustadz, yang tengah sibuk menjawab pertanyaan dari pendengar setianya. Belum tuntas sebuah jawaban, telepon kembali berdering. Pendengar di ujung telepon seakan tak sabar untuk mengungkap sejumlah tanya berikutnya. Kondisi ini terus berlanjut, hingga berakhirnya program Taushiyah Udara, yang disiarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia (RRI).

* Katib Amm Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BNNU). Dosen Universitas Islam Yogyakarta

Suasana dialogis yang melibatkan banyak partisipasi pendengar ini sangat berkesan di benak Dr. KH. A. Malik Madany, M.A. Sebagai sosok penting yang menjabat Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dirinya mengaku sering memutar RRI untuk mendengarkan program tersebut.

“Banyaknya ibu-ibu maupun bapak-bapak yang mengikuti dialog interaktif tentang agama itu menunjukkan program keagamaan di RRI diminati oleh masyarakat luas. Indikatornya mudah. Banyak telepon dari pendengar yang masuk ke studio,” ungkapnya.

Meski memberikan apresiasi atas suksesnya program Taushiyah Udara itu, namun Malik Madany masih menganggap program serupa perlu ditambah. Tentu dengan fokus yang berbeda, yakni berupa dialog interaktif antar kelompok keagamaan. Ditengah mudahnya masyarakat Indonesia tersulut oleh sebuah perbedaan belakangan ini, menjadikan program ini sangat penting diadakan.

Belajar dari kasus pertikaian antara Sunni–Syiah di Sampang, Madura pasca Idul Fitri, Agustus 2012 lalu yang akhirnya menelan korban jiwa, RRI semestinya dapat menjadi media yang tepat untuk menjembatani dialog tersebut. Sebab, inilah peran sesungguhnya radio milik pemerintah. Menciptakan suasana kondusif antar kelompok yang bertikai, dan tidak memperuncing masalah.

“Indonesia adalah negara yang berpenduduk majemuk. Maka perbedaan itu adalah keniscayaan. Peran RRI untuk memfasilitasi berlangsungnya dialog-dialog

antar kelompok keagamaan yang sejuak, supaya lambat laun masyarakat terbiasa hidup dengan kemajemukan dan perbedaan,” jelasnya.

Bagi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2003 – 2007 ini, perbedaan itu seharusnya dilihat sebagai potensi untuk memperkaya khazanah keindonesiaan, bukan untuk menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Radio swasta yang ada saat ini harus diakui sarat dengan berbagai kepentingan dari pihak yang ada dibalik radio tersebut, sehingga mudah menyampaikan siaran yang memprovokasi. Hanya RRI yang bisa diharapkan menjalankan fungsinya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tetap utuh dalam kebhinekaan,” ujarnya.

Meski siaran keagamaan di RRI mendapatkan acungan jempol, namun Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat ini masih melihat sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi oleh radio ini. Dari segi inovasi misalnya. RRI dianggap masih terpaku pada program-program yang ada selama ini, padahal masyarakat membutuhkan lebih dari itu. Akibatnya, kompetisi RRI dengan radio-radio swasta menjadi kurang maksimal.

Situasi tersebut semakin diperparah oleh *image* yang terlanjur berkembang di tengah masyarakat, bahwa RRI adalah radio untuk segmen orang-orang yang sudah berumur atau sepuh. Akibatnya, yang mendengarkan siarannya pun berasal dari klasifikasi

umur yang relatif sama, yakni usia dewasa. Sementara pendengar radio dari kalangan muda merasa RRI bukanlah radio yang cocok didengarkannya.

Dalam pandangan Malik Madany, tidak kompetitinya RRI ini bisa jadi diakibatkan oleh perannya sebagai corong pemerintah, yang mengkomunikasikan program-program yang sedang dijalankan. Termasuk upaya pencerdasan masyarakat melalui siaran radio. Namun, ia menganggap hal itu tidak tepat dijadikan alasan pembeda.

“RRI tidak boleh disamakan antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu masyarakat menjadikan RRI sebagai media utama, karena keterbatasan media informasi pada saat itu. Tapi sekarang, media informasi banyak, sehingga masyarakat punya banyak pilihan. Karena itu, harus ada kiat-kiat yang membuat masyarakat memiliki ketergantungan pada RRI,” ungkapnya.

Menurut pria kelahiran 9 Januari 1952 ini, Maraknya radio-radio swasta dengan perangkat teknologi dan siaran yang menarik harus benar-benar mampu mendorong RRI untuk membenahi diri. “Pengelola RRI harus memikirkan berbagai inovasi, sebab masih ada peluang untuk berkembangnya radio milik publik ini. Selama RRI masih mau menangkap aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki RRI, Malik Madany cenderung optimis memandang masa depan radio dengan jaringan terluas di Indonesia ini. Apalagi mengingat perannya yang

diharapkan menjadi media penyebar perdamaian, dan perekat bagi kelompok keagamaan yang bertikai. Karenanya, menurut pria kelahiran Madura ini, RRI harus tetap eksis, seberat apapun tantangan yang dihadapinya. **[Masjidi]**

*GKR Hemas**

Dari Gender Hingga Semboyan



Masa kecil Tatiek Drajad Suprihastuti di Jakarta pun telah mengenal radio RRI. Saat duduk di bangku sekolah dasar sekitar tahun 1958-1959, Tatiek telah gemar mendengarkan siaran untuk anak yang biasa disiarkan radio milik pemerintah itu setiap pukul lima sore. Ada cerita anak, pun ada pemutaran

lagu anak yang dinyanyikan secara bersama-sama atau paduan suara. Dari sekian acara untuk anak yang didengarkan Tatiek, putri dari Kolonel Radin Subanadigda Sastrapranata itu mengaku sangat tertarik mendengarkan cerita anak. Sayangnya, cerita anak itu

* Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Beliau adalah permaisuri dari Sri Sultan Hamengku Buwono X.

tak lagi disiarkan RRI saat ini.

“Meski saya sudah tak mendengarkan lagi, tapi cerita anak itu masih sangat diperlukan anak-anak. Apalagi di daerah terpencil,” kata Tatiek yang pada 1968 dipersunting Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan Hamengku Buwono X saat ditemui penulis awal September lalu di Kraton Kilen.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, demikian gelar yang disandang permaisuri HB X tersebut, pun menyatakan bahwa saat itu jumlah radio yang siaran sangat terbatas. RRI pun menjadi salah satu radio dambaan masyarakat yang menjangkau hingga pelosok. Tak heran jika RRI adalah satu-satunya radio yang bisa didengarkan masyarakat tingkat bawah.

Meski tinggal di kota metropolitan, rupanya tak meninggalkan kegemaran Hemas pada masa remajanya untuk mendengarkan siaran wayang orang. Kebiasaan itu tak lepas dari hobi ayahnya untuk mendengarkan wayang saat malam tiba.

“Setelah menikah, karena Ngarso Dalem (HB X) suka mendengarkan Basiyo, maka ikut mendengarkan Basiyo. Sampai terbit kasetnya,” kata Hemas.

Tak hanya siaran budaya, Hemas ingat bagaimana masa SMA-nya pada zaman Orde Baru sekitar 1970-1980 cukup banyak program pemerintah yang disiarkan melalui RRI. Radio yang belum banyak bersaing itu banyak dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Sebut saja acara kelompokcapir yang digelar Departemen Pertanian atau pun keluarga berencana yang disiarkan kerja sama

dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Itu efektif sekali,” kata Hemas.

RRI pun dinilai Hemas menjadi media efektif untuk membahas persoalan-persoalan perempuan. Lantaran perempuan dan anak khususnya mempunyai problem kompleks, semisal masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Persoalan penyakit menular maupun aneka virus yang muncul dan pencegahannya. RRI juga menyiarkan acara tentang bagaimana ibu bisa melakukan kerja di rumah sambil mendapatkan pemasukkan. Saat itu, menurut Hemas, RRI masih bisa memberikan gambaran pada perempuan mengenai persoalan-persoalan tersebut.

“Obat-obatan makin maju. Virus juga makin banyak, seperti virus HIV, hepatitis. Dan RRI mengikuti itu. Siaran itu efektif,” kata Hemas.

Pada 1990, Hemas pun mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk mendengarkan radio saat pagi.

“Enggak harus khusus duduk di depan radio, tapi mendengarkan radio. Misalnya, sambil goreng tempe,” kata Hemas.

RRI dinilai Hemas kurang berperan dalam mensosialisasikan persoalan-persoalan gender. Padahal anggaran sosialisasi itu sudah ada sejak APBN 2000. Terbukti banyak orang yang belum memahami tentang gender hingga saat ini. Gender masih dianggap hanya merupakan duni perempuan. Justru di sana ada kerjasama antara perempuan dengan laki-laki untuk membangun keluarga, negara, termasuk perlindungan

terhadap perempuan.

“Kalau mau disampaikan, lebih baik RRI mengemas dalam bentuk dialog,” kata Hemas.

RRI diharapkan bisa mengambil manfaatnya, bahwa melalui dialog bisa diketahui apa saja kebutuhan masyarakat dan pemerintah. RRI pun menjadi media penyampai pesan tersebut kepada publik.

Model dialog ini pun, menurut Hemas sudah dilakukan RRI dalam menyiarkan acara dialog antara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan masyarakat. Dialog tersebut dilakukan oleh setiap anggota yang pulang ke daerah untuk menyampaikan informasi selama bertugas di Jakarta.

“Dan dikerjasamakan kalau DPD sedang reses harus berkunjung ke RRI di daerah untuk menyampaikan informasi,” kata Hemas.

Ada pula dialog nasional tentang DPD di Senayan Jakarta yang disiarkan radio swasta. Selain anggota DPD, ada pula anggota DPR, juga pakar yang kompeten dengan isu yang tengah diangkat.

“RRI nempel,” kata Hemas.

Isu-isu yang disiarkan di Senayan adalah isu-isu terbaru. Misal, membahas soal amandemen UUD, UU Kehutanan, juga UU RRI yang belum selesai. Juga persoalan-persoalan di daerah, seperti alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Termasuk soal laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga disampaikan kepada masyarakat.

“Hal-hal *kayak gitu* harus disampaikan lewat radio.

Interaktif lewat radio. Tapi saya jarang melakukannya, karena pulang (ke Yogyakarta) pun jarang,” kata Hemas.

Meski demikian, peran RRI dewasa ini dinilai Hemas masih kurang. Akibatnya, tak banyak orang yang mendengarkan. Menurut Hemas perlu ada terobosan dengan mengubah jadwal siaran yang berisi isu-isu yang dibutuhkan masyarakat. Misal, siaran bertema gender disiarkan tiap hari Minggu alias siaran saat orang berada di rumah sembari istirahat sehingga banyak manfaatnya.

“Jangan Senin sampai Jumat, karena orang sibuk sehingga enggak mendengarkan,” kata Hemas.

Siaran radio dinilai lebih baik ketimbang melihat siaran televisi yang saat ini banyak dicekokin dengan tayangan kekerasan. Mulai dari sinetron hingga siaran berita pun menayangkan visual kekerasan. Siaran-siaran tersebut tidak bisa dihentikan, karena sistem penyiarannya tergantung siapa yang mempunyai modal.

“Mengapa RRI enggak mengambil alih itu untuk menyeimbangkan acara agar masyarakat lebih mempunyai pikiran yang menarik,” kata Hemas.

Di daerah perbatasan, seperti Kalimantan Timur dan Natuna, Hemas yang sering melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah selaku pimpinan DPD melihat masyarakat di sana masih sangat membutuhkan pencerahan melalui siaran-siaran yang positif. Semisal siaran-siaran budaya yang mempererat rasa kebangsaan Indonesia. Di Sumateta Barat ada lagu-lagu Batak, di

Jawa ada campur sari, klenengan, ura-ura, juga *macapat*. Sehingga minimal sepekan sekali ada acara RRI yang menyiarkan lagu-lagu tersebut untuk memperkuat kebudayaan Indonesia.

“Di Kalimantan itu mana ada lagu-lagu daerah yang dihafal karena 40 persen adalah orang Jawa? Sehingga banyak lagu-lagu Jawa. Tapi RRI harus tetap menyiarkan lagu-lagu Kalimantan,” kata Hemas.

Di perbatasan pun, tenaga kerja Indonesia yang ada di sana mendengarkan berita-berita tentang Malaysia, karena berita tentang Indonesia tidak ada. Salah satu solusinya, tiga menara RRI harus dipasang di perbatasan. Sehingga ada informasi yang bisa disampaikan kepada TKI yang ada di sana.

“Sebagai TKI kan enggak tahu apa-apa. Mengapa RRI enggak bisa member gambaran? Misal, sejelek-jeleknya tinggal di kampung masih lebih baik ketimbang tinggal di negeri orang, apalagi sering di-kejar-kejar,” kata Hemas.

Hemas juga mengingatkan, selain informasi yang berisi berita, RRI juga menyampaikan siaran-siaran budaya.

“Ada selingan lagu campur sari biar kangen sama rumah,” kata Hemas.

Perubahan yang dilakukan RRI juga harus bersifat inovatif. Tidak datar-datar saja. Seperti anak-anak di perbatasan yang tidak sekolah, maka RRI menyampaikan siaran pelajaran tentang ilmu bumi, sejarah, budaya, juga memperkenalkan soal etnisitas di berbagai daerah di Indonesia.

“Petugas RRI-nya perlu ditingkatkan. Bukan hanya kualitas, tapi perbendaharaan materi,” kata Hemas.

Mereka bisa dikumpulkan tiap enam bulan sekali berdasarkan wilayah kepulauan. Bukan pendidikan dan pelatihan yang disampaikan dalam pertemuan itu, biar tak malas untuk berangkat. Melainkan penyampain kritikan, saran, dan masukan dari petugas RRI.

“Biasanya ada keluhan soal siaran di daerahnya. Sehingga pusat tahu persoalannya. Enggak harus ke Jakarta, nanti malah belanja ke Mangga Dua,” kata Hemas sambil tertawa.

RRI sampai saat ini pun, menurut Hemas masih menjadi corong pemerintah. Terbukti, ada siaran RRI di Kalimantan Timur yang dihentikan kepala daerah di sana karena dianggap mengkritik. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari sistem otonomi daerah yang diterapkan.

“Dikritik itu kan membangun diri kita agar lebih baik. Bukan malah nesu,” kata Hemas.

Meski demikian, upaya RRI untuk terus berbenah bukan dengan cara menentukan ciri khas RRI. Lantaran ciri khas justru membuat RRI tidak berkembang. RRI harus mempunyai bendera yang sama di seluruh daerah, seperti semboyan RRI. Jika tiap-tiap RRI di daerah mempunyai semboyan yang sama karena otonomi, maka dipertanyakan semangat Republik Indonesianya.

“Itu yang kami khawatirkan, karena RRI dapat dipengaruhi dan dikuasai,” kata Hemas.

Upaya yang dilakukan adalah bagaimana ada

keteguhan untuk menata RRI sebagai milik semua untuk semua. Semisal dengan membuat semboyan yang lebih menarik.

“Semboyan juga penting. *Mbok rodo piye* gitu semboyannya. Karena (semboyan sekarang) masih kurang, enggak jadi buah bibir kita. *Mbok nyeleneh* gitu lho,” kata Hemas memberi usul.

Hemas pun mengutip iklan rokok yang menyebut kalimat “*wani piro*”. Kalimat yang sederhana, namun bisa diinterpretasikan banyak hal.

“Kalau kita denger itu biasa saja. Tapi maknanya dalam. Maknanya bisa apa saja. Mengapa RRI enggak mengambil seperti itu,” kata Hemas. **[Pito Agustin Rudiana]**

Radio dan Ekonomi Sektor Riil

*Sultan Hamengku Buwono X**

Mengudara di Pasar-pasar Tradisional



Di sela kesibukan untuk mempersiapkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada 9 Oktober 2012, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X terlihat antusias ketika memberikan komentar tentang RRI Yogyakarta. Saat penulis menemuinya di bangsa Kepatihan, Rabu (3/10), orang nomor satu di DIY itu tengah keluar ruangan untuk memberikan pengarahan kepada beberapa orang bawahannya.

“Saya kira, keberadaan RRI menjadi sangat pen-

* Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

ting,” kata Sultan membuka pembicaraan siang yang cukup terik waktu itu.

Pernyataan Sultan tersebut merujuk pada keberadaan RRI Yogyakarta saat ini yang dinilai sudah menyampaikan informasi yang cukup variatif. Seperti ada siaran khusus berbahasa Jawa. Persoalannya kemudian bagi Sultan adalah bagaimana peran RRI sebagai media massa milik publik bisa menjangkau masyarakat hingga jauh dan luas.

“Apakah mungkin RRI Yogyakarta ini juga bisa menembus bagi warga masyarakat bisnis, khususnya di pasar? Jadi mereka juga bisa mendengarkan berita dan informasi yang dianggap penting bagi RRI untuk disiarkan sebagai radio publik,” kata Sultan menyampaikan usulnya.

Bukan lantaran membidik masyarakat di pasar-pasar tradisional, maka informasi yang disiarkan RRI sebatas informasi ekonomi bisnis. Menurut Sultan, informasi yang disampaikan bisa bermacam-macam. Baik informasi peristiwa, program pemerintah, maupun budaya, ekonomi, juga hukum. Yang penting informasi tersebut memperkaya informasi dan pengetahuan masyarakat. Lantaran meskipun masyarakat mempunyai radio di rumah, namun mereka cenderung memilih untuk menonton siaran melalui pesawat televisi.

“Kalau kondisi seperti itu, bisa jadi kemunduran bagi RRI untuk mencapai pendengarnya. Apakah mungkin, RRI kerja sama sama dengan kabupaten/kota agar bisa memberikan informasi di pasar,

di tempat-tempat yang memungkinkan mereka berkumpul,” kata Sultan menjabarkan maksudnya.

Kerja sama yang dimaksud bisa melalui Dinas Pasar di tiap-tiap kabupaten/kota di wilayah DIY dengan RRI. Siaran yang disampaikan pun aneka ragam. Selain yang bersifat informatif, juga ada campur sari maupun siaran berbahasa Jawa. Ada dua tujuan utama yang diharapkan Sultan bisa dicapai melalui kerjasama tersebut. Pertama, mewujudkan peran RRI untuk membantu menyampaikan siaran kepada masyarakat.

“Kan ada UU dimana pemerintah punya kewajiban untuk memberikan informasi pada publik (UU Keterbukaan Informasi Publik),” kata Sultan.

Kedua, mewujudkan peran RRI untuk menopang keistimewaan dalam bidang kebudayaan melalui siaran-siaran budaya yang disiarkan.

Bentuk kerja sama tersebut bukan tanpa pengalaman. Lantaran Sultan selaku kepala daerah pernah menerapkan pada masa pasca-bencana gempa bumi pada 2006 lalu.

“Saya kan pasang radio di pasar-pasar. Tujuannya untuk menginformasikan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapi rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Sultan.

Kala itu, pemerintah DIY menjalin kerjasama dengan radio swasta, Sonora FM. Sebuah upaya efektif untuk menyampaikan kebijakan pemerintah yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Nah, kalau sekarang bisa enggak itu diisi oleh

RRI,” kata Sultan.

Perkembangan zaman yang terus berubah diakui Sultan membuat RRI kian banyak tantangannya. Seperti kehadiran radio-radio swasta yang menawarkan dan menyajikan aneka siaran yang lebih menarik. Begitu pun persaingan dengan media visual, seperti televisi yang membuat media radio cenderung ditinggalkan.

“Meski di rumah punya radio, kan mungkin lebih cenderung *dipateni* karena memilih nonton teve. Karena di situ ada hiburan ada informasi,” kata Sultan.

Hal yang sama juga dialami Sultan. Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu mengaku hanya mempunyai kesempatan untuk mendengarkan radio saat di Jakarta.

“Karena teve di kamar tidur saya kebetulan rewel. *Yo unis*, daripada enggak ada suara. Tapi kan yang saya pilih akhirnya yang swasta juga. Karena ada lagu-lagu kan, untuk (pengantar) tidur,” kata Sultan sembari tersenyum.

Mungkin perilaku masyarakat kebanyakan juga sama. Justru kondisi tersebut dinilai Sultan bukan suatu masalah besar.

“Zaman dulu adanya memang hanya radio. Tapi sekarang pilihannya kan banyak. Orang meninggalkan rumah kan *durung karuan* nonton teve. Kan berarti dia kehilangan informasi,” kata Sultan.

Begitu pula dengan peran informatif yang diharapkan bisa diambil oleh RRI Yogyakarta. Dimana RRI mempunyai segmen-segmen siaran untuk publik.

Salah satunya pasar tradisional yang sangat diharapkan Sultan bisa dibidik RRI Yogyakarta.

“Kan banyak, berapa ribu orang di seluruh DIY. Ya, siapa tahu nanti merasa nikmat, *dodolan karo ngrungokeke* campur sari. Tapi kan *diselani* informasi,” kata Sultan.

Lantas, apakah RRI mampu bersaing?

“Bersaing atau tidak, RRI harus hidup. Namanya saja, Radio Republik Indonesia. Sama dengan TVRI. Belakangnya Republik Indonesia. Harus tetap survive,” kata Sultan dengan nada sungguh-sungguh menandakan.

Untuk survive, Sultan menyatakan RRI tidak hanya bisa hidup dengan mengandalkan anggaran pemerintah. Tapi bagaimana RRI tetap ikut berperan sebagai penyampai informasi publik. Otomatis yang namanya berperan adalah bagaimana siaran RRI menjangkau sebanyak mungkin publik sebagai pendengarnya. Antara lain dengan memperbaiki siarannya.

“RRI enggak boleh mati! Walau enggak ada pendengarnya harus tetap hidup. Namanya juga Radio Republik Indonesia,” kata Sultan dengan nada tegas.

Di balik kesibukannya memimpin DIY, Sultan ternyata mempunyai perhatian terhadap generasi muda, khususnya anak-anak. Sultan menaruh harapan besar kepada RRI Yogyakarta untuk mengambil peran aktif bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya melalui pendidikan budaya.

Sultan yang dulu gemar mendengarkan lawakan

almarhum Basiyo melalui RRI, berharap anak-anak muda masa kini juga mengenal siapa itu Basiyo. Pun pemain ketoprak, Cokrojiyo. Ada pula pesinden gaek Condrolukito. Ketiga nama itu adalah seniman-seniman tempoe doeloe yang namanya tak lagi berkibar saat ini. Nama-nama yang nyaris dilupakan untuk kemudian punah.

“Anak muda kan belum tentu *ngerti* Basiyo. Cokrojiyo *wae* mungkin *ora ngerti*. Anak-anak muda pensinden mungkin ya enggak *ngerti* juga kok, Condrolukito,” kata Sultan.

Sultan pun berharap agar Dinas Kebudayaan menyelenggarakan festival atau lomba dagelan, ketoprak, dan sinden se-DIY.

“Ning pialane ojo pialane gubernur, tapi pialane Basiyo, Cokrojiyo, Condrolukito. Meskipun yang menyelenggarakan pemerintah daerah,” kata Sultan.

Tak hanya anak-anak- muda bisa mengapresiasi aktifitas-aktifitas seni tersebut. Melainkan bagaimana mereka juga mengenal Basiyo, Cokrojiyo, juga Condrolukito.

“Secara teknis penyelenggaraannya bisa membangun kerjasama dengan RRI,” kata Sultan.

Bagi anak-anak usia Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Sultan pun mengharapkan RRI menghidupkan kembali acara yang melibatkan anak-anak tersebut selama puasa. Pada masa dulu, bulan puasa adalah masa libur saekolah bagi anak-anak itu. RRI sempat menyediakan waktu bagi mereka untuk menampilkan pentas kreatifitas anak-anak

yang menyanyi. Baik menyanyi seorang diri maupun paduan suara. Meskipun sekolah tak lagi meliburkan penuh anak-anak pada bulan puasa, menurut Sultan tak masalah jika RRI tetap membuat siaran untuk anak-anak tersebut. Tinggal mengatur waktunya.

“Saya (saat kecil) kan pernah nyanyi di RRI pada waktu puasa. Dari anak untuk anak. MC-nya juga anak-anak. MC-nya waktu saya siaran itu ya Hardoyono (penyiar RRI yang kemudian pindah ke TVRI) itu,” kata Sultan yang saat itu sekolah di SD Keputren Yogyakarta.

Kala itu, anak-anak yang tampil rata-rata kelas 4 - kelas 5 SD. Tiap-tiap SD saling bergantian untuk mengisi acara dalam satu bulan penuh. Orang tua anak-anak pun otomatis akan datang ke studio RRI untuk mengantarkan dan menemani anak-anaknya siaran.

“Yang penting bukan itu. Melainkan di samping puasa, ada aktivitas anak. Sekarang kan enggak ada lagi,” kata Sultan.

Jika persoalan perkembangan zaman yang ditengarai sebagai alasan acara yang melibatkan anak-anak tersebut ditiadakan, menurut Sultan bukan menjadi alasan.

“Bukan masalah zaman. Wong diadakan juga bisa kok,” kata Sultan.

Adanya siaran aktivitas untuk anak, dari anak, dan oleh anak tersebut, maka anak-anak kian mengenal dan dekat dengan budaya Jawa. Aktivitas seni yang dilakukan anak di tengah kesibukan anak, mengerjakan tugas-tugas sekolah juga bisa menyeimbangkan otak

kiri dan kananya.

“Anak-anak *ora mung kon pinter tok*. (Zaman sekaran) *pinter*, tapi *ora beradab. Podho* tawuran,” kata Sultan menyesalkan terbunuhnya dua siswa SMA di Jakarta akibat tawuran yang beritanya tengah marak kini.**[Pito Agustin Rudiana]**

*Ambar Polah**

Menumbuhkan Kelompok Wirausaha Baru



“RRI harus lebih berperan di bidang ekonomi” kata inilah yang pertama kali muncul dari Ambar Polah, menyikapi peran RRI saat ini dan masa mendatang. Menurut Ambar, harapan ini tidak terlalu berlebihan jika melihat fasilitas dan infrastruktur yang sudah di miliki

RRI saat ini, ditambah lagi dengan tingkat kepemilikan radio yang hampir sama dengan televisi. Ya.. semua rumah tangga memiliki pesawat radio, selain televisi. Masalahnya, tinggal sejauh mana RRI mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan kemampuan

* Pengusaha industri kerajinan dan dikenal sebagai komposer. Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO)

mengikuti perubahan zaman.

Menurut Ambar, meskipun RRI sudah mampu melakukan perbaikan di tingkat internal dan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi, tetapi kemampuan berkompetisi RRI masih sangat lambat dibandingkan dengan radio lain.

“Jika RRI tidak mau kalah dalam persaingan di industri penyiaran, soal ini harus diperhatikan,” imbuhnya.

Ambar juga memberikan gambaran tentang belum berperannya RRI dalam memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat. Sebut saja tentang kenaikan BBM yang kalah dengan opini mayoritas masyarakat. Padahal opini belum tentu benar dan pemerintah memiliki alasan dan pertimbangan yang belum tersampaikan dengan tepat kepada masyarakat.

Sebagai pengusaha dan pelaku ekonomi sektor riil, Ambar berharap RRI mampu menumbuhkan kelas wirausaha. Satu potensi besar yang belum digarap secara *intensif* oleh RRI. Media Indonesia dan MNC Bussines sebenarnya bisa dijadikan rujukan. Tetapi dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki dua media tersebut hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat di negeri ini. Sebuah masalah yang sebenarnya tidak terjadi pada RRI.

Wirausaha-wirausaha baru memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Minimnya jumlah wirausaha ini berdampak pada minimnya peran sektor riil terhadap pertumbuhan agregat nasional. Sehingga

harus diciptakan strategi baru untuk mempercepat tumbuhnya kelompok ini.

“Ketersediaan informasi memiliki peran penting untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru” ungkapnya.

Informasi ini dapat berupa perkembangan pasar dalam negeri maupun pasar internasional, dan juga tentang informasi ekonomi lainnya. Ketersediaan informasi ini dapat dikemas tidak hanya melalui berita, tetapi juga melalui diskusi, *talkshow*, dan seminar. Dengan adanya program ini, RRI juga diharapkan mampu menjadi penyambung dan penghubung antara masyarakat dengan lembaga pemerintah. Sebut saja, dengan Departemen Industri, Departemen Pertanian, dan lembaga terkait lainnya.

Secara pribadi, pengusaha sekaligus Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) ini sudah terlibat secara langsung dalam acara dan program RRI sebagai pembicara maupun narasumber bidang ekonomi diskusi maupun *talkshow*. Keterlibatan inilah yang kemudian memberikan banyak manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain.

“Harus di akui bahwa RRI juga berperan terhadap perkembangan awal karir saya di bidang bisnis. Di radio inilah saya banyak berkenalan dengan banyak orang, pergaulan saya meluas dan pengetahuan saya bertambah. Sekaligus dapat berbagi ilmu dan informasi dengan masyarakat luas ketika sering menjadi pembicara dalam acara dan dialog interaktif yang diadakan oleh RRI. Tidak hanya dari Yogya saja,

bahkan ada yang dari Sumatera yang menelpon dan bertanya di acara tersebut.” **[Lukman Hakim]**

Radio dan Perkembangan Media

Kuskridho Ambardi*

Era New Media



Era New Media

Era new media menjadi topik hangat dalam perkembangan teknologi informasi saat ini. Salah satu media yang tengah *trend* adalah internet. Tanpa disadari, kehadirannya mengubah kehidupan bermedia. Kehadiran internet membuka dunia baru yang disebut dengan era *World Wide Web* atau Web 2.0. Web 2.0 tidak lagi hanya bentuk lain dari media massa dengan sistem pesan searah, namun juga bersifat interaktif. Dunia Web 2.0 ini ditandai dengan hadirnya jaringan sosial seperti *You Tube*, blog, situs

* Akademisi UGM, Staf pengajar Jurusan Komunikasi, FISIPOL UGM. Banyak melakukan penelitian dengan tema partai politik dan media massa.

jejaring sosial, dan lainnya.

Karakteristiknya yang bersifat interaktif menjadikan media ini banyak diminati khalayak. Ia menjelma menjadi media yang mampu mengatasi berbagai persoalan seperti persoalan ruang dan waktu. Akibatnya, konsumen tak lagi pasif melainkan berubah menjadi aktif. Mereka pun tak hanya sekedar mencari hiburan, melainkan juga mencari informasi serta pengetahuan.

Keunggulan-keunggulan media baru inilah yang menyebabkan penggunaannya makin meningkat. Berdasarkan laporan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2010 ada peningkatan yang signifikan pengguna internet di Indonesia yakni 31 juta. Hal inilah yang akhirnya berpengaruh pada penggunaan media lainnya seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi pun akhirnya berpengaruh pada perubahan budaya dalam masyarakat. Dalam era sekarang ini, masyarakat tengah berada dalam masyarakat informasi dimana keberagaman informasi ada di mana-mana dengan kemudahan alat komunikasi. Tak mengherankan bila persaingan media yang cenderung *profit making* pun makin gencar untuk menciptakan khalayak mereka sendiri.

Akademisi yang juga menjadi Staf Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kushridho Ambardi mengatakan bahwa perubahan teknologi informasi menyebabkan terjadi

perubahan pada karakteristik khalayak. Kushridho menyebutnya *neurofocused audience*. Khalayak makin terpecah-pecah dan tidak bersifat homogen. Khalayak lebih suka memilih topik tertentu atau acara-acara yang benar-benar mereka sukai.

“Ada orang yang menyukai berita politik, ada pula yang menyukai berita hiburan. Yang terjadi saat ini adalah media berlomba-lomba menyuguhkan berbagai macam variasi content atau program sesuai dengan minat pasar. Dengan demikian, khalayak dengan bebas melakukan pilihan,”katanya.

Tantangan dan Peluang RRI

Radio Republik Indonesia (RRI) mau tak mau berada dalam lingkaran era new media ini. Ambardi tak bisa menampik bila media radio mengalami penurunan pamor, tak hanya RRI melainkan juga radio swasta. Media makin beragam, tidak seperti zaman revolusi kemerdekaan dahulu dimana radio merupakan media satu-satunya. Karakteristik khalayak juga telah berubah bahwa mereka tidak lagi pasif melainkan aktif serta selektif dalam memilih informasi atau program.

Ambardi mengatakan bahwa dari segi fungsinya, media radio tidak lagi menduduki posisi pertama. Pada zaman era revolusi kemerdekaan, sebagai contohnya, RRI bisa menjadi pusat informasi serta saluran komunikasi politik utama dan pertama di Indonesia. Sementara itu, yang terjadi saat ini adalah posisi radio sudah berada di bawah media televisi, surat kabar,

serta internet ketika orang ingin mencari informasi atau hiburan.

“Saat ini radio memang tidak menjadi referensi utama dan pertama ketika orang mencari informasi. Orang memilih TV komersial atau surat kabar untuk mendapatkan informasi. Hal ini bukan gejala unik di Indonesia, karena seluruh negara di dunia juga turut merasakannya,”kata Ambardi.

Lalu dimana posisi radio saat ini? Apakah ini merupakan gejala ketiadaan radio di mata publik? Ambardi mengatakan bahwa keberadaan radio tetap akan ada di mata publik dengan menjalankan fungsi media umumnya yakni memberikan informasi, hiburan, pengawasan, serta transformasi nilai. Akan tetapi, jangkauannya akan bergeser dalam artian radio lebih hidup dalam area lokal.

“Ini adalah tantangan dan peluang RRI sebenarnya untuk bisa memperoleh kepercayaan publik kembali. Audience telah mengalami dekomposisi, lalu bagaimana RRI bisa membuat program yang berbeda dengan lainnya,”papar Ambardi.

Di Indonesia, kecenderungan yang terjadi adalah penyeragaman isi siaran. Semua media berlomba-lomba untuk menyiarkan program yang sama untuk mendapatkan simpati publiknya. Hal ini jelas terlihat bahwa media sangat berorientasi pada pasarnya. Bahkan tak hanya itu, pemilik media pun sudah masuk dalam area politik atau bergabung dalam partai tertentu. Mau tidak mau, isi siarannya cenderung tidak netral atau dengan kata lain memihak partai atau

golongan tertentu.

Kondisi inilah yang bisa dimanfaatkan oleh RRI. Belajar dari kejayaan berpuluh-puluh tahun lalu, RRI memiliki keunggulan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan bersama. Rasa nasionalisme, patriotisme, kebersamaan, dan lainnya menjadi dasar penting bagi RRI untuk membuat program yang bermutu.

Program, katanya, tidak perlu seragam dengan media lainnya. RRI perlu mencari strategi yang bagus untuk bisa membidik karakter *audience* yang heterogen dan selektif ini. Ada satu wilayah atau program dimana RRI bisa menanamkan identitas bersama atau pengalaman – pengalaman bersama yang dialami berbagai suku di Indonesia. Ia mencontohkan seperti film Hollywood dimana budaya massa ini bisa menggalang rasa kebersamaan warga Amerika dari berbagai jenjang usia. Meski RRI saat ini memiliki program 2 FM, namun program ini hanya bisa menyatukan kalangan anak muda saja.

Mengapa perlu program yang berbeda? Ambardi mengatakan bahwa penyelenggaraan penyiaran di Indonesia baik televisi maupun radio komersial masih didominasi oleh praktek standarisasi riset audiens yang akrab dikenal dengan *rating*. Pola pikir yang berkembang dalam stasiun televisi dan radio adalah semakin tinggi *rating*, makin disukai sebuah program tertentu dan banyak juga khalayaknya.

Posisi *rating* sangat mempengaruhi kebijakan redaksi. *Rating* diasumsikan representasi selera masyarakat. *Rating* memang dijadikan informasi tunggal

untuk menetapkan program siaran demi meraih popularitas televisi. Hal ini tak lain karena keberadaan televisi komersial dituntut untuk mencari profit sebanyak-banyaknya. Karena *rating* inilah, media tidak peduli lagi dengan isi serta dampak dari siarannya. RRI sangat mampu untuk menggunakan celah ini yakni membuat program yang berbeda dan berkualitas. Hal ini bisa berarti bahwa program tidak mengejar keuntungan dan bersifat netral.

RRI pun tidak perlu khawatir tidak mendapatkan khalayak karena programnya yang berbeda. Khalayak saat ini makin kritis terhadap program yang disiarkan. Semakin programnya mengakomodasi kebutuhan mereka dan berkualitas, maka khalayak pun tak segan-segan untuk memilihnya. Program pun tak perlu bersifat linear misalnya hanya fokus pada masalah kebudayaan saja atau hiburan, namun program harus bisa menyatukan *audience* atau menggabungkan irisan-irisan *audience*.

“Setelah memiliki program, RRI harus menjual program itu. Tidak harus dengan menjual, namun dengan cara publikasi yang *intens*. Tanpa publikasi, program RRI tidak akan dikenal masyarakat. Karena saya melihat RRI sangat kurang publikasi terhadap programnya,” kata Ambardi.

Ia menambahkan RRI perlu belajar dari pengalaman radio lain, seperti radio BBC atau radio di dunia yang profesional dalam siaran bermutu dan edukatif. Pembelajaran yang bisa dipetik pun antara lain tentang bagaimana mereka membuat program,

memperoleh dana, cara publikasi, manajemen sumber daya manusia, dan lainnya. Ia juga menilai bahwa keberadaan kumpulan ahli independen untuk mengawasi kebijakan BBC efektif untuk dilakukan peningkatan profesionalitas radio tersebut.

“BBC menjadi referensi ideal untuk RRI bisa belajar tentang pengelolaan radio. Meski saat ini BBC tengah mengalami konflik seperti penghentian karyawan dan kesulitan dana, namun tidak ada salahnya RRI belajar tentang pengelolaan radio mereka. Tak hanya BBC, RRI juga bisa belajar dari radio di Amerika yakni Public Broadcast Stasion (PBS) dimana ia memiliki program istimewa yang berhasil masuk ke jaringan komersial. Sehingga ia tidak hanya menjadi *broadcaster* tetapi juga *feeder* bagi radio-radio lainnya,” paparnya.

Pentingnya Kredibilitas

Berpedoman pada visi misi harus tetap dijalankan RRI untuk bisa konsisten menjaga profesionalisme. Namun, visi misi ini tetap harus diimplentasikan dalam praktik jurnalistik secara konkret. Lalu seperti apa konkretnya?

Membangun kredibilitas tidaklah mudah bagi RRI atau media manapun. BBC pun yang saat ini bisa menjadi referensi ideal, harus membangun kredibilitas selama bertahun-tahun. Menurut Ambardi, kredibilitas bisa dibangun dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal ini sangatlah penting karena

SDM adalah aset untuk menjalankan kerja organisasi.

Kemampuan SDM ini tentu saja perlu diselaraskan dengan perubahan saat ini. Kemampuan tak hanya dalam hal akademis, melainkan juga praktis. Misalnya saja di tahun mendatang, era media adalah era digitalisasi. Untuk itulah, SDM-nya pun perlu mempersiapkan teknologi digital, baik dalam penggunaannya, implikasinya, serta lainnya.

Seperti diketahui bahwa era radio digital nantinya sifatnya akan terbuka untuk masyarakat umum. Artinya bahwa masyarakat Indonesia dibebaskan untuk memiliki atau mendaftar dalam era radio digital ini. Dari segi peluangnya, hal ini lebih menguntungkan karena mampu menarik pendengar lebih banyak dan secara teknis lebih efisien.

“Tentu saja RRI perlu menyiapkan dari sekarang tentang perubahan digital ini. Era ini juga menjadi ancaman karena dengan teknologi baru radio harus memperhatikan content dan kreativitas program. Dalam era transisi nantinya, RRI tetap harus memperhatikan kebutuhan pasar dan peka terhadap perubahan yang terjadi,”ungkap Ambardi.

Sementara itu, hal terpenting dalam unsur kredibilitas adalah penerapan regulasi dan kode etik jurnalistik. Regulasi media berfungsi untuk membatasi, menjelaskan, dan mengatur segala keberadaan institusi media. Regulasi media akan menyeimbangkan keberadaan media sebagai institusi sosial dan ekonomi. Sebagai institusi sosial, media berada dalam sistem sosial masyarakat yang fungsinya

mencerdaskan masyarakat, sedangkan sebagai institusi ekonomi, keberadaan media tak luput dari aspek mencari keuntungan yakni membutuhkan pemasukan dari iklan untuk keberlangsungan hidupnya.

Sementara itu, kode etik lebih berkaitan dengan kaidah moral dalam masyarakat. Keduanya itu, atau regulasi dan kode etik tidak bisa dilepaskan dalam praktik jurnalistik. Hal ini sangat penting untuk mengedapankan profesionalisme media. Justru saat ini yang terjadi adalah media mengaburkan regulasi dan kode etik ini hanya karena mengejar pasar. Akibatnya, pemberitaanya seringkali tidak objektif dan kredibel.

“Masyarakat awam tidak paham adanya regulasi dan kode etik dalam praktik jurnalisme media. Menjadi salah satu tugas RRI untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang regulasi dan kode etik yang benar. Dalam segala praktiknya, RRI tetap harus mengacu pada kedua hal itu karena sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas serta profesionalisme di era-era mendatang,” tandasnya. **[Olivia Lewi Pramesti]**

*Romo Baskara T Wardaya**

Menyesuaikan Perubahan Zaman



Menumbuhkan Rasa Ke-Indonesiaan

“RRI berbeda dengan radio lainnya karena ia mewarisi semangat sebagai radio perjuangan.”

Inilah ungkapan Sejahrawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Baskara T. Wardaya, ketika membicarakan masa depan RRI. Baginya RRI memiliki peranan penting dalam revolusi kemerdekaan lalu dimana ia menjadi media utama bagi publik dalam mendapatkan informasi.

Menelisik ke belakang, berdasarkan perspektif

* Sejarawan Universitas Sanata Dharma. Dosen Sejarah di Universitas Sanata Dharma dan UGM.

sejarah, radio memainkan peranan penting dalam sejarah Indonesia pasca proklamasi tahun 1945. Ia menceritakan, waktu itu berita-berita tentang Indonesia banyak diblokade oleh Belanda. Tujuannya adalah supaya perjuangan yang dilakukan Indonesia jangan sampai diketahui dunia luar.

Satu-satunya cara agar kondisi di Indonesia diketahui dunia luar khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah dengan menggunakan radio. Akhirnya dengan radio yang merupakan gerakan bawah tanah dari prajurit-prajurit Indonesia, kondisi Indonesia bisa diketahui oleh dunia luar.

Seiring dengan perubahan zaman saat ini, kedudukan RRI serta peranannya memang berubah. Menurut Baskara, radio swasta lebih banyak dipilih khalayak ketimbang mendengarkan RRI. Atau media lain seperti televisi serta internet yang banyak dijadikan referensi publik untuk mendapatkan informasi atau hiburan.

Persaingan dengan radio swasta inilah yang sebenarnya bisa menjadi peluang bagi RRI untuk melakukan perubahan. Radio swasta sangat berorientasi pada profit yakni mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun hal ini tentu berbeda dengan semangat RRI yang mewarisi semangat-semangat perjuangan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan RRI adalah membangun spirit ke-Indonesiaan kembali. Rasa ke-Indonesiaan seperti patriotisme, nasionalisme, kebersamaan, dan lainnya mulai luntur termakan zaman.

“Untuk menimbulkan rasa ke-Indonesiaan inilah, RRI perlu menyuguhkan program yang bisa mengikat rasa kebersamaan dari berbagai suku di Indonesia. Program-program seperti ini belum ada hingga sekarang karena program di media cenderung seragam,”kata Romo Baskara.

Romo Baskara, sapaan akrabnya, juga menekankan bahwa RRI jangan terbawa arus media-media swasta saat ini. RRI tidak perlu mengejar iklan karena akan menjerumuskan RRI ke dalam lingkaran komersial. Tugas RRI yang utama adalah membangun spirit ke-Indonesiaan tadi serta netral terhadap kepentingan apapun. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan program yang berkualitas.

“Saya sebagai khalayak media menginginkan program yang berbeda dimana isinya bermutu. Hal ini yang tidak diperhatikan media lain karena lebih berorientasi pada kemauan pasar. Padahal, pasar pun memiliki selera masing-masing,”kata Romo Baskara.

Satu hal yang diusulkan Romo Baskara untuk RRI terkait program yang bisa dikembangkan adalah membuat program “*World Music*”. Program ini belum dimiliki oleh radio-radio lain dan sangat potensial bila dikembangkan. Jadi, dalam program ini RRI menayangkan musik-musik dunia seperti musik khas dari Afrika, Kenya, Swedia, dan lainnya. Tak hanya sekedar musiknya yang ditampilkan, namun kebudayaan yang melatarbelakangi daerah tersebut juga diungkap.

“Program ini menjadi salah satu contoh bahwa kita adalah bagian dari dunia universal. Dengan

demikian, tak hanya membangun spirit Indonesia namun RRI perlu juga membangun rasa kebersamaan bahwa kita semua adalah warga dunia,”kata Romo Baskara. **[Olivia Lewi Pramesti]**

*Imam Yudotomo**

Harus Bisa Seperti BBC



Di rumahnya yang di asri di wilayah Janti, Yogyakarta, Imam Yudotomo (71) berbagi cerita tentang pengalamannya bersama RRI di masa lalu. Dalam ingatan aktivis pembela hak-hak rakyat kecil ini, Radio Republik Indonesia (RRI) pernah memiliki produk berita yang kredibel dan menjadi acuan banyak orang. Namun mengapa kini RRI bukan lagi sumber berita yang terpercaya?

Suara pesawat-pesawat yang bersiap-siap landing di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta menemani pembicaraan kami di teras rumahnya yang kecil. Terkadang kami harus menunggu pesawat itu

* Aktivis sosial, yang fokal terhadap hak-hak rakyat kecil.

lewat karena suaranya yang teramat keras.

“Sejak awal kemerdekaan dahulu, RRI selalu menyampaikan pesan-pesan. Dahulu tidak terlalu rumit karena stasiun radio hanya ada RRI,” ujar Imam mulai membuka ingatannya.

Persinggungan Imam dengan RRI dimulai sekitar tahun 1946-1947 ketika ia masih duduk di sebuah taman kanak-kanak (TK) milik Perguruan Taman Siswa, Yogyakarta. Waktu itu ia dan teman-temannya sering siaran bersama di Studio RRI yang berada di sekitar Gedung Bank Indonesia, Yogyakarta.

“Kalau siaran bahasa Jawa dengan Ki Suratno sedangkan kalau siaran dolanan anak-anak berbahasa Indonesia bersama Ki Suratman,” ujarnya.

Bila RRI sedang menyiarkan siaran ini, anak-anak pun berkumpul di depan pesawat radio untuk mendengarkan secara bersama-sama. Maklum, waktu itu pesawat radio masih menjadi barang mewah, hanya orang-orang kaya yang mampu membelinya. Keluarga Imam sendiri mempunyai radio kecil merek Phillips yang dikenal sebagai radio roti.

Jika tidak mendengarkan dari pesawat radio milik orang kaya, maka masyarakat mendengarkan radio di tempat umum. Pada masa itu, di setiap tempat yang strategis, terdapat sebuah radio yang disediakan untuk masyarakat.

“Bila ada siaran wayang orang atau kethoprak, banyak sekali masyarakat yang berkumpul untuk mendengarkannya. Tempat itu (dimana ada pesawat radio untuk umum) menjadi ramai sekali,” kenang Imam.

Ketika usianya menginjak masa remaja, Imam pun masih suka mendengarkan siaran RRI. Salah satu acara favoritnya adalah “Lagu Pilihan Pendengar”.

Pada masa sebelum Orde Baru, Imam juga masih ingat bahwa RRI tidak pernah steril dari kekuasaan. Bila ada pergantian pemerintahan selalu diikuti dengan pergantian direktur RRI.

Selain itu RRI juga sering menjadi alat partai politik. Namun tidak mencolok. Misalnya pada tahun sekitar 1954-55 ketika Menteri Ruslan Abdulgani yang menjadi pendukung Partai Nasional Indonesia (PNI) ditangkap karena korupsi, beritanya tidak muncul di RRI. Itu terjadi karena kabinet yang berkuasa adalah PNI.

Tetapi pengalaman Imam bersentuhan dengan RRI yang serius terjadi tahun 1965, saat ia sudah menjadi mahasiswa. Pasca pecahnya peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) dimana Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalangnya, RRI merasa perlu memberikan penjelasan soal peristiwa itu kepada masyarakat. Program ini disiarkan melalui Stasiun RRI Nusantara II setiap satu minggu sekali selama setengah jam dan di *relay* oleh stasiun RRI lainnya.

Waktu itu yang menjadi Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film (Dirjen RTV) adalah Umar Kayam. Kemudian Pak Kayam menunjuk Imam dan kawan-kawannya sebagai tim yang bertugas memberikan penjelasan soal peristiwa G 30 S melalui RRI untuk masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Adapun yang menjadi pimpinan tim adalah kawannya Imam yang

bernama Pong Waluyo.

Mengapa Pak Kayam menunjuk Imam dan kawan-kawannya? Itu karena mereka sebagai aktivis mahasiswa mempunyai pandangan politik yang sama dengan Pak Kayam, yaitu sosialisme.

Bila anggota tim lainnya memberikan penjelasan peristiwa G 30 S sesuai dengan versi pemerintah pada masa itu yang dikuasai Jenderal Soeharto, maka Imam memilih *angle* lain.

“Saya waktu itu menjelaskan bahwa masyarakat tidak boleh mengambil tindakan sendiri-sendiri (terhadap pendukung PKI),” ujar Imam.

Sebagaimana dicatat sejarah, waktu itu memang terjadi aksi balas dendam terhadap PKI yang dianggap sebagai aktor yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah. Masyarakat dan pemerintah mulai melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pendukung PKI. Selain itu, pemerintah pun membubarkan PKI.

Dalam memberikan penjelasan, Imam mencoba mengikuti alur pemikiran Bung Hatta. Pada zaman pemerintahannya tahun 1948, PKI pernah memberontak di Madiun, Jawa Timur. Namun Hatta tidak mau membubarkan PKI. Dasarnya, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintah tidak boleh membubarkan sebuah partai politik.

Menurut Hatta, yang boleh dihukum keras adalah orang-orangnya. Namun caranya juga harus benar dan tidak boleh sembarangan.

“Saya termasuk orang yang mencoba sedikit menanamkan pernyataan seperti Hatta itu,” ujar Imam.

Dalam menyampaikan pandangannya, tentu saja Imam tidak bisa secara frontal. Situasi politik waktu itu yang dikuasai rezim militer tidak memungkinkannya. Ia menyampaikan secara halus.

Menurut Imam, acara talk show yang diasuh bersama kawan-kawannya itu sempat populer dikalangan masyarakat. Waktu itu RRI dapat menyampaikan pesan ini secara bagus karena masih menjadi satu-satunya pemancar radio di Indonesia. Bahkan untuk mendukung program ini, RRI juga membagi-bagikan pesawat radio kepada masyarakat.

Tugas Imam bersiaran di RRI berakhir pada akhir tahun 1960-an. Ia menduga penyebabnya adalah pernyataannya yang keras perihal keputusan Jaksa Agung waktu itu, Sugiharto yang membebaskan seorang koruptor.

Sebagai seorang aktivis mahasiswa, Imam mengikuti perkembangan situasi politik melalui pemberitaan RRI. Dalam pandangannya, waktu itu RRI mampu membuat dan menyiarkan berita-berita yang layak dipercaya (kredibel). Ia dan juga banyak orang Indonesia lainnya selalu berada di depan pesawat radio setiap jam 17.00 sore untuk mendengarkan berita-berita RRI.

“Pada waktu itu RRI mempunyai tim yang kuat untuk menyusun berita, sehingga berita dari Jakarta itu bisa digaransi kevalidannya, lepas dari situasi politik yang ada,” ujar Imam.

Tetapi ketika stasiun radio swasta mulai ber-

munculan dan selanjutnya diikuti dengan siaran televisi (TVRI) maka reputasi RRI sebagai penyampai berita menjadi redup. Masyarakat tidak lagi menjadikan RRI sebagai sumber berita yang utama. Di masa tuanya, Imam pun tidak pernah lagi mendengarkan siaran berita dari RRI.

“Sejak siaran televisi ada dan berita televisi bisa kita anggap representatif, ya RRI kita tinggalkan. Jaman pemerintahan Soeharto, berita televisi lebih bagus dari RRI,” ujar Imam.

Ia mempunyai pendapat jika RRI ingin menjadi radio yang berpengaruh di masyarakat, maka ia seharusnya mengambil posisi seperti BBC di Inggris. Stasiun milik pemerintah Inggris ini masih mampu menyajikan berita-berita yang akurat dan bahkan sudah merambah ke dunia televisi.

Untuk itu, RRI harus membentuk tim yang bisa membuat berita yang bagus, akurat, dan *up to date*. Berita yang diproduksi RRI nasional itu direlay oleh stasiun RRI di seluruh Indonesia sehingga bisa menjadi panutan masyarakat.

“Jika hal itu bisa dilakukan, pasti dasyat,” tandas Imam.

Posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik sama dengan BBC. Meski menjadi corong pemerintah, RRI tetap independen dan tidak selalu *manut*. BBC bisa menolak permintaan pemerintah jika sudah mulai melanggar prinsip-prinsip kebenaran

“BBC mempunyai tim redaksi yang bisa bilang tidak kepada pemerintah jika mulai mengganggu ke-

benaran,” ungkap Imam.

Kini persaingan media massa sangat keras. Ini memang menempatkan posisi RRI pada situasi yang sulit jika ingin merebut perhatian kembali dari masyarakat. Imam memberi solusi, RRI bisa mencoba *come back* tetapi harus memilih salah satu yang bisa ditonjolkan, misalnya berita nasional.

Namun perlu dicatat, materi beritanya, lanjut Imam bukan sekedar berita biasa, tetapi berita yang bisa memberikan ‘warna’ terhadap situasi di Indonesia. Sehingga dengan berita RRI, orang bisa mengutip menurut berita RRI bla..bla... sama ketika orang mengutip berita dari BBC.

“Saya rasa kalau tidak begitu RRI akan kehilangan fungsinya dan tidak akan pernah jadi acuan lagi,” tambah Imam.

Menurut Imam, RRI juga bisa menyuplai berita bagi radio-radio komunitas. Dengan garapan berita yang mencerdaskan maka suplai berita ke radio-radio komunitas yang berada di seluruh Indonesia ini bisa menjadi gerakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menjadi bagian dari upaya untuk menanggulangi kecenderungan Indonesia sebagai negara gagal.

Memang, sebagai lembaga penyiaran dengan jangkauan di seluruh Indonesia, RRI seharusnya bisa menjadi media massa yang populer di kalangan masyarakat dan mampu mencerdaskan bangsa. Itu bisa dimulai dengan membuat berita yang akurat dan berguna bagi masyarakat. Siapa tahu?

*Herry Zudianto**

Lebih Dekat dengan Masyarakat



Program “Wali Kota Menyapa” merupakan satu program di RRI Yogyakarta yang berlangsung sejak satu dekade terakhir. Dua kali dalam sepekan, program ini digelar. Senin dan Kamis pada pukul 07.30 WIB. Dalam durasi waktu 30 menit, semua persoalan perkotaan

bisa langsung diadukan. Dari jalan berlubang, rambu rusak, hingga selokan mampet. Dan hebatnya, aduan itu langsung mendapat tanggapan.

Adalah Herry Zudianto, Wali Kota Yogyakarta periode 2001-2011, yang mula-mula punya gagasan. Dua tahun pertama menjabat Wali Kota, muncul di

* Mantan Walikota Yogyakarta. Menjabat selama dua periode tahun 2001-2006 dan 2006- 2011. Penggagas Walikota Menyapa bersama RRI.

benaknya keinginan membangun komunikasi efektif dengan warga. “Idenya bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa berdialog tanpa ada batasan,” katanya ditemui di rumahnya, Jalan Golo, Kota Yogyakarta, pertengahan Agustus 2012 lalu.

Berlatar belakang sebagai sarjana ekonomi dan bertahun-tahun menggeluti bisnis batik, membuat Herry dituntut selalu berpikir inovatif. Sikap itu terbawa hingga ia menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta. Ia mengatakan banyak keuntungan yang didapat dalam program itu. “Menghemat waktu, saya tak perlu menemui satu per satu warga untuk mendengar aspirasi mereka,” katanya.

Selain itu, program itu pun mendekatkan dirinya dengan warga Yogyakarta. Melalui interaksi dengan warga dalam Wali Kota Menyapa, ia mengaku cukup banyak mendapat masukan yang bisa dijadikan landasan menjadikan Yogyakarta menjadi kota yang lebih baik lagi. Karena acara itu terbuka dan bebas, masukan itu bisa datang dari mana pun juga, termasuk masyarakat di lapisan paling bawah. “Idenya bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa berdialog tanpa ada batasan,” katanya.

“Wali Kota Menyapa” dikemas secara dialogis melalui kombinasi antara sambungan telepon dan siaran radio. Dipandu pembawa acara (*host*), Wali Kota menelpon studio dan dipancarkan melalui gelombang radio. Demikian juga pendengar, bisa menelpon ke studio dan suaranya bisa langsung didengarkan Wali Kota melalui radio. Pernah juga Wali Kota datang

langsung ke studio untuk siaran, tapi itu tak sering. Sebanyak 90 persen *by phone*, dan 10 persen di studio.

Sepanjang periode pertama jabatannya sebagai Wali Kota Yogyakarta, Herry merupakan narasumber utama program ini. Hingga pada akhirnya, pada periode kedua, tugas menjadi narasumber itu dibagi bergantian dengan wakilnya, Haryadi Suyuti, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2011-2016. Herry mendapat jatah hari Senin, sementara Haryadi sebagian hari Kamis. Tak hanya dipancarkan oleh RRI, dalam waktu bersamaan “Wali Kota Menyapa” juga dipancarluaskan (*relay*) oleh tiga stasiun radio swasta di Yogyakarta; Unisi, Sonora dan MBS.

Dianggap efektif menjembatani aspirasi warga dan pemerintah, RRI mulai mengembangkan program ini untuk daerah lain di Yogyakarta. Wali Kota Menyapa telah menjadi inspirasi lahirnya Bupati Menyapa untuk Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Tiap hari sepanjang pekan, kedua program ini rutin menjadi penyambut pagi. Dari semua daerah di Yogyakarta, hanya Gunung Kidul yang mundur sejak awal.

Kini, Wali Kota Menyapa dan Bupati Menyapa merupakan program unggulan RRI Yogyakarta. Kehadiran program ini selalu ditunggu warga. Puluhan, atau bahkan ratusan orang, diperkirakan antre di ujung sambungan telepon. Mereka berlomba agar bisa berinteraksi dengan kepala daerah. Sayangnya, dalam satu kali durasi rata-rata hanya 5-8 penelpon yang bisa

tersambung.

Herry Zudianto lahir pada 31 Maret 1955. Di era itu, media massa belum banyak berkembang seperti saat ini. Sementara televisi hanya ada TVRI, itu tak banyak orang memiliki pesawat televisi, di dunia radio RRI-lah rajanya. “Berbicara radio di zaman itu, *ya* RRI,” katanya.

Herry kecil sebenarnya bukanlah pendengar radio. Maklum saja, ia baru memiliki radio pribadi saat menginjak usia Sekolah Menengah Pertama. Uang membeli radio itu ia dapat dari tabungan dan tambahan orang tuanya.

Ia menilai, hingga awal berdirinya hingga kini, RRI adalah media pemersatu bangsa. Fungsi inilah yang mesti dipertahankan. RRI menjadi stasiun radio utama yang menjadi rujukan informasi bagi masyarakat. Caranya, tentu saja tak meninggalkan partisipasi publik sebagai pemasok informasi.

Di tengah gencarnya persaingan media elektronik saat ini, ia memberi perbandingan, lilahtlah dua stasiun televisi berita di Indonesia; Metro TV dan TV One. Mereka telah menempatkan diri sebagai media informatif. Banyak program dialogis ditayangkan, bahkan pemisanya pun bisa menelpon langsung dalam siaran langsung. “Saya tak tahu, apakah RRI bisa meraih segmen seperti itu,” katanya.

Namun, ia yakin, tanpa harus meninggalkan kekhasan sebagai media elektronik yang mengutamakan siaran dalam bentuk suara, radio bisa tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan media massa saat ini.

Berbeda dengan membaca media cetak dan online atau menyaksikan televisi, mendengarkan siaran radio bisa dilakukan sembari melakukan pekerjaan lain. Inilah kekhasan radio.

Dengan melibatkan partisipasi publik dalam tiap siaran, menurut dia, banyak pula keuntungan yang bisa didapat. Sumber daya “reporter lepas” menjadi berlimpah. Mungkin mereka tak melaporkan sebuah berita layaknya reporter profesional, namun setidaknya mereka merupakan sumber informasi yang juga penting bagi masyarakat. “Informasi tentang motor hilang misalnya,” katanya.

Reporter “gratisan” itu pun, sambung dia, bisa dikembangkan. Misalnya saja, ia memberi contoh, melalui generasi muda di bangku-bangku sekolah. *Toh* nanti, selepas mereka sekolah tetap membutuhkan kerja. Dan dengan pengalaman berkenalan dengan dunia jurnalistik di usia muda, mereka tertarik menerjuni secara profesional. **[Anang Zakaria]**

*Muchamad Suhud**

Tingkatkan Semangat Pengabdian



Semangat Pengabdian RRI Masa Lalu

Lebih dari tiga puluh tahun berkecimpung di RRI, tentunya Muchamad Suhud bisa dibilang sangat paham mengenai dinamika radio pemerintah ini. Pria ini mengaku mengalami dinamika RRI sejak tahun 1967 hingga awal tahun 2000an, baik dari masa kejayaan hingga kemerosotannya. Kendati begitu, Suhud menyatakan rasa bangga bisa turut berkontribusi dalam perkembangan RRI.

* Mantan Penyiar RRI,

“Orang yang bisa masuk RRI dan menjadi penyiar disana waktu itu pasti akan sangat bangga. RRI menjadi satu-satunya media yang didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, suara kita bisa terkenal di seluruh Indonesia,”papar Suhud.

Pria kelahiran Yogyakarta, 16 Maret 1943 ini bercerita bahwa yang menjadi penyiar tahun 1960-an adalah penyiar yang *mumpuni*, artinya memiliki kemampuan lebih dalam bidangnya. Misalnya program karawitan, maka penyiarnya pun adalah ahli karawitan atau program ketoprak dimana pemainnya adalah ahli ketoprak. Tak mengherankan karena berisi ahli-ahli di bidangnya, maka pekerjaan sebagai penyiar justru adalah penyalur hobi mereka. Tanpa membaca naskah siaran pun, penyiar-penyiar ini mampu mengeksplorasi bahan siaran dengan baik.

Karena berlandaskan hobi inilah, maka penyiar RRI waktu itu sangat maksimal dalam bekerja. Kata Suhud, dalam bekerja tidak ada beban dan merupakan hiburan tersendiri. Penyiar tampak menikmati pekerjaannya hingga mereka bekerja penuh pengabdian. Mereka pun tidak segan-segan memberikan pengetahuan terbaiknya untuk pendengarnya.

“Beberapa program RRI kala itu banyak yang menjadi fenomenal. Pendengar tak hanya menyukai progamnya, melainkan penyiarnya juga. Mereka beranggapan bahwa penyiar RRI mampu membawa suasana sehingga mereka seolah-olah berada dalam

peristiwa itu,”kata Suhud.

Waktu itu, pegawai RRI memang memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi untuk kemajuan RRI. Kendati gaji pegawai masih di bawah rata-rata, namun mereka tetap bekerja dengan penuh semangat. Visi misi RRI kala itu memang dijalankan sesuai dengan yang diamanahkan. Akibatnya segala bentuk peraturan hingga kedisiplinan yang diterapkan benar-benar dilakukan tanpa terpaksa.

“Dulu itu, seorang penyiar memang dilatih betul agar menghasilkan siaran yang bagus dan bermutu. Untuk itu, ia harus kreatif dalam membuat program siar. Sementara itu terkait dengan kedisiplinan, penyiar diharuskan datang ke box siaran setengah jam sebelum acara dimulai. Kalau tidak, kepala siaran sudah duduk di box siaran dan justru kita-lah yang malu.”katanya.

Suhud mengatakan bahwa semangat pengabdian itu muncul karena rasa memiliki radio ini. Penyiar waktu itu sangat paham karakteristik dari media dengar ini. Pada hakikatnya, radio adalah media imajinatif, dengan demikian penyiar dituntut harus bisa membangun suasana sebaik mungkin agar pendengar-nya tidak meninggalkan radio.

Hingga tahun 1970 hingga 1980-an pun RRI masih menjadi acuan pendengar untuk mencari informasi dan hiburan. Sumber daya manusia dalam organisasi RRI juga masih berisi orang-orang yang *mumpuni* dalam bidangnya. Ia bercerita pula tentang bagaimana orang melaporkan pertandingan olahraga, salah satu program yang menjadi fenomenal pula. Kata Suhud

yang pernah menjadi mantan penyiar berita, reportase di lapangan tak jauh beda dengan menyiarkan program ketoprak. Reportase harus mampu membuat imajinasi dimana seolah-olah berada dalam kejadian tersebut.

Profesionalisme jurnalisme radio pun ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Penyiar harus paham dan melaksanakan etika jurnalistik. Etika jurnalistik ini diantaranya menyampaikan fakta dengan benar, sopan dan santun, tidak menyinggung SARA, dan lainnya. Dengan melaksanakan etika ini yang merupakan kaidah moral dalam masyarakat, maka RRI berhasil menampilkan kredibilitasnya di mata pendengar.

Kualitas Menurun

Seiring dengan perubahan zaman dimana media makin variatif, Suhud pun tak menampik jika peranan radio pun kian berubah. Orang tidak lagi menggunakan radio sebagai referensi utama untuk mencari informasi dan hiburan, namun memilih media lain seperti internet atau televisi.

Perubahan zaman ini ternyata juga mempengaruhi kualitas RRI saat ini. Suhud menilai bahwa kualitas RRI mulai menurun. Hal ini bisa dikaji dari berbagai aspek diantaranya aspek SDM, programming, pemasaran/ manajemen, kemampuan produksi, serta teknologi yang digunakan.

Dari segi SDM, Suhud menilai bahwa penyiar saat ini tidak lagi memiliki kemampuan khusus dalam bidangnya. Penyiar hanya bekerja menyiarkan

isi siaran saja tanpa bisa melakukan kreativitas lebih lanjut. Situasi imajinatif pun sebagaimana karakteristik media radio tidak lagi bisa dibangun.

“Ketika mendengarkan RRI saat ini, penyiar kurang bisa berimprovisasi. Penyiar juga tidak banyak berbicara dan sering sekali tidak menguasai bahan siaran mereka. Hal ini terlihat sekali dalam siarannya karena sama sekali tidak memberi kesan terhadap pendengar,”kata Suhud.

Ketika dibandingkan dengan dahulu, penyiar dididik secara matang sebelum siaran. Bahkan tak hanya itu, penyiar juga dibekali kemampuan lain untuk menjabat posisi tertentu misalnya administrasi, keuangan, dan lainnya.

Selain kurangnya kreativitas dalam mengelola bahan siaran, SDM RRI kurang mengedepankan profesionalisme jurnalisme. Artinya bahwa etika jurnalisme dalam siaran tidak diperhatikan. Ia mencontohkan ketika ia mendengarkan sebuah program di malam hari. Waktu itu penyiarnya dengan sangat vulgar menggunakan kata-kata yang merangsang pendengar dan bahasanya tidak sopan. Padahal dulunya, etika-etika semacam ini sangat diperhatikan betul karena penyiar takut bila pelanggaran etika dapat menurunkan kredibilitas RRI.

Penyiar pun kurang memperhatikan fakta yang mereka disampaikan. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada RRI. Saat ini, publik makin kritis terhadap program dan bisa mencocokkan fakta di media lainnya.

Masih berkaitan dengan SDM, Suhud mengamati bahwa jumlah SDM RRI yang banyak tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan. SDM RRI terkesan tidak efisien dan kurang bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Untuk itulah, perlu perombakan dalam bidang SDM baik fungsi serta tanggungjawabnya.

Kata Suhud, SDM menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas RRI saat ini. Tentu saja bekal pelatihan pada SDM perlu dilakukan *intensif* untuk mencetak SDM yang memang benar-benar berkualitas.

Aspek penurunan kualitas juga terlihat dari program-program RRI. Suhud menilai bila program RRI banyak mengikuti radio swasta pada umumnya. Dengan kata lain, tidak ada program yang istimewa yang menjadi unggulan RRI. Program cenderung asal dan ini sangat terlihat dalam setiap siarannya. Ia memberi contoh RRI seringkali hanya menyiarkan lagu-lagu tanpa mengisinya dengan materi. Jelas hal ini sangat tidak tepat karena justru pendengar menunggu siaran-siaran yang edukatif dan berkualitas.

“Sudah programnya ikut-ikutan, penyiarannya pun kurang capable terhadap materi siaran. Ini menjadi masalah sendiri bila tidak diperbaiki,”kata Suhud.

Suhud pun mengatakan RRI perlu paham tentang karakteristik khalayak saat ini. Khalayak makin bersifat heterogen dan selektif dalam memilih program. Ia mencontohkan, saat ini program politik menjadi program unggulan. Bisakah RRI melihat peluang ini?

Namun tentu saja RRI memiliki konsekuensi lebih yakni menghadirkan narasumber yang kompeten.

Menurut Suhud, masih banyak program yang bermutu yang bisa diolah oleh RRI. Program ini tentunya dengan melihat potensi daerah serta khalayak. Ia mencontohkan RRI Yogyakarta, dimana ia bisa mengolah program berbaur kebudayaan. Ini sangat prospektif karena program ini bisa dibalut dengan materi-materi yang sesuai dengan keadaan saat ini. Budayawan, katanya, bisa berbicara tentang politik.

Selain aspek program dan SDM, Suhud juga melihat adanya kendala pemasaran oleh RRI. Karena tidak ada “barang” yang bisa dijual, maka pemasarannya pun akan sulit. Padahal pemasaran ini penting untuk mendatangkan konsumen. Selain kendala pemasaran, juga ada masalah dalam kemampuan produksi. Masalah kemampuan produksi ini lebih berkaitan dengan kemampuan SDM yang kurang menguasai pekerjaanya.

Sementara itu, terkait dengan teknologi yang digunakan, RRI perlu mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Lebih lagi saat ini internet menjadi teknologi yang banyak digunakan orang. Untuk itulah, konvergensi media internet perlu dilakukan.

RRI Masa Depan

Sebagai mantan redaktur berita, Suhud mengaku optimis RRI bisa berubah dan bangkit dari keadaannya saat ini. Memang diperlukan perombakan yang luar

biasa untuk menjadikan RRI menjadi media yang kembali dipercaya publik. Perombakan ini diantaranya masalah SDM, program, pemasaran, teknologi, serta aspek-aspek yang berkaitan lainnya.

Untuk melakukan perombakan ini, ada beberapa nilai penting yang perlu dikembangkan oleh SDM-nya. Nilai-nilai ini seperti rasa ingin mengabdikan, tanggung-jawab, memiliki, kebersamaan, inovatif, patriotisme, nasionalisme, serta nilai-nilai kebangsaan lainnya.

“Nilai-nilai inilah yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai RRI. Dengan nilai-nilai ini, pegawai akan lebih menikmati pekerjaannya meski mengemban visi misi yang berat. Hal ini yang perlu dipupuk terlebih dahulu sebelum melakukan perombakan-perombakan,”kata Suhud.

Ia pun juga menambahkan hendaknya setiap SDM tetap berpedoman pada standar profesionalisme jurnalisisme radio dalam kinerjanya. Standar profesionalisme ini sangat penting untuk mengembalikan kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap RRI. Profesionalisme ini sangat penting dilakukan karena media saat ini banyak yang mengaburkan hal itu. Karena mengikuti selera pasar, aspek-aspek regulasi dan etika tidak lagi diperhatikan. Bagi Suhud, ini bisa menjadi peluang dan tantangan RRI untuk merebut khalayaknya.

Dirinya juga berharap, RRI lebih terbuka terhadap perubahan saat ini. Keterbukaan ini bisa dilakukan dengan belajar dari radio swasta lain misalnya belajar membuat program, pencarian dana, menjual program,

dan lainnya. Setelah aspek-aspek di atas dilakukan, jangan lupa untuk mempublikasikan RRI di tengah masyarakat bahwa RRI sudah berubah. **[Olivia Lewi Pramesti]**

Radio dan Budaya

Gogo Prayogo*

Belajar dari Radio Lain



Bagi RRI, belajar dari radio lain, adalah keharusan untuk mendapatkan kemajuan. Demikian disampaikan oleh, Gogo Prayogo, mantan penyiar radio BBC. Berdasarkan pengalaman Gogo Prayogo, yang dulu juga pernah menjadi penyiar RRI, ada beberapa pelajaran penting dari BBC yang bisa diserap. Bercerita tentang BBC, Gogo mengungkapkan kekaguman dari radio tersebut. Radio ini mampu menjaring banyak network sehingga pendengar tidak perlu kebingungan memilih program. RRI bisa mendapatkan pelajaran dari BBC, diantaranya bagaimana mengelola program,

* Mantan Penyiar BBC. sempat menjadi penyiar RRI

mengelola website, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan sebagainya.

“Tidak ada salahnya belajar dari keberhasilan radio lain untuk berubah. Hal ini perlu dilakukan RRI karena era-nya sudah berubah,”kata keduanya.

Gogo Prayogo menceritakan di BBC banyak sekali ahli-ahli dari berbagai negara untuk berkontribusi di dalamnya. Kompetensi ini sangat penting karena akan berpengaruh pada kepercayaan publik. Semakin sering disuguhkan narasumber yang profesional dan kompeten, makin tinggi pula minat pendengar untuk memilih program itu.

“Tak perlu khawatir mencari pendengar. Pendengar akan datang sendiri ketika program yang ditawarkan memiliki cita rasa beda. Hal ini seperti yang dilakukan BBC karena sering membuat program yang bermutu dan berkualitas dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Bahkan isu-isu yang dibahas adalah isu yang tengah diperbincangkan publik,”kata Gogo.

RRI pun perlu meningkatkan network untuk mensupport programnya. Gogo mencontohkan, untuk tetap bisa menjadi referensi publik sebagai pusat informasi, RRI mesti menampilkan program berita yang faktual, lengkap, serta akurat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggandeng kantor-kantor berita yang ada di tingkat nasional maupun dunia. Dengan bantuan network inilah, RRI tidak akan ketinggalan informasi.

Selain dari sisi program, RRI juga perlu belajar

menjadi lembaga independen seperti yang dilakukan pula oleh BBC. Ia menceritakan, sebagian dana dari BBC berasal dari uang pajak masyarakat dan dikumpulkan oleh pemerintah. Dengan demikian, mau tidak mau programnya pun harus berorientasi pada masyarakat dan pemerintah pun tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam isi siarannya.

Pembuatan lembaga independen ini bisa dilakukan dengan merekrut orang – orang di luar RRI dimana tugasnya adalah mengawasi kebijakan RRI. Dengan demikian, RRI tetap bisa terkontrol dan menjalankan profesionalisme sebagai media publik.

RRI Berbenah

Gogo pun menambahkan selain belajar dari radio lain, RRI juga perlu melakukan perubahan dari internalnya. Baik dari kemampuan SDM, program, teknologi, dan sebagainya. Ia menyoroti kemampuan SDM sekarang yang kurang kreatif dan mumpuni di bidangnya. Hal ini tentu saja perlu menjadi pemikiran RRI untuk memberikan pelatihan intensif pada SDM.

Peningkatan kapasitas SDM juga perlu diimbangi dengan kemajuan teknologi. Gogo mengatakan bahwa tantangan radio adalah berada di antara banyak media. Untuk itulah, RRI perlu mengambil celah untuk tetap mempertahankan keberadaanya. Gogo berharap RRI bisa menggunakan banyak media untuk mempublikasikan programnya. Misalnya meng-

kombinasikan radio berita, website, streaming, dan lainnya. Dengan banyaknya fasilitas ini, khalayak tidak lagi kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. **[Olivia Lewi Pramesti]**

*Busyro Muqoddas**

Testimoni dalam Siaran



“RRI kok enggak ada bosan-bosannya sama saya,” kata Busyro Muqoddas sambil tertawa.

Ahad siang itu menjelang pekan akhir bulan Ramadhan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu baru saja keluar dari masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Dia usai berdiskusi tentang terorisme yang menjadi bahan disertasinya untuk meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Beberapa wartawan dari berbagai media telah menunggunya

* Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini menjabat sebagai salah satu Ketua KPK.

di pintu gerbang masjid untuk wawancara. Maklum, isu perseteruan KPK versus Kepolisian RI kembali menghangat. Saat itu perseteruan tentang rebutan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulasi surat izin mengemudi (SIM).

Penulis pun mengklarifikasi bukan sebagai wartawan RRI, melainkan mewawancara untuk meminta testimoni tentang radio pelat merah tersebut yang akan merayakan hari jadinya. Bekas Ketua KPK tersebut terlihat antusias dengan kata “testimony” yang penulis lontarkan.

“Testimoni tentang RRI itu bagus, karena ada nilai historis dan edukasinya kepada masyarakat,” kata Busyro yang terlihat enerjik.

Busyro pun mencontohkan kasus-kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang masuk kategori pelanggaran HAM berat akibat ulah rezim otoriter Orde Baru waktu itu. Seperti kasus tragedi Tanjung Priok, Mei 1998, pembantaian orang-orang yang dicap PKI. Ironisnya, bangsa Indonesia cenderung melupakan dan menganggapnya sebagai hal yang remeh. Busyro pun berharap RRI membuat program-program yang diversikatif, seperti dengan menyampaikan testimony dari para pihak korban pelanggaran HAM dari berbagai kasus.

“Itu kritik saya pada RRI. Mestinya RRI mewawancara tokoh-tokohnya yang disampaikan menjadi testimoni,” kata Busyro.

Meskipun sebagai media yang acapkali dicap sebagai corong pemerintah, Busyro yakin RRI mam-

pu membuat dan menyiarkan program-program semacam itu.

“Harus mampu dong,” kata Busyro.

Keyakinan Busyro lantaran melihat RRI tak lagi seperti dulu yang sangat berpihak kepada pemerintah. Melainkan Busyro sudah melihat ada perubahan pada sistem penyiaran yang diterapkan RRI.

“Sudah ada sikap-sikap yang perfect, diskriptif, dan independen,” kata Busyro.

Sayangnya, dosen Fakultas Hukum UII yang kini menjadi pejabat publik itu tak lagi sempat mendengarkan siaran-siaran RRI. Meskipun pada masa dulu, dia sering mendengarkannya.

“Dulu iya, kalau sekarang tak sempat mendengarkan. Lha wong mendengarkan suara anak saya saja jarang *je*,” kata Busyro yang dikenal suka melontarkan banyolan-banyolan jenaka dalam forum.

Lantas siaran apa yang dulu sering didengarkan?

“*Ura-ura*. Eh, apa itu, *macapat*,” kata Busyro cepat sembari bergegas masuk ke dalam mobilnya. **[Pito Agustin Rudiana]**

*Yohanes Waluyo**

Radio Penawar Derita

Sebuah peristiwa di tahun 2000, telah mengubah jalan hidup Yohanes Waluyo. Guru pengajar matematika di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Yogyakarta itu, awalnya tak pernah berpikir akan bergabung dalam komunitas pendengar radio. Apalagi sampai mencatatkan namanya sebagai Wakil Ketua I Paguyuban Kru dan Monitor RRI Yogyakarta.

“Saya membidangi kegiatan, sejak tahun 2003,” kata lelaki berusia 52 tahun yang memiliki “nama udara” Yowa ditemui di rumahnya, jalan Godean Yogyakarta, akhir September 2012 lalu. Yowa, ia men-

* Wakil Ketua I Paguyuban KRU, dan Monitor RRI Yogyakarta. Aktivitasnya sekarang sebagai Guru Matematika di SMPN 3 Kota Yogyakarta.

jelaskan, adalah singkatan Yohanes Waluyo. “Nama itu lebih terkenal ketimbang nama asli saya.”

Dua belas tahun lalu, ia memulai kisah, sebuah tuduhan tanpa bukti mengarah padanya. Ceritanya, sebuah printer sekolah raib dari tempatnya. Hanya karena keterangan dari seorang paranormal, Yowa dituding sebagai pencurinya. Alih-alih didengar, pembelaan dirinya tak digubris, Bahkan puncaknya, pihak sekolah menonaktifkan sementara Yowa dari tugas mengajar. “Satu catur wulan diskors,” katanya.

Mengajar matematika dan fisika di sekolah itu sejak 1978, fitnah itu terlalu kejam untuknya. Ia mengatakan begitu terpukul dengan tudingan itu. Sampai-sampai, kesehatan terus menurun dan ia jatuh sakit. Tak hanya berdampak pada dirinya, Afra Gertrudis Aryantinah, istri Yowa, yang tengah hamil muda, mengalami keguguran lantaran turut merasakan kesedihan suaminya.

Praktis, sejak diskors dari sekolah, Yowa hanya berdiam di rumah. Bagi lelaki kelahiran Pramabanan, Kabupaten Sleman, 17 Januari 1957 itu, bukan perkara muda membunuh bosan. Hingga akhirnya ia menemukan kesibukan baru, yakni mendengarkan radio. “Istri saya pendengar radio, saya jadi ikut mendengarkan,” katanya.

Dari radio itulah, ia menemukan kembali semangat hidupnya. Bermula dari sekadar mendengar, ia mulai mengirim permintaan lagu yang diputar. Hampir semua radio ia dengar, tak hanya RRI saja. Seolah menemukan sahabat baru, ia mulai berkirim

salam lewat radio hingga “kopi darat” dengan sesama pendengar. Dalam waktu singkat, ia pun melupakan musibah yang menyimpannya. Secara tak langsung radio telah menjadi penawar sakitnya.

Perkenalannya dengan RRI sebenarnya nyaris tak terduga. Kala itu, di tahun 2001, Yowa sudah aktif bergabung dengan komunitas sebuah radio swasta mendengar kabar adanya pertemuan anggota komunitas pendengar RRI. Karena karakter organisasi itu bersifat cair, siapa pun bisa mendatanginya. Dan, Yowa iseng datang ke pertemuan komunitas pendengar RRI.

Sejak pertemuan pertamanya itu, ia mulai rutin mengikuti pertemuan Paguyuban Kru dan Monitor RRI Yogyakarta yang digelar pada minggu ketiga tiap bulan. Setiap datang, Yowa mengatakan, memiliki kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Satu per satu, pengunjung yang datang ia salami. Berkenalan. Kalau belum kenal, niscaya ia akan memperkenalkan dirinya.

Luar biasa hasilnya. Dalam waktu singkat, ia mengenal puluhan orang yang acap kali datang dalam pertemuan rutin itu. “Teman saya jadi banyak sekali,” katanya, tertawa mengingat peristiwa itu.

Tradisinya menjaga persahabatan yang baik itu mengantarkannya dipercaya mengkoordinasikan peringatan Sewindu PKM RRI Yogyakarta pada April 2002. Peringatan itu sukses dan mendapat sambutan banyak pihak. Kepiawaian mengorganisasikan kegiatan itu membawanya dipercaya menjadi Wakil Ketua I yang membidangi kegiatan di PKM pada 2003.

Selama kepengurusannya, tercatat PKM pernah

menggelar sebuah pementasan ketoprak dan wayang orang. Dengan anggota PKM mencapai seratusan orang, ketoprak itu dimainkan para pendengar radio dan kru RRI. Sementara itu, pementasan Wayang Orang yang digelar bahkan berlangsung hingga dua kali dan melibatkan seniman ternama, Yati Pesek misalnya.

Selain menggelar kegiatan bersama antara pendengar dan kru, PKM adalah garda terdepan pengawasan siaran RRI. Ia memberi contoh, misalnya saja ada kerusakan pemancar hingga siarannya tak bisa diterima hingga ke pendengar, pendengar akan segera melaporkan ke studio. “Orang di studio kan tidak tahu kalau siarannya ternyata bermasalah di udara,” katanya. Contoh lain pengawasan, sambung dia, adalah isi siaran. “Kalau ada yang kurang pas, ya disampaikan ke RRI.”

Menurut dia, RRI harus benar-benar menjadi radio publik. Sebagai media yang menyediakan informasi, program dan siarannya pun wajib menyesuaikan dengan kepentingan orang banyak. Apalagi di pedesaan yang membutuhkan informasi tentang pembangunan di tingkat pedesaan.

Program lain, sambung dia, yang mesti dipertahankan dan dikembangkan adalah seputar seni dan budaya. Banyak pegawai RRI, yang dulunya dinilainya berkompeten terhadap seni dan budaya, kini telah pensiun. Nyaris tak ada lagi regenerasi di bidang itu. Kalaupun ada tersisa, jumlahnya tak banyak. Bukankah dulu, RRI Yogyakarta pernah punya seabrek siaran andalan tentang seni dan budaya? **[Anang Zakaria]**

*Butet Kertaredjasa**

Harus Membaca Zaman



Sosoknya dikenal sebagai Sentilun, seorang pembantu yang ceriwis dan kritis, dalam sebuah tayangan televisi berita nasional. Perbincangannya dengan Sentilan, sang majikan yang diperankan Slamet Rahardjo, menjadi cermin grundelan masyarakat bawah tanpa meninggalkan ciri khas, humor segar yang renyah. Dia adalah Butet Kertaredjasa.

Pemilik nama lengkap Bambang Ekoloyo Butet Kertaredjasa ini lahir di Yogyakarta, 21 November 1961. Ia anak Bagong Kussudiardjo, seorang koreografer dan pelukis senior Indonesia. Malang melintang di berbagai sanggar teater, Butet terlibat membintangi

* Aktor. Mengawali seni perannya

selusin film. Itu belum termasuk belasan pementasan monolog.

“Semua orang yang lahir di masa Orde Baru pasti mengenal RRI,” katanya ditemui di rumahnya, di Bantul, 1 Oktober 2012. Bagaimana tak kenal, sementara media komunikasi belum berkembang sepesat sekarang, RRI adalah stasiun televisi yang memiliki jaringan pemancar terluas di Indonesia. Bahkan, wajib hukumnya tiap stasiun radio swasta yang ada memancarkan luaskan (relay) siaran RRI. “Waktu kecil, saya pernah nyanyi ramai-ramai di studio RRI.”

Pada salah satu periode sejarah, ia menilai, RRI pernah menjadi bagian medan pertumbuhan pelaku seniman. Sejumlah siarannya menjadi unggulan. Sebut saja di antaranya ketoprak, wayang, sandiwara bahasa Jawa, serta obrolan Pak Besut. Popularitas produk kebudayaan seperti itu diakui dan diapresiasi masyarakat melalui siaran itu. Tak heran, sejumlah nama seniman besar tumbuh dari program ini. “Itu orang Jogja yang seusia saya dan (seusia) kakak saya pasti mengenal (program) itu,” katanya.

Tak hanya dari sisi siaran bertema kebudayaan, sebagai stasiun radio utama satu-satunya di Indonesia, RRI adalah sumber utama berita. Dari berita olah raga berkelas internasional hingga berita kematian warga kampung. Ia mengingat, betapa orang-orang berkumpul bersama di satu tempat untuk sekadar mendengar siaran pertandingan Thomas Cup. Di sisi lain, jika ada warga kampung yang meninggal dunia, bisa dipastikan ada seorang warga yang ditugaskan

menghubungi studio RRI, meminta kabar lelayu itu disebarkan luaskan.

“Tidak ada (media) siaran yang lain,” katanya. Di situ pula, RRI menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Namun, ia mengingatkan, dalam periode yang sama, stasiun radio ini menjadi corong pemerintah. “Jadi alat propaganda Orde Baru.”

Ya, mitos dan takhayul pembangunan dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk dengan tindakan represif, pernah dihembuskan dari radio ini. Bahkan, radio ini pernah digunakan sebagai pemerintahan Soeharto untuk menggalang opini publik yang menyudutkan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Hingga sedemikian jahat dan buruknya persepsi anggota PKI di mata masyarakat, salah satu caranya, adalah “karya” RRI. “Jadi punya dosa besar RRI itu,” katanya.

Bagi dia, sebagai radio yang kini mengklaim dirinya sebagai radio publik, RRI harus benar-benar bekerja demi kepentingan publik. Secara tak langsung, dengan menjadi radio publik, RRI sebenarnya mengakui bahwa pada satu masa pernah menjadi media propaganda pemerintah yang berdampak pada terjadinya kejahatan kemanusiaan besar. Dan sebagai konsekuensinya memilih menjadi radio publik, RRI wajib menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat karena telah keliru memilih menjadi corong pemerintah. “Bukanlah keputusan yang keliru kalau RRI berani meminta maaf pada bangsa ini,” katanya.

Meminta maaf atas sebuah kekeliruan, ia mengata-

kan, adalah cerminan media yang mengabdikan pada kepentingan publik. Artinya, inilah mentalitas radio publik. Bukan mentalitas feodal yang menjadi jongsong propaganda pemerintahan. “Adalah suatu kemuliaan (berani) mengakui kesalahan itu,” katanya.

Di sisi lain, jika ingin bertahan di tengah gempuran hiruk-pikuk perkembangan media komunikasi kini, RRI harus sentimentalitas dan nostalgia masa lalu. Bagaimana pun berhasilnya RRI menampilkan program unggulan budaya pada masa lalu, ia mengatakan, RRI tetap bukanlah lembaga kebudayaan. RRI tetaplah media komunikasi yang harus terus bergerak dinamis dalam persaingan zaman. RRI, menurut dia, harus bisa membaca zaman. “Kecuali kalau mau ditinggalkan pendengarnya,” katanya.

Di sinilah dibutuhkan kreatifitas. Kemasannya harus bisa diterima masyarakat. Zaman berubah, pendengar pun juga. Dampaknya, selera dan kepekaan pun berubah. “Tantangannya di situ,” katanya.

Wayang dan ketoprak memang pernah populer karena pada masanya keduanya memang seni populer. Tapi kini? Karena sudah terlampui zaman, produk budaya itu menjadi seni klasik. Kalau pun sekarang ingin membuat membuat programnya populer, ciptakanlah sesuatu yang populer. Jangan memaksakan popularitas masa lalu pada masa kini. **[Anang Zakaria]**

*Bondan Nusantara**

Kethoprak Mataraman Perekat Masyarakat



RRI Yogyakarta mempunyai sejarah panjang dalam mementaskan ketoprak khas Yogyakarta yang bernama ketoprak mataraman. Setiap Rabu malam pukul 22.00 melalui Pro 1 dan Pro 4, RRI menyiarkan cerita kethoprak yang biasanya berseri. Salah satunya berjudul Sang Prameswari yang digubah dari buku karangan SH Mintaredja yang berjudul “Pelangi di Langit Singosari”. Dalam lakon ini, Bondan Nusantara memerankan sebagai Kebo Ijo...

Pada suatu sore hari di bulan Agustus lalu, aktivitas seni di Taman Budaya Yogyakarta (TBY)

* Akivis Seni Rakyat. Pegiat kebudayaan, penulis skenario dan sutradara ketoprak, tinggal di Yogyakarta.

masih berdenyut. Bondan Nusantara (60), seniman kethoprak terkemuka dari Yogyakarta itu datang dengan mengendarai mobil city car-nya. Ia datang untuk mengawasi latihan kethoprak Langen Mandra yang akan dipentaskannya. Ceritanya tentang Minak Jinggo yang menagih janji kepada Raja Brawijaya.

“Biasanya tokoh Minak Jinggo digambarkan buruk, tetapi dalam ketoprak ini saya menggambarkan Minak Jinggo adalah sosok yang gagah dan tampan. Pemberontak itu bisanya berkarisma,” ujarnya sedikit menjelaskan kethoprak yang tengah digarapnya bersama anak-anak muda.

Di Yogyakarta, sosok Bondan Nusantara tentu sudah tidak asing lagi. Seniman berbadan kurus ini adalah orang yang setia menghidupkan seni panggung tradisional Jawa yang bernama kethoprak. Ia juga seniman yang hampir sepanjang hidupnya tidak lepas dari Radio Republik Indonesia (RRI). Kethoprak menjadi ‘mata rantai’ yang senantiasa merekatkan jejak sejarah kehidupannya dengan lembaga penyiaran publik milik pemerintah itu.

“Sejak kecil saya suka mendengarkan RRI karena ada siaran kethopraknya,” ujar Bondan saat bertukar cerita di kantin TBY.

Ia menjadi saksi hidup bahwa sejak dahulu RRI Yogyakarta adalah stasiun radio yang mempunyai kepedulian terhadap pelestarian seni tradisional, khususnya seni ketoprak mataraman. Ciri khusus kethoprak mataraman adalah penggunaan keprak sebagai salah satu instrumen musiknya. Keprak berbentuk kotak

kecil terbuat dari kayu nangka yang didesain khusus sehingga menghasilkan suara khas. Jika dipukul keprak menghasilkan bunyi trothok-trothok yang berfungsi mengiringi atau mengakhiri setiap adegan.

Theresia Kadariyah, perempuan yang melahirkannya ke dunia ini juga seorang pemain ketoprak dan bergabung dalam kelompok kethoprak mataraman RRI Yogyakarta. Kadariyah adalah pemain primadona dalam kelompok kethoprak ini.

Setiap hari Rabu RRI Yogyakarta menyiarkan cerita yang dibawakan kelompok kethoprak ini. Waktu itu, tidak semua orang mampu memiliki radio. Keluarga Bondan termasuk yang beruntung karena memiliki pesawat radio.

“Tiap Rabu, rumah saya di Rotowijayan penuh orang-orang (tetangga) yang mendengarkan siaran ketoprak dari radio,” ungkap Bondan. Suasana rumah Bondan pun menjadi gayeng.

Selain itu kelompok kethoprak mataraman RRI Yogyakarta juga menggelar pertunjukkan di Gedung Perhimpunan Pedagang Batik (PPBI) yang terletak di timur Gedung Bioskop Soboharsono. Pertunjukkan berlangsung tiap satu bulan sekali.

Karena banyak masyarakat yang mengemarinya, kelompok kethoprak mataraman RRI menjadi kelompok kesenian yang populer. Lebih dari itu, kelompok ini menjadi acuan bagi kelompok-kelompok kethoprak lainnya.

“Saat ini meskipun format panggungnya sudah berubah, ketoprak sekarang tidak bisa lepas dari ke-

toprak mataraman RRI karena kelompok ini menjadi acuan dasar,” ungkap Bondan yang belajar seni panggung kethoprak dari ibunya itu.

Menginjak masa remaja di tahun 1960-an, Bondan masih setia mendengarkan RRI. Waktu itu, situasi ekonomi yang sulit memaksa Bondan harus berhenti sekolah sampai SMA saja. Selanjutnya ia bekerja sebagai pemain kethoprak tobong yang berkeliling ke berbagai daerah. Ia pernah ikut kelompok kethoprak tobong Sinar Mataram, Dharma Muda dan Sapta Mandala pimpinan seniman Bagong Kusudiardjo.

Jika sedang berada di luar Yogyakarta, Bondan tetap mendengarkan siaran kethoprak RRI Yogyakarta yang di *relay*. Selain kethoprak, Bondan remaja juga sering mendengarkan tangga lagu-lagu, berita dan sandiwara.

“Salah satu serial sandiwara di RRI yang paling saya ingat adalah yang berjudul Godril karena itu adalah pertama kalinya RRI membuat sandiwara horor,” ungkap ayah dari dua anak ini.

Kini saat Bondan sudah berusia 60 tahun, kecintaannya terhadap kethoprak mataraman RRI tetap tidak luntur. Hampir setiap Rabu siang ia berada di studio RRI Yogyakarta untuk rekaman kethoprak mataraman yang disiarkan hari itu juga pada pukul 22.00 hingga 24.00 melalui RRI Pro 1 dan Pro 4.

Bondan juga masih mau meluangkan tenaga dan waktunya untuk menghidupkan kembali pertunjukkan kethoprak mataraman RRI sejak awal 2011. Ia merasa mempunyai beban moral untuk mempertahankan

kesenian tradisional ini. Dalam pandangannya, kethoprak mataraman RRI adalah ‘ibu’ yang melahirkan seniman-seniman ketoprak saat ini. Maka ia wajib dihormati dan sebisa mungkin dipertahankan kehidupannya.

Sayang, generasi pemain kethoprak mataraman RRI masa lalu hanya tersisa tiga orang yaitu Mbak Suminten, Lestari, dan Hesti. Maka Bondan mengajak seniman-seniman kethoprak lainnya untuk ikut ‘kerja bakti’ menghidupkan kethoprak mataraman RRI ini.

“Saya ajak seniman-seniman yang lain kerja bakti untuk mempertahankan warisan ini sebagai bentuk penghargaan kita kepada para pejuang ketoprak dahulu kala. Dari pada kita (para seniman ketoprak) ketemunya hanya pada saat ada sripah, yuk kita ketemu sebulan sekali untuk pentas kethoprak,” ujarnya.

Maka para pemain kethoprak itu pun bertemu untuk berlatih, paling tidak dua kali sebelum pentas di Gedung RRI, Jalan Gejayan tiap Rabu malam minggu pertama. Total pemain dan pengiring musik mencapai 25 orang. Mereka benar-benar ‘kerja bakti’ karena membawa kostum milik sendiri dan mendapat honor semula hanya Rp 7000.

Setelah pentas beberapa kali, jumlah penonton pun terus bertambah. Jika semula hanya sembilan orang, kini bisa mencapai 300 hingga 350 orang. Menurut Bondan, para penontonnya adalah para orang tua yang sudah saling kenal. Mereka adalah penggemar ‘klasik’ ketoprak mataraman RRI.

“Lucu, karena para penontonnya ada yang mem-

bawa makanan sendiri dan minuman dalam termos,” ungkap Bondan.

Bila semula tiketnya hanya dijual Rp 5000 kini naik menjadi Rp 10.000 dan Rp 15.000. Honor para pemain pun juga naik menjadi Rp 50.000. Sementara Bondan sendiri yang bertindak sebagai sutradara dan mengerjakan banyak pekerjaan lainnya mendapat Rp 100 ribu.

“Sebetulnya ya tombok, tapi ya tidak apa-apa,” ujarnya.

Ada pun tema ceritanya bermacam-macam agar para penonton tidak bosan. Selain mengangkat cerita-cerita klasik, Bondan juga menyuguhkan cerita carangan dan cerita karangannya sendiri.

Untuk menarik penonton, seniman yang tinggal di Kasongan, Bantul ini juga memanggil seniman tradisional yang sudah punya nama seperti Didik Nini Thowok, Joned dan lain sebagainya. “Tetapi saya selalu mengatakan ini adalah ‘kerja bakti’ dan mereka juga rela tidak mendapat bayaran,” urai Bondan.

Namun sayang, Bondan masih merasa RRI Yogyakarta belum mendukung sepenuhnya kebangkitan ketoprak mataraman RRI. Padahal para seniman sudah mau mengorbankan tenaga dan waktunya. Buktinya, ungkap Bondan, para seniman hanya mendapat honor Rp 25 ribu tiap kali rekaman.

“Kok ya kasihan cuma dikasih Rp 25 ribu,” ujarnya prihatin.

Ia tidak tahu persis apakah karena anggarannya kecil atau kethoprak mataraman dianggap tidak pen-

ting. Padahal dalam pandangan Bondan, seharusnya RRI sebagai media siaran publik yang mempunyai daya jangkauan luas perlu memelihara kesenian tradisional ini agar tidak lenyap ditelan hingar-bingarnya kebudayaan pop yang terus dipompa dari luar Indonesia.

“Kita sudah mau kerja bakti, diberi perhatian atau tidak itu kan terasa,” paparnya.

Seandainya RRI Yogyakarta memang mempunyai komitmen, ungkap Bondan, lembaga itu bisa memberikan anggaran besar sehingga ia bisa menarik anak-anak muda untuk giat berlatih dan mementaskan keoprak mataraman RRI. Tanpa mendapat imbalan yang sepadan, ia berpendapat mustahil mengajak anak-anak muda mau menggeluti seni pertunjukkan tradisional ini.

Ia sendiri berpendapat, untuk menarik anak-anak muda, tidak mungkin mengubah pakem dan ‘rumus’ ketoprak mataraman. Misalnya mengganti tembang Jawa dengan lagu hip-hop kesukaan anak-anak muda zaman sekarang.

Bondan Nusantara memang sedang bergulat dengan waktu. Kini apa yang dilakukannya dengan ketoprak mataram RRI hanya sekedar mempertahankan kesenian tradisional ini hingga para pemainnya hilang satu persatu. Hanya sekedar ‘museum’ dan tidak ada regenerasi.

“Ya tragis karena memang tidak ada kepedulian,” ungkapnya.

Bagaimana RRI? **[Bambang Mulyanto]**

*Duryat Subekti**

Siaran Budaya Bisa Jadi Andalan



Hari beranjak malam. Di rumah sederhana itu, suara Radio Republik Indonesia (RRI) terus bergema, menemani sosok paruh baya yang tak kunjung tertidur lelap. Materi siaran dipantaunya dengan saksama, seakan ingin memastikan, tidak ada kesalahan

berarti pada siaran itu.

Inilah rutinitas Duryat Subekti, saat ia dipercaya sebagai manajer siaran pada medio tahun 2000. Ketika menjabat Kepala RRI Sumenep di tahun berikutnya, pria ini pun melakukan hal serupa. “Dalam sehari, hampir 24 jam waktu saya habiskan untuk memantau

* Mantan Penyiar RRI, pernah menjabat sebagai Kepala RRI Sumenep pada tahun 2000.

siaran RRI. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya kepada profesi,” ujarnya bernostalgia.

Keterlibatannya berpuluh tahun di RRI menjadikan Duryat sangat mengenal lembaga ini. Mulai persoalan program hingga masalah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi RRI sangat dikuasainya.

Soal program misalnya, menurut pria berusia 65 tahun ini belum sepenuhnya ditata dengan baik. Ia mencontohkan masih seringnya terjadi “persaingan” berita antara Programa 1 yang konsen pada informasi lokal, dengan Programa 3 yang merupakan siaran berita nasional.

Sebaiknya, Programa 3 memasukkan semua berita di dalam siarannya, baik nasional maupun lokal. Ada jam-jam tertentu yang dialokasikan kepada daerah untuk menyampaikan berita lokal. Misalnya, satu jam di pagi hari, dan satu jam di malam hari. Dengan begitu, Programa 3 tidak didominasi oleh Pusat, dan daerah memiliki *space* khusus, bukan waktu sisa di malam hari, sebagaimana dipraktekkan RRI selama ini.

Adapun Programa 1 lebih konsen pada informasi khas daerah masing-masing. “Sebagai Kota Pendidikan, Yogyakarta bisa memfokuskan diri pada informasi tentang dunia pendidikan, lengkap dengan dinamikanya. Begitupun daerah lain dengan cirinya yang berbeda” jelasnya.

Namun, Kepala Bidang Penyelenggara Siaran RRI era tahun 2000 ini berpendapat, Programa 4 yang notabene menyiarkan program budaya, sangat potensial untuk dikembangkan di masa mendatang.

“Ini bisa menjadi program andalan RRI, karena radio swasta tidak ada yang memiliki konsen ke sana,” ungkapnyanya.

Selama ini Programa 4 masih menyiarkan acara yang menurutnya tumpang tindih. Mulai dari penggunaan bahasa daerah yang masih bercampur, hingga relai berita dari Programa 3 yang masih saja dilakukan. Padahal, tanpa direlai pun Programa 3 bisa didengarkan di seluruh tanah air.

“Programa 4 seharusnya menonjolkan budaya lokal. Di Jawa misalnya, mulai dari buka hingga tutup siaran konsisten menggunakan bahasa Jawa. Di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, dan siaran di Sumatera memakai bahasa Minang. Ini sekaligus bertujuan melestarikan budaya lokal,” jelasnya.

Sosok yang mengabdikan diri di RRI sejak tahun 1970 ini khawatir, budaya lokal akan punah bila tidak dikenalkan secara *intensif*. Apalagi menurutnya, anak muda sekarang sudah mulai tidak mengenali bahasa ibu-nya, yang berdampak pada ketidaktahuannya tentang budaya sendiri.

“Bahasa Jawa di luar negeri itu sangat dihargai, tapi justru di dalam negeri sendiri diabaikan. Saya khawatir, beberapa tahun lagi orang yang ingin belajar gamelan harus meminta instruktur dari luar negeri,” jelasnya prihatin.

Pria kelahiran Yogyakarta ini mengungkapkan, RRI sebenarnya bisa memanfaatkan daerah wisata yang ramai dikunjungi untuk mengenalkan budaya lokal. Kawasan Malioboro misalnya, dikunjungi

oleh wisatawan yang berlibur di Yogyakarta. “Saya mengangankan, RRI bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk memutar Programa 4 yang berbahasa Jawa di sepanjang Malioboro. Selain mempopulerkan Programa 4, nuansa Jawa di kawasan ini pasti akan terasa,” jelasnya.

Duryat yakin, jika setiap programa fokus menangani bidangnya, maka tidak akan ada lagi campur baur pendengar. Masyarakat yang suka budaya amemutar Programa 3, dan warga yang ingin mendengarkan informasi lokal akan memilih Programa 1. Tak ketinggalan, anak muda pun dapat mendengarkan Programa 2 yang khusus menyiarkan dunia anak muda.

Dalam hal SDM yang dimiliki RRI, sosok yang mengkhiri karirnya di Sumenep, Madura ini mengakui belum ideal. Sejak RRI masih di bawah Departemen Penerangan (Deppen), banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang sebetulnya tidak dibutuhkan namun dimasukkan ke RRI. Akibatnya, mereka banyak yang menumpuk di adminsitasi.

“Saat RRI butuh penyiar dan tidak ada lagi SDM, terpaksa tenaga administrasi yang tidak memiliki *skill* ini didaulat menjadi penyiar. Inilah salah satu penyebab kualitas siaran RRI semakin menurun. Belum lagi tenaga yang direkrut belakangan ini juga masih memiliki bekal yang minim di bidang siaran,” akunya.

Ia menggambarkan, untuk menjadi penyiar di masanya, seseorang harus melalui sejumlah tahapan seleksi yang tidak mudah. Untuk berbicara pun

waktunya diatur berdasarkan hitungan detik. Bahkan, kesalahan dalam membaca berita bisa berbuah pemecatan.

Persoalan lain yang menurutnya terus terjadi adalah adanya tenaga PNS dan non PNS di lembaga penyiaran publik ini. Bagi PNS yang dipekerjakan di RRI, jenjang karir maupun kesejahteraannya sudah diatur secara rinci. Namun bagi non PNS, ketidakjelasan nasib dan karir itu masih terus menghantui hingga saat ini. Bagi Duryat, tidak penting apakah orang itu PNS atau non PNS, asalkan jaminan karir dan kesejahteraannya jelas.

Selain itu, masalah klasik tentang mentalitas PNS juga terjadi di RRI. Aturan yang sangat longgar dan sanksi yang sangat lemah seringkali menjadikan tenaga berstatus PNS tidak bekerja maksimal.

Karena itu penataan terhadap tenaga operasional ini menurut Duryat perlu dilakukan segera. Termasuk meningkatkan kemampuan mereka. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipikirkan oleh RRI di masa-masa mendatang.

Seiring dengan semakin meningkatnya anggaran negara untuk RRI akhir-akhir ini, pria yang berdomisili di Nogotirto, Sleman ini menilai ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah infrastruktur dan jaringan yang dimiliki RRI bisa semakin membaik. “Namun kekurangannya justru karena RRI punya anggaran, diliputi kepastian pendanaan, sehingga pelaksanaannya pun tidak begitu terpacu untuk berbuat maksimal,” ungkapnya.

Berbeda dengan radio swasta yang menurutnya tidak memiliki anggaran tetap sehingga hasilnya sangat bergantung pada usaha dan inovasi yang dilakukan. Inilah yang memacu mereka untuk maju dan berkompetisi dengan radio lainnya.

“Peningkatan anggaran untuk RRI saat ini tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas siarannya. Secara logika, anggaran kan harus mendukung siaran sebagai produk utama RRI,” terang pria yang menghabiskan 38 tahun di RRI. “Kalau kualitasnya justru tidak lebih bagus, berarti ada sesuatu yang tidak benar. Kendalanya apa tentu orang dalam yang lebih tahu,” tambahnya.

Ia berharap, sebagai lembaga yang sejak berdirinya ikut berjuang untuk bangsa dan negara, RRI dapat memaksimalkan perannya dalam melayani publik. Dengan dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang ditunjang oleh kualitas SDM yang *mumpuni*, dia yakin RRI bisa menghasilkan siaran yang berkualitas, khususnya dalam memberikan penguatan pada program pelestarian budaya bangsa. Hanya dengan itulah RRI dapat semakin kokoh sebagai radio publik. [Masjidi]

Berdaya dan berbudaya

Kompilasi foto oleh:
Heru Lesmana Syafei & Darmanto

Gedung peninggalan koloni Belanda di Jalan Ahmat Jazuli kawasan Kota Baru itu masih tegak berdiri. Tanpa kesan rapuh, karena rajin dicat. Di dalamnya beroperasi empat programa RRI Yogyakarta, stasiun radio yang merupakan perintis lahirnya RRI nasional.

Seperti jugagedungnya, RRI Yogyakarta pun senantiasanya memoles diri. Selalu mengikuti perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri. Semua bagian dipoles, manusianya, peralatannya, dan program-programnya. Konvergensi media, yang menjadi tuntutan untuk tetap bertahan di dunia komunikasi massa dewasa ini, pun dipraktekkan.

Sejak 2011, secara efektif siaran semua programa RRI Yogyakarta dapat disimak lewat internet, alias *live streaming*. Lengkap dengan gambar dari ruangan studio, seolah menonton televisi. Anda bisa mengaksesnya pada alamat <http://rrijogja.co.id/streaming/video>.

php. Konten websitenya juga cukup update. Tak kalah dengan radio komersil lainnya.

Secara prasarana berdaya, secara program berbudaya. Budaya Yogyakarta masih kental mewarnai program-programnya. Selain program berbahasa Jawa, dan kesenian tradisi, ada juga program pendidikan yang menggandeng pelajar.

Bagian I RRI Yogyakarta



Jajaran Programa di RRI Yogyakarta



Operator



Tepat Waktu



Pintu Master Control



Pintu Studio 4



Tiga pelajar dari SMPN 8 Kota Yogyakarta menjadi tamu pada acara “Fun English” di RRI Yogyakarta, Jumat sore, 28 September 2012.



Penyiar acara “Fun English”, Acha, selalu berusaha membuat suasana interaktif dengan pendengar yang didominasi remaja.



Penyiar Panorama Jogja, Meiri Braniwati, senior yang selalu update dengan selera musik anak muda terkini.



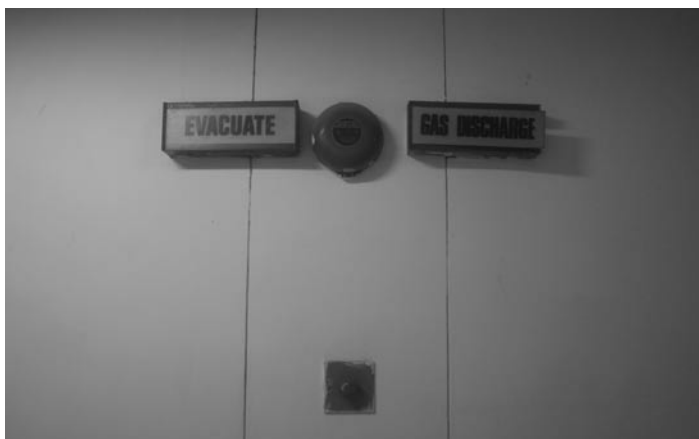
Ust. Nurul Huda, dari “Rumah Dai”, menjadi pemateri pada acara Spirit of Islam, setiap hari Jumat menjelang Maghrib.



Penyiar acara “Kesenian Tradisional”, Pakde Kamto, di Studio 4 RRI Yogyakarta.



Ruangan pengendali utama semua programa yang aktif di RRI Yogyakarta.



Tanda peringatan dan evakuasi bahaya warisan Belanda di dalam gedung RRI Yogyakarta



Tim RRI Yogyakarta berusaha merakit uplink (alat pengirim suara lewat satelit), agar dapat mengirim laporan, pada malam hari, selama masa erupsi Gunung Merapi, di Kecamatan Cangkringan, Sleman, tahun 2010.



Redaktur RRI Yogyakarta, Edi Maryanto (di dalam mobil), turut memberdayakan kendaraan miliknya pribadi demi kelancaran tugas tim RRI Yogyakarta, selama masa erupsi Gunung Merapi, di Kecamatan Cangkringan, Sleman, tahun 2010.



Wartawan RRI Yogyakarta, Wahyu Suryo (kanan), mewawancarai tim Undang Undang Keistimewaan (UUK) DIY, Kusumo Prahasto, di lingkungan Komplek Kepatihan, 2012.



Wartawan RRI Yogyakarta, Yustina Wigati (kanan), mewawancarai tim asistensi Undang Undang Keistimewaan (UUK) DIY, Achiel Suyanto, di lingkungan Komplek Kepatihan, 2012.



Direktur Utama RRI, Niken Widiastuti, berinteraksi dengan anak-anak pengungsi selama masa erupsi Gunung Merapi, di Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, tahun 2010.

Bagian II RRI Tahun 1926 - 1995



Sebuah gerobak yang berisi peralatan radio milik Batavia Radio Asosiasi (BRV) yang digunakan untuk siaran. Batavia, Hindia Belanda, 1926. Sumber : www.gahetna.nl



Gedung Nirom (Nederlandsch Indische Radio Omroep, sekarang RRI) di Jalan Medan Merdeka Barat 5, 9 Mei 1949. Sumber : www.bataviadigital.pnri.go.id



Solosche Radio Vereniging (SRV) adalah siaran radio pertama di Indonesia yang didirikan bukan oleh orang Belanda. SRV didirikan oleh K.G.P.A.A Mangkunegoro VII dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo. Sumber: www.baltyra.com



Praboe Soeriodilogo dan Sultan HB VIII MAVRO
Koleksi: Darmanto



Sdr. Soedarmadisebagaipenjiar “Mavro” berpakaian Djawalengkapdjika hendak berdinasi di Kraton. Jang pakai dasi adalah sdr. Soedomomarto dan disampingja pakai “Sundjan” (badju Jogjakarta) sdr. Soekirni. Sumber Repro: “Sejarah Radio di Indonesia”, Kementerian Penerangan - Djawatan Radio Republik Indonesia, tahun 1953, halaman 91.



SOEARA MAVRO: TOKOH-TOKOH KETOPRAK MATARAM “TEMPO DOELOE”: (kiri ke kanan): Glinding, Noto, Tjokrodjijo dan pelawak Tembong sedang serius berdiskusi. Koleksi: RCS. Hadisukamto. Sumber Repro: “RRI NUSANTARA II YOGYAKARTA, BERGULAT DALAM KARYA, memasuki 40 tahun hari radio”, tahun 1985, halaman 62



Sebuah prasasti batu yang di Ndalem Ngabean, prasasti ini berbunyi: “*Di tempat ini di Ndalem Ngabean sebagai saksi sejarah, berkumandanglah pemancar radio Mavro sebagai perintis Radio Republik Indonesia Nusantara II Yogyakarta Membawa Suara Cita-cita kemerdekaan*” demikian tulisan sebuah prasasti yang diberi tanggal 22 Februari 1934-1942 ini.



Karangan Bunga peresmian Gedung RRI di Code. Koleksi: Darmanto (dari Hadisoekamto)



Gedung NV Nillmij (Kantor Asuransi) tampak di latar belakang, belum berubah sampai sekarang. Zaman pendudukan Jepang digunakan sebagai Kantor Penerangan/Radio. Memasuki kemerdekaan RI dipakai sebagai gedung RRI Yogyakarta. Sekarang digunakan Kantor Bank BNI 46 Yogyakarta. Sumber : www.dooney285.wordpress.com



Gedung De NILLMY van 1859 yang sekarang menjadi gedung BNI 46 Yogyakarta. Sumber : www.masoye.multiply.com



Kecamatan Plajen (Wonosari - Jogjakarta) hantjur waktu clash ke II, dan disinilah pemantjar gerilja RRI bekerdja. Sampai sekarang (Djuli 1953) gedung itu belum dibangun kembali. Sumber Repro: "Sejarah Radio di Indonesia", Kementerian Penerangan-Djawatan Radio Republik Indonesia, tahun 1953, halaman 91.



Sultan Hamengkubuwono IX (tengah), bersama Paku Alam VIII (kiri), meninjau akibat pemboman Belanda terhadap Studio RRI Yogya. (Reproduksi dari: Buku Tahta Untuk Rakyat). Sumber Repro: "RRI NUSANTARA II YOGYAKARTA, BERGULAT DALAM KARYA, memasuki 40 tahun hari radio", tahun 1985, halaman 16



Hari Angkatan Perang jang pertama dirajakan besar-besaran di Alun2 Jogjakarta. Dan penjerahan pandji2 pada 10 Divisi diwaktu itu (1946). Bang Bedjat atau bekas Menteri Sosial Anwar Tjokroaminoto, masih mendjadi Djuru bitjara Tentera. Sdr. Soemarmadi membantu tugas sdr. Darmosoegondo, Pelopor Pandangan Mata.

Sumber Repro: "Sejarah Radio di Indonesia", Kementerian Penerangan - Djawatan Radio Republik Indonesia, tahun 1953, halaman 90



Pemimpin Bagian Siaran RRI Politiknja, Siaran untuk kepentingan Bangsa dan Negeranja. Sumber Repro: "Sejarah Radio di Indonesia", Kementerian Penerangan - Djawatan Radio Republik Indonesia, tahun 1953, halaman 260



Sri Sultan HB IX (kedua dari kiri) sebelum pidato di RRI, Jalan Ahmat Jazuli. Koleksi: Darmanto (dari Hadisoekamto)



Kepala RRI Hadisoekamto (berdiri). Koleksi: Darmanto

TERTAWA LEGA. Setelah bertahun-tahun merintis pemberian status seniman/ seniwati RRI Nus.II Yogyakarta menjadi pegawai negeri, ternyata berhasil. Menpen Ali Murtopo (alm) tampak mengenakan cincin “Api Nan Tak Kunjung Padam” pada jari manis Pak Besut (alm) di Bangsal Kepatihan Yogyakarta pada upacara pengangkatan sejumlah seniman/ seniwati RRI Nus. II Yogya menjadi pegawai negeri sipil tgl. 27 Agustus 1981. Di antaranya Pak Besut diangkat langsung diberhentikan dengan hak pensiun karena usia lanjut.



Sumber Repro: “RRI NUSANTARA II YOGYAKARTA, BERGULAT DALAM KARYA, memasuki 40 tahun hari radio”, tahun 1985, halaman 67



Sempat Menpen H. HARMOKO didampingi Kepala Stasiun RRI Nus. II, SISWADI, menjenguk Pak Besut (alm). Sumber Repro: "RRI NUSANTARA II YOGYAKARTA, BERGULAT DALAM KARYA, memasuki 40 tahun hari radio", tahun 1985, halaman 68.



Setiap Minggu Malam, para pecinta Sandiwara Radio Dhaerah senantiasa menunggu Keluarga Yogya. Namun bagaimana sebetulnya "dapur" acara ini? Tampak saat pemain rekaman suara untuk acara menarik tersebut, sutradara Sumardjono memberi arahan pada pemain. Sumber Repro: "RRI NUSANTARA II YOGYAKARTA, BERGULAT DALAM KARYA, memasuki 40 tahun hari radio", tahun 1985, halaman 70.



TOKOH-TOKOH KETOPRAK MATARAM “TEMPO DOELOE”:
(kiri ke kanan): Glinding, Noto, Tjokrodjijo dan pelawak Tembong sedang
serius berdiskusi. Koleksi: RCS. Hadisukamto. Sumber Repro: “RRI
NUSANTARA II YOGYAKARTA, BERGULAT DALAM KARYA,
memasuki 40 tahun hari radio”, tahun 1985, halaman 62



Suasana kantor RRI Jalan Secodiningratan (Panembahan Senopati)
Koleksi: Darmanto (dari Hadisoekamto)



Peralatan Ruang Rekaman tahun 1960 di Gedung RRI Jalan Ahmat Jazuli.
Koleksi: Darmanto (dari Hadisoekamto)



Gedung RRI Yogyakarta, Jalan Amat Jazuli No. 4 Yogyakarta, 1960.
Koleksi: Darmanto



REPRO RRI Nusantara II Yogyakarta 1995: Jl. Ahmat Jazuli No. 4 Yogyakarta Kode Pos 55224 . Sumber Repro: "Antena RRI Stasiun Nasional - IDT Radio", Edisi Khusus Hari Bhakti RRI ke 50, tahun 1995, halaman 44

Selamat Datang Era Keempat RRI



Pembaca yang budiman. Setelah ada beberapa revisi, tulisan yang pernah dimuat di harian Kompas edisi Yogyakarta, bulan Oktober 2006 ini, kami sertakan kembali dalam buku Radio Melintas Zaman. Maksudnya, untuk menegaskan ‘benang merah’ pemikiran yang ada tahun 2006 dengan situasi aktual tahun 2012. Berikut

tulisannya:

Momentum hari ulang tahun ke-61 Radio Republik Indonesia (RRI) tanggal 11 September memiliki makna mendalam ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya oleh dua hal. Pertama untuk pertamakalistasuunradiotertuadanterbesardiIndonesia itu menyatakan diri sebagai lembaga penyiaran publik. Kedua untuk pertamakali pengelolaan dibawah Dewan Pengawas sebagai amanat dari UU. Meskipun sudah sejak tiga tahun terakhir gema slogan “radio publik

milik bangsa” berkumandang namun secara resmi logo RRI dan orientasi siarannya dinyatakan sebagai media penyiaran publik baru dimulai tahun 2006.

Barangkali hanya terjadi di Indonesia sebuah stasiun radio mengalami metamorfosa hingga tiga kali. Angin rebut reformasi tahun 1998 merubah secara drastis status kelembagaan dan orientasi operasional RRI. Identitas sebagai stasiun radio plat merah tamat secara yuridis seiring keluarnya UU No. 32/2002 tentang Penyiaran. Meskipun akhirnya TVRI dan RRI menjadi media penyiaran publik hingga saat ini, namun dalam masa transisi antara 1998-2004 pemerintah telah menetapkan TVRI sebagai perseroan terbatas dan RRI sebagai perusahaan jawatan. Sebuah opsi yang menunjukkan kebingungan sikap atas status lembaga tersebut, apakah akan secara murni diliberalisasi atau dipublikisasi.

Secara historis RRI memiliki empat era yang menunjukkan kuatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi eksternal terhadap nasib lembaga ini. Era pertama ketika RRI lahir dan dijadikan sebagai alat menyebarluaskan semangat kemerdekaan pada tahun 1945. Gelora nasionalisme yang kuat menyatu dengan kekuatan RRI sebagai radio yang mampu mengakses pelosok. RRI menjadi media menyuarakan kemerdekaan dari kolonialisme. Era ini hanya bertahan hingga konsolidasi rezim Soekarno kuat dan ketika berlaku kebijakan demokrasi terpimpin. RRI menjadi media propaganda politik elit yang berkuasa sejak rezim Soekarno berkuasa penuh dan diteruskan

hingga era Orde Baru.

Era propaganda kekuasaan merupakan anti-klimaks dari era media sosialisasi kemerdekaan dan berakibat pada merosotnya popularitas RRI sebagai media milik publik. Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 mempengaruhi status dan orientasi pengelolaan RRI. Dari media yang dikuasai rezim Soeharto menjadi media yang secara politis “mengambang” seiring bubarnya instansi induknya Departemen Penerangan. Era ketiga ini menempatkan RRI terombang ambing dari media organik yang berpusat pada sistem pemerintahan yang relative masih otoriter di era Habibie dan Gus Dur dengan menjadi media komersial.

Pilihan menjadi media komersial yang tetap dibiayai pula oleh pemerintah akhirnya menjadi terwujud dalam status Perusahaan Jawatan. Sekali lagi era ini tidak menempatkan posisi public sebagai aktor dominan. Baik kekuatan Negara maupun pasar adalah kekuatan yang merepresi public tercermin dari kuatnya program yang memberi ruang lebih besar kepada seremoni pemerintah disatu sisi dan kuatnya program yang mewadahi eksperimentasi pengiklan dan pemodal lain yang mampu membayar jam siar untuk promosi. Pergeseran status dan orientasi pengelolaan RRI sudah terjadi beberapa tahun sebelum keluarnya UU No. 32/2002.

Sejarah RRI sesungguhnya adalah sejarah sebagai medium untuk propaganda kekuasaan dan proteksi kekuasaan. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemilihan program, penekanan fokus isu,

diskusi lewat orang terseleksi kekuasaan, hingga menghindari penyiaran yang bersifat kritis. Ini terjadi karena status dan perannya di bawah Departemen Penerangan. Bahkan di era mantan Presiden Habibie, yang ditandai peran kuat radio swasta lokal dan berjejaringan dan dibukanya pers bebas oleh Menteri Penerangan, RRI belum sepenuhnya menggunakan periode ini untuk mengubah peran. Alias tetap lebih berpihak pada kekuasaan. Hanya pada program-program tertentu berusaha lebih obyektif dan melayani kepentingan umum. Sebutlah siaran langsung pemilu ataupun Sidang Umum.

Mengutip pernyataan budayawan Garin Nugroho, sejarah sistem komunikasi Indonesia senantiasa berkait dengan dua karakter utama yakni radio dan TV swasta dan publik. Televisi dan radio swasta senantiasa berkait dengan perspektif sejarah kapitalisme, yakni suatu sistem produksi komoditas yang menjadikan korporasi swasta mampu memaksimalkan keuntungan mereka lewat sistem pensponsoran program-program di televisi swasta yang sesuai dengan target pasar komoditasnya. Meski demikian, patutlah dicatat, Amerika mampu mensintesis kapitalis dan struktur demokratisasi lewat kultur televisi.

TV swasta di Indonesia meski dalam perspektif tertentu menjadi media yang mempunyai peranan penting pada reformasi lewat liputannya yang terbuka dan berani, namun keterikatannya pada iklan, menjadikannya memiliki berbagai kendala dalam menciptakan kultur demokrasi di Indonesia. Ditengah

situasi inilah, TV dan radio publik mengambil peluang eksistensi. Artinya, radio dan televisi publik dengan program-programnya melayani nilai-nilai keutamaan bangsa sehingga masyarakat mampu mengakses informasi, hiburan, pendidikan, kebudayaan dan kultur demokrasi yang sehat. Radio dan TV publik berpihak pada isu minoritas, sebutlah gender, hingga hak anak yang tidak populer bagi kepentingan iklan, namun bernilai untuk pertumbuhan berbangsa, perlindungan hak asasi manusia.

Penting dicatat, pilihan menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan keputusan strategis dan tepat bagi Indonesia. Namun demikian, tidak hanya perubahan status yang dibutuhkan, tetapi perubahan manajemen dengan mengadopsi berbagai model yang sudah berkembang di luar negeri, kemudian memformulasikannya dengan karakter lokal Indonesia yang multikultur. Dua persoalan besar yang harus diagendakan RRI adalah pertama bagaimana merubah stigma yang masih kuat di publik bahwa radio ini media organik pemerintah dengan segala peran propagandisnya. Ini harus dilakukan dengan meraih sebanyak mungkin partisipasi publik untuk mengisi program siaran RRI tanpa tendensi untuk akumulasi kebutuhan modal atau akumulasi kebutuhan akses politik kepada elit lokal. Kedua merubah pola interaksi budaya kerja dan pelayanan kepada publik dari klien menjadi mitra. Sebagai corong kepentingan publik insan RRI harus menempatkan diri sebagai pelayan kepentingan publik lokal. **[Masduki]**

Epilog

Indonesia seperti apakah yang akan kita dan anak cucu kita saksikan di masa kini dan ke depan? Apakah Indonesia yang penuh damai dengan kesejahteraan yang merata bagi rakyatnya. Apakah Indonesia yang memiliki rakyat dan pemerintah yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Atau justru justru sebaliknya? Pertanyaan kini menjadi penting, ketika hanya dalam beberapa dekade saja, manusia di bumi menyaksikan peristiwa-peristiwa besar dunia. Sebagian diantaranya amat berdarah sebagian lain berlangsung damai. Indonesia, bagaimanapun menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari peristiwa-peristiwa itu.

Generasi usia 50-60an tahun, yang dididik dalam suasana politik dunia yang bipolar, banyak yang tidak membayangkan bagaimana negara Uni Soviet bisa bangkrut secara ekonomi karena perang di Afganistan. Lalu runtuh, dan pecah menjadi beberapa negara. Rezim-rezim otoriter di Eropa Timur seperti Yugoslavia, Rumania, Jerman Timur kemudian meng-

ikuti bangkrut dan pemerintahan bubar. Sesudah periode itu, diikuti pula dengan runtuhnya penguasa di negara lain, dan Indonesia adalah salah satunya. Pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Suharto tumbang melalui gerakan reformasi, dan sistem pemerintahan baru yang lebih demokratis menggantikan.

Sebagaimana para banyak generasi tua tidak membayangkan bangkrutnya Uni Soviet, di Indonesia pun banyak pihak tidak membayangkan bergantinya rezim. Tetapi kemudian dipahami bahwa teknologi informasi memungkinkan perubahan dunia. Teknologi informasi memungkinkan apa yang terjadi di satu sisi dunia dengan amat cepat diketahui manusia di sisi dunia yang lain. Dan apa yang terjadi menggulirkan dampak dan menciptakan perubahan yang cepat. Kita kini menyaksikan bahwa superioritas politik, ekonomi, juga kultur yang dimiliki negara-negara besar, bisa begitu relatif. Kita saksikan saja, begitu Uni Soviet bubar, Amerika Serikat sempat menjadi satu-satunya negara paling kuat di dunia. Tetapi, hanya dalam beberapa tahun, pengaruhnya secara pasti menjadi surut.

China meskipun secara politik belum mampu menggantikan peran Amerika, tetapi secara ekonomi, kini memiliki peran paling kuat. Tetapi jika nanti China jadi nomor satu dunia, akan bisa bertahan sampai kapan? Apa yang terjadi pada Uni Soviet yang runtuh karena mengalami kebangkrutan ekonomi, karena perang berkepanjangan di Afganistan, ternyata

tidak menjadi pelajaran mudah bagi Amerika Serikat, ketika melakukan perang di Irak dan Afghanistan pasca tragedi peledakan gedung menara kembar WTO. Perang tersebut merusak ekonomi Amerika Serikat. Joseph Stiglitz, peraih nobel ekonomi yang menulis sebuah buku mengenai ini, menyampaikan fakta-fakta bagaimana kemampuan negaranya tidak lagi kompetitif, karena perang senilai 3 Triliun dollar itu, membuat ekonomi Amerika Serikat surut.

Surplus ekonomi yang dimiliki Amerika di masa presiden Bill Clinton, yang menjadikan Amerika sebagai superpower dunia sesungguhnya, dengan cepat berubah defisit di masa presiden George W. Bush, dan banyak pihak tidak yakin ekonomi Amerika Serikat akan bisa pulih pada masa presiden Obama maupun presiden sesudahnya. Berbarengan dengan krisis yang menimpa Amerika Serikat, Eropa Barat pun mengalami krisis ekonomi yang berat. Negara-negara penopang utama zona Euro seperti Jerman, Perancis, Spanyol dan Italia terkena impas. Spanyol bahkan mengalami krisis ekonomi parah. Sementara negara Yunani dan Portugal sudah lebih dahulu bangkrut. Sampai tulisan ini ditulis, para ekonom makro masih belum mampu menjelaskan akhir dari krisis ini bagi Eropa dan Amerika.

Tetapi, dampak krisis dengan segera sudah dirasakan oleh Indonesia. Misalnya, eksportiga bahan mentah Indonesia seperti batu bara, sawit dan karet, menurut drastis atau mandeg. Implikasi dari penurunan nilai ekspor ini pasti adalah ke soal pertumbuhan ekonomi

yang menurun, pendapatan nasional yang berkurang dan pada gilirannya pada kekhawatiran tidak akan mampunya pemerintah menjaga ekonomi Indonesia, yang berdampak pula pada stabilitas sosial dan politik Indonesia. Ancaman krisis sosial sebagai ikutan krisis ekonomi sedikit banyak membayang. Tetapi, dengan pengalaman menangani krisis ekonomi 1998 dan krisis ekonomi sesudahnya, maka ketakutan berlebihan atas dampak krisis itu tidak terjadi saat ini.

Apakah tidak ada agenda penting lain dalam pengelolaan ekonomi Indonesia selain memperbincangkan peluang dan tantangan jangka pendek ekonomi makro Indonesia?

Soal membicarakan peluang jangka menengah dan panjang ekonomi Indonesia, amat banyak disampaikan para ekonom non pemerintah, dan disampaikan pula secara terus menerus oleh media massa. Para jurnalis, meskipun sebagian besar tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi, tetapi, pada kenyataannya banyak dari mereka menulis berita ekonomi secara benar, dengan mengungkapkan bagaimana sebagian besar rakyat bergerak secara mandiri, dengan sedikit fasilitas pemerintah atau bahkan sering tanpa fasilitas sama sekali.

Para jurnalis juga lebih sering memberitakan karya-karya besar dan monumental orang-orang Indonesia di dalam dan luar negeri, dan secara pelan namun pasti, ada kesadaran, bahwa bangsa Indonesia adalah jenis bangsa yang bisa menjadi besar dengan peradaban besar dan akan mampu menjadi sederajat

dengan bangsa Eropa, Amerika, Jepang, Cina, India maupun Rusia, maupun Arab-Israel. Perkara ini masih terlalu banyak orang miskin di Indonesia, akan mampu dipecahkan dengan pengelolaan ekonomi makro yang benar. Sebagaimana pernah disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sayang pengelolaan makro ekonominya tidak sebaik Malaysia, sehingga banyak orang miskin. Jika pengelolaan makro ekonominya beres, maka bukan tidak mungkin, Indonesia akan memberi sumbangan lebih besar pada dunia.

Tetapi, dari manakah kita memulai membangun Indonesia sebagai negara dan bangsa besar itu? Marilah kita runut dari perjalanan kita sebagai bangsa pada jarak sejarah yang pendek, yaitu mulai pada masa awal kemerdekaan hingga kini.

Imaji Indonesia

Indonesia didirikan tidak hanya dengan darah para pahlawan yang gugur maupun oleh keringat rakyat, tetapi juga karena ada ide-ide besar dari para bapak bangsa. Ide tentang Indonesia tidak lahir dengan tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang. Sukarno, Hatta juga Tan Malaka, sebagai tiga orang bapak bangsa yang diambil contoh disini, melahirkan pemikiran melalui dialektika yang panjang prosesnya. Mereka membaca dan mendalami pikiran dari berbagai bangsa lain. Tetapi perjalanan bergaul dengan rakyat dengan

penderitaannya, menjadikan apa yang mereka sampaikan orisinil adanya. Kumpulan ide dari para pemikir pelaku itulah yang kemudian menjadikan Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai negara bangsa. Para bapak bangsa itu, di luar memiliki tujuan yang sama dalam usaha mencapai kemerdekaan, mereka juga memiliki perbedaan pandangan dalam ideologi, maupun strategi. Soekarna misalnya, lebih suka menggunakan strategi penggalangan massa dan diplomasi. Hatta lebih memilih strategi pendidikan politik yang sistematis untuk rakyat dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Sementara Tan Malaka yang lebih memilih strategi konfrontasi. Meski dalam strategi mereka berbeda, tetapi mereka bersepakat dalam mewujudkan ekonomi yang kuat. Ekonomi yang direncanakan atas dasar dasar gotong royong, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik spiritual maupun materil, dengan pengembangan budaya Indonesia serta menolak kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia waktu itu, maka pemerintah maupun partai-partai lebih menekankan dimensi politik untuk memperkuat negara dan membangun dukungan masyarakat internasional.

Dalam situasi hiruk pikuk mempertahankan kemerdekaan dan meneguhkan identitas sebagai bangsa itulah kemudian lahir karya besar bangsa Indonesia yang dicatat dunia, yaitu, terselenggarakannya Konferensi

Tingkat Tinggi Asia Afrika (KTT-AA) di Bandung, pada tahun 1955. Seorang wartawan India yang menjadi saksi peristiwa itu mengatakan, bagaimana hanya orang Indonesia yang mampu mengumpulkan seluruh manusia di bumi. Bangsa-bangsa yang bermusuhan, semua mengirimkan wakilnya. Dan forum kemudian menyepakati sebuah deklarasi yang menekankan pentingnya pengakuan hak seluruh bangsa-bangsa untuk lepas dari penjajahan. Dan sesudah KTT itu, banyak negara baru lahir merdeka keluar dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Sayang sekali sesudah itu, karya dunia bangsa Indonesia dalam politik sosial dan ekonomi, sebagaimana disampaikan jurnalis India ini, tidak ada. Bangsa Indonesia sesudah periode ini, tidak bertanggungjawab atas masalah dunia dan hanya asyik memperhatikan kebutuhan diri sendiri.

Sesudah periode awal kemerdekaan hingga 1960an, sistem pemerintahan Indonesia memang berubah dari sistem yang lebih demokratis ke pemerintahan otoriter Orde Baru. Di bawah pimpinan presiden Suharto pemerintah mengatakan orientasi ekonomi adalah tujuan negara. Penekanan pada pembangunan ekonomi dengan stabilitas ekonomi, diharapkan akan berujung pada konsolidasi demokrasi pada akhirnya. Tetapi, kekuasaan negara tanpa suara oposisi menyebabkan kesalahan pengelolaan negara tidak terkontrol.

Pada akhirnya, ketika pemerintahan presiden Suharto tumbang, rakyat melalui DPR menginginkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan

pemuliaan akan hak rakyat. Jika dalam pemerintahan Suharto, pemerintah dianggap lebih berhasil dalam mensejahterakan rakyat, kini dengan kebebasan politik yang lebih, pemerintah dianggap masih kurang mampu mensejahterakan rakyat. Bahkan tema persoalan yang dibahas dari pemerintahan ke pemerintahan pasca Orba adalah bagaimana menyelamatkan defisit anggaran.

Selain itu kondisi yang dialami oleh mayoritas masyarakat saat ini bertentangan dengan apa yang diharapkan ketika negara ini dibentuk. Korupsi merajalela, rasa aman terancam, kondisi ekonomi masih belum baik, dunia politik masih tidak menjanjikan rasa pasti akan hadirnya pemimpin yang berkualitas. Jika kondisi politik sosial itu tidak bisa ditangani dengan baik, ditambah dengan krisis ekonomi Eropa Amerika akan berdampak berat bagi Indonesia. Maka apakah ini semua adalah akan berulangnya sejarah kemunduran kerajaan-kerajaan nusantara masa lalu?

Atau justru, krisis ini akan menimbulkan peluang bagi Indonesia. Sebagaimana diyakini para sejarawan, kejayaan sebuah bangsa sesungguhnya ditentukan oleh dua sebab pendukung. Sebuah bangsa dianggap akan mampu berjaya di tingkat dunia, apabila memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam itu dimiliki oleh Indonesia. Lalu, sebuah bangsa akan mampu berjaya apabila memiliki sumberdaya manusia unggul. Hal inipun dimiliki oleh bangsa Indonesia. Suku-suku pembentuk bangsa ini diakui memiliki talenta luar biasa di berbagai bidang. Diantaranya,

dinikmati berbagai perusahaan dunia sebagai pekerja. Namun sejauh ini, taleta suku-suku itu tidak diorganisir sehingga di tingkat dunia, misal sebagai pekerja, hanya dihargai dengan yang murah.

Jika kemudian keberlimpahan sumber daya alam dan talenta luar biasa manusia Indonesia, ternyata tidak bermuara pada kejayaan bangsa Indonesia di tingkat dunia, maka persoalan pokoknya adalah tiadanya manajemen pengelolaan di tingkat negara yang belum mampu memuliakan potensi besar bangsa Indonesia. Karena itu, harus ada usaha untuk mengarahkan bangsa ini menjadi bangsa besar dalam arti sebenarnya. Bagaimana caranya?

Yang pertama mesti dimiliki oleh bangsa Indonesia, adalah kepercayaan diri. Orang Indonesia harus yakin bahwa dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai kumpulan manusia bernama bangsa, adalah kelompok yang sama hebatnya dengan orang Eropa, Amerika, Jepang, China, India, Rusia, juga bangsa lain, yang memiliki kemungkinan sama untuk menjadi pengelola dunia. Dengan demikian, perasaan inferior bahwa bangsa Indonesia hanyalah jenis manusia *reh-rehan* (mereka yang selalu tertaklukan) harus hilang dari bawah sadar manusia Indonesia. *Kedua*, memahami bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa berikutnya yang akan mampu memberikan sumbangan bagi pengelolaan dunia yang lebih baik.

Kesepakatan atas ide diatas harus ada pada para pemikir Indonesia modern secara bersama. Para pemikir tidak boleh lagi menempatkan bangsa

Indonesia hanya sebagai bagian kecil peradaban dunia dan bagian pelengkap bahkan antek kepentingan bangsa-bangsa besar lainnya. Kelompok pemikir Indonesia harus menyepakati bahwa, sebagaimana para bapak bangsa dahulu sepakat menjadikan cita-cita kemerdekaan adalah final, maka para pemikir Indonesia modern juga harus menyepakati bahwa bangsa Indonesia akan mampu melakukan konsolidasi atas potensi dirinya, baik dalam memanfaatkan sumberdaya alam kemajuan, kesejahteraan maupun pemerataan, maupun kesepakatan pendapat dalam perlunya menyatukan seluruh bakat yang dimiliki untuk sebuah tujuan bersama.

Yang *ketiga*, berbeda dengan tujuan bangsa-bangsa besar dunia ketika menjadi penguasa dunia melakukan eksploitasi atas alam dan manusia yang menciptakan penderitaan atas bangsa lain dan merusak alam, maka ketika bangsa Indonesia mampu menjadi salah satu “penguasa” dunia, maka tujuan utama pencapaian itu adalah menciptakan kemaslahatan umat manusia sedunia selain dirinya sendiri. Dalam bahasa Islam, apa yang dicitakan oleh bapak bangsa itu adalah *rahmataan lil alamiin* (menjadi karunia kasih, berkah bagi seluruh penghuni alam semesta, baik manusia maupun makhluk lainnya), dan diturunkan lagi menjadi dalam bahasa yang lebih teknis, *baldataun tayyibatun warafun ghafur* (menciptakan negeri yang baik, dengan penduduk yang berkelimpahan dan dalam limpahan ampunan dan karunia Allah SWT), atau dalam bahasa kaum nasionalis Jawa, apa yang

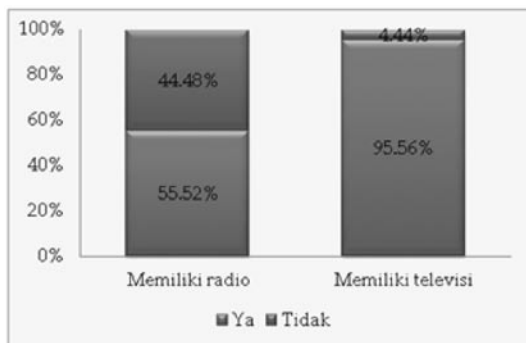
dicitakan adalah bagaimana menciptakan negara yang “*tata titi tentrem karto raharjo*” (negara yang dikelola dengan kesungguhan, kehati-hatian untuk tujuan ketentraman dan kesejahteraan rakyat.

Ketika pemetaan masalah menjadi jelas seperti di atas, maka langkah-langkah yang mendukung usaha diatas menjadi pasti. Posisi media negara seperti RRI juga harus ditetapkan tepat.

Berharap Pada RRI

Radio adalah salah satu media informasi yang dijadikan salah satu Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Berdasarkan indikator tersebut, tahun 2011 akses media informasi audio berupa kepemilikan radio oleh rumah tangga mencapai 55,2 % (Kominfo, 2011). Masih jauh jika dibandingkan dengan akses media informasi audio visual berupa kepemilikan televisi yang mencapai 95.56%. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan rumah tangga mengakses informasi melalui media televisi sebagai pilihan utama.

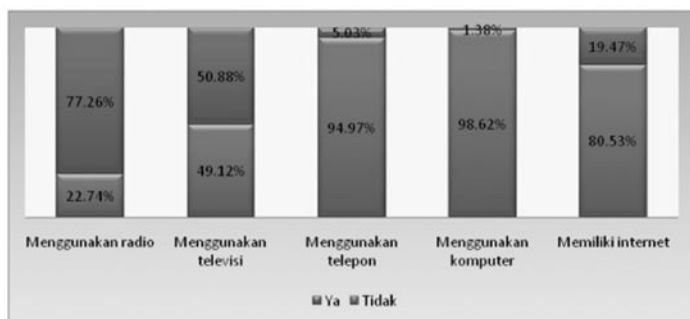
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Radio dan Televisi



Sumber : Kominfo 2011

Indikator TIK juga memasukkan indikator penggunaan radio di dunia pendidikan. Bagi dunia pendidikan, peran radio masih sangat minim. Dibandingkan dengan media lain, hanya 22,74% sekolah yang menggunakan radio untuk kegiatan pengajaran (Kominfo, 2011).

Proporsi Sekolah Terhadap Penggunaan Sarana TIK



Sumber : Kominfo 2011

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah satu-satunya Lembaga Penyiaran Publik yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tugas dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara melalui UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, PP 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta PP 12 tahun 2005, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjangkauan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran asing.

Saat ini, RRI memiliki 62 stasiun penyiaran termasuk Siaran Luar Negeri dan 5 (lima) satuan kerja (satker) lainnya yaitu Pusat Pemberitaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangdiklat) Satuan Pengawasan Intern, serta diperkuat 16 studio produksi serta 11 perwakilan RRI di Luar negeri RRI memiliki 61 (enam puluh satu) program 1, 61 program 2, 61 program 3, 14 *Programa 4* dan 7 studio produksi maka RRI setara dengan 205 stasiun radio.

RRI juga memiliki peran, antara lain :

1. Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat
2. Peran RRI sebagai Pelestari Budaya Bangsa
3. Peran RRI sebagai pelestari lingkungan
4. Peran RRI sebagai media pendidikan
5. Peran RRI sebagai Media Diplomasi Peran RRI sebagai media terdepan tanggap bencana
6. Peran RRI dalam menghubungkan tenaga kerja di Luar Negeri Peran RRI sebagai media hiburan
7. Peran RRI dalam sabuk pengaman informasi

(Safety belt information)

Potensi besar yang dimiliki oleh RRI ini seharusnya mampu dioptimalkan untuk menjawab tantangan ke-Indonesia-an seperti yang dijelaskan di atas. Agar apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini tercapai. Ini semua dapat ditempuh dengan merevitalisasi peran dan fungsi RRI sebagai satu-satunya Lembaga Penyiaran Publik dengan lebih mempertimbangkan perubahan eksternal dan perbaikan kondisi internal. **[M. Faried Cahyono dan Lukman Hakim]**

Daftar Pustaka

- Abidin Ass, Djamalul, 1995. *Kronologis Lahirnya Radio Republik Indonesia dalam Antena RRI (Edisi Khusus)*, Jakarta: Stasiun Nasional-Dit Radio.
- Abidin Ass, Djamalul, 1995. *Sekali di Udara Tetap di Udara 40 Tahun Radio Republik Indonesia*, Jakarta: Panitia Peringatan Hari Radio Ke-40.
- Abidin Ass, Djamalul, 2000. *RRI 55 Tahun*, Jakarta: Perjan RRI
- Abidin Ass, Djamalul, dkk (Penyunting), 1985. *Sekali di Udara Tetap di Udara 40 Tahun RRI*, Jakarta: Panitia Hari radio ke-40..
- Atmakusumah, 1982. *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia.
- Darmanto, 1998. *Pergelaran Wayang Kulit RRI, TVRI, dan KR dalam SKH Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta: 11 Januari.
- Darmanto, 2004. *Dilema Status Perjan RRI Menuju Terwujudnya Radio Publik*, dalam *Jurnal Ilmu*

- Komunikasi*, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus,
Yogyakarta: UPN Veteran
- Darmanto, Antonius, 1995. *Sejarah RRI Nusantara II Yogyakarta Periode 1934-1950 dalam Sudarmiyono, dkk, 50 Tahun RRI Yogyakarta Mengudara*, Yogyakarta: RRI dan Aditya Media.
- Darmanto, Antonius, dkk (Editor), 2001. *Pemahaman dan Aplikasi Prinsip-prinsip Radio Publik, Proseeding Semiloka di Yogyakarta*, Yogyakarta: RRI dan Radio Swedia.
- Departemen Penerangan RI, 1983. *Pedoman Penerangan 1983-1988*, Jakarta: Departemen Penerangan
- Effendy, Onong Uchjana, 1990. *Radio Siaran Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju
- Eryono, A. dkk., 1985. *Memoar Perjuangan Menegakkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945*, Yogyakarta : Yayasan Wiratama.
- Hadisoekanto, *Saksi Sejarah Bertutur, dalam Sudarmiyono, dkk, op. cit., hlm. 19. Periksa juga Suryo Sumarno, dkk, RRI Nusantara II Yogyakarta Bergulat Dalam Karya*, (Yogyakarta : RRI, 1985), hlm. 22.
- Kementerian Penerangan RI, 1953, *Sejarah Radio di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Penerangan – Jawatan Radio Republik Indonesia
- Koesoemanto, H.J dan FX Koesworo, 1983. *Obrolan Pak Besut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Latief, A., 1980. *Pers di Indonesia di Zaman Pendudukan Jepang*, Surabaya: Karya Anda.
- Maladi, 1985. *Jejak Langkah Perjuangan RRI masa Revolusi*

- Fisik (1945-1950) dalam Abidin, dkk, Sekali di Udara Tetap di Udara 40 Tahun Radio Republik Indonesia*, Jakarta: Panitia Peringatan Hari Radio Ke-40.
- Mardianto, Heery dan Darmanto, 2001. *Tradisi Sastra Jawa Radio*, Yogyakarta: Kalika bekerjasama dengan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation
- Moedjanto, G., 1992. *Indonesia abad ke-20 I*, Yogyakarta: Kanisius.
- Onghokham, 1989. *Runtuhnya Hindia Belanda*, Jakarta : PT. Gramedia
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1990. *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, 1991. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sen, Kresna dan David T. Hill, 2001. *Media, Budaya dan Politik di Indonesia (Terjemahan)*, Jakarta: ISAI
- Sudarmiyono, Darmanto, Niken Widiastuti, 1995. *Saksi Sejarah Bertutur, dalam, 50 Tahun RRI Yogyakarta Mengudara*, Yogyakarta: RRI dan Aditya Media
- Sumarno, Suryo, 1981. *Hari Radio Ke-36 Selayang Pandang*, Yogyakarta: RRI.
- Sumarno, Suryo, dkk, 1985. *RRI Nusantara II Yogyakarta Bergulat Dalam Karya*, Yogyakarta: RRI.
- Tarjo, N.S.S, 1984. *Dari Atas Tanduk Pak Dirman Memimpin Perang Rakyat Semesta*, Yogyakarta : Yayasan Wiratama
- Wawancara dengan Thomas Soegito, saksi sejarah

- radio, mantan anggota Redaksi RRI Pusat di Yogyakarta; pada tanggal 9 Maret 1995. Wawancara dilakukan oleh Darmanto dalam rangka penulisan buku Lima Puluh Tahun RRI Yogyakarta Mengudara.
- Wild, Colin dan Peter Carey, 1986. *Gelora Api Revolusi Sebuah Antologi Sejarah*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Wiryan, Hari, 2011. *Mangkunegoro VII dan Awal Penyiaran Indonesia*, Solo dan Jakarta: LPPS

Tentang Penulis

ANANG ZAKARIA. Anggota Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta. Bekerja di Tempo sejak tahun 2008. melakukan tugas liputan di Yogyakarta dan sekitarnya. Sebelumnya pernah tinggal di Denpasar, Surabaya, Madiun, dan Magelang.

BAMBANG MURYANTO, adalah jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen. Dulu pernah bekerja di Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta (1996-2000). Setelah itu menjadi jurnalis freelance dan aktif di gerakan civil society di Yogyakarta. Kini menjadi contributor The Jakarta Post untuk wilayah Yogyakarta. Selain aktif di dunia jurnalistik, Bambang Muryanto juga mengajar di jurusan Komunikasi di beberapa universitas di Yogyakarta.

DARMANTO adalah Peneliti Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, UPT Balitbang Kemenkominfo. Periode 1983-2004 bekerja di RRI Yogyakarta sebagai penulis naskah, announcer/pemain, produser/sutradara acara pendi-

dikan, kebudayaan, dan sandiwara radio. Banyak menulis mengenai RRI baik dalam bentuk artikel populer untuk koran, jurnal, buku, maupun laporan penelitian. Aktif dalam berbagai penyelenggaraan diskusi tentang RRI. Pekerjaan sampingnya adalah sebagai dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi, antara lain UAJY, UNY, dan STMM “MMTC”. Email: dmt_mpm@yahoo.co.id

HERU LESMANA SYAFEI. Lahir di Lhokseumawe, 13 Maret 1982, alumnus Filsafat UGM tahun 2006. Bekerja sebagai fotografer dan penulis lepas sejak 2011. Sebelumnya, bekerja sebagai wartawan pada media harian di Yogyakarta selama 2,5 tahun. Bisa dihubungi lewat contact@heruls.net

LUKMAN HAKIM, lahir di Lampung, 8 Juni 1986. Kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Gadjah Mada. Terlibat aktif sebagai peneliti muda maupun asisten peneliti untuk kegiatan penelitian bidang ekonomi dan sosial.

MASDUKI, M.Si. Menjabat sebagai Direktur Program dan Produksi LPP RRI. sehari-hari lebih suka disapa dengan mas atau bang Adink, lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menempuh studi S-1 pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga selesai tahun 1999, kemudian melanjutkan studi S-2 konsentrasi Teori dan Penelitian, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, tamat tahun 2004. Juga melanjutkan studi strata 2 kajian Jurnalistik Departemen Ilmu Komunikasi

Universitas Ateneo Manila, Filipina (selesai tahun 2006). Karir profesional dimulai sebagai reporter, pemandu talkshow dan kepala pemberitaan di Radio Prima Unisi FM Yogyakarta tahun 1996-2001, kemudian menjadi koresponden Kantor Berita Radio 68H Jakarta (1998-2001), koresponden Radio Suara Jerman (1998) dan sejak tahun 2007 menjadi Direktur Riset dan SDM PT. Radio Prima Unisi FM Yogyakarta. Aktif menjadi trainer dalam pengembangan radio komunitas, radio dan isu gender-AIDS di Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, NTT, Sulawesi, Kalimantan. Menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta periode 2002-2004 dan anggota Dewan Etik Nasional AJI Indonesia periode 2006-2009.

MASJIDI, S.Ag., M.A. Lahir di Sulawesi Tenggara pada tahun 1977, dan menyelesaikan studi S 1-nya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S 2 di UGM Yogyakarta. Ia juga merupakan alumni *International Institute for Journalism (IIJ)* yang bermarkas di Berlin. Saat ini ia menjabat sebagai Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta periode 2010–2013, dan pernah menangani program penerbitan buku kerjasama AJI Yogyakarta dan RRI tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (2011), dan Local Fasilitator untuk Penguatan Kapasitas Jurnalis DIY-Jateng bekerjasama dengan Program Representasi USAID (2012).

M. FARIED CAHYONO, lahir di Blora, 4 Januari 1965. Mulai menulis untuk koran anak-anak

ketika masih duduk di Sekolah Menengah Pertama. Pekerjaan jurnalis secara aktif dilakukan sejak mahasiswa, sambil menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sesudah lulus dari kuliah, Faried bekerja di Majalah Tempo hingga koran ini dibredel rezim Orde Baru pada 21 Juni 1994. Sesudah itu bekerja untuk Majalah Forum Keadilan hingga tahun 2000. Selama beberapa tahun Faried bekerja sebagai kontributor untuk Time Magazine, Reuters, Jakarta Post dan fixer untuk SBS- TV Australia. Saat ini kegiatan utama nya adalah melakukan riset sosial dan ekonomi, menulis buku, artikel maupun kolom, serta mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) dan UGM Yogyakarta.

OLIVIA LEWI PRAMESTI, 26 tahun, gadis kelahiran Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Profesi jurnalis dan saat ini diberi mandat untuk menjadi kontributor National Geographic Indonesia Online di wilayah Yogyakarta. Selain menekuni profesi jurnalis, tengah melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Komunikasi. Anggota AJI Yogyakarta ini pun memiliki pengalaman menjadi pembicara jurnalistik di berbagai seminar dan tengah mengajar di salah satu universitas swasta di Yogyakarta.

PITO AGUSTIN RUDIANA. Lahir di Boyolali pada 16 Agustus 1978. Menenal dunia tulis-menulis sejak kelas III SD dengan menulis skenario drama, puisi, juga cerpen. Tak ketinggalan

novel yang tak pernah rampung. Baru ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hobi menulis disalurkan lewat Lembaga Pers Mahasiswa “Keadilan” (1998-2000). Begitu pun aksi turun ke jalan menentang arogansi kampus dan rezim Orde Baru. Kian terpupuklah semangat untuk menulis hingga kini saat bekerja di Harian Sore “Wawasan” di Semarang pada 2002, Harian Pagi “Bernas Jogja” di Yogyakarta (2003-2008), dan Tempo (2008-sekarang). Pada 2010, didaulat menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta periode 2010-2013. Menjadi “manusia biasa yang tak biasa” adalah pilihannya.

